

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN IMPLEMENTASI UNDANG
UNDANG DESA PERSPEKTIF ETIKA ISLAM
(Studi Di Kecamatan Tegineneng
Kabupaten Pesawaran)**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Filsafat Agama**



PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN IMPLEMENTASI UNDANG
UNDANG DESA PERSPEKTIF ETIKA ISLAM
(Studi Di Kecamatan Tegineneng
Kabupaten Pesawaran)**

Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Fauzie Nurdin, M. S
Pembimbing II : Dr. M. Sidi Ritaudin, M. Ag



Oleh

**NAMA : AGUS DEFRIYANTO
NPM : 1676137001
PROGRAM STUDI : AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2018 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS DEFRIYANTO
NPM : 1676137001
Jenjang : Strata Dua (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, tesis yang berjudul **Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasi Undang-Undang Desa Perspektif Etika Islam (Studi Di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)** adalah benar karya asli saya, terkecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan serta plagiasi dalam tesis ini, saya sepenuhnya akan bertanggungjawab sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Bandar Lampung, Juli 2018

Yang Menyatakan,

AGUS DEFRIYANTO

NPM: 1676137001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)**

Alamat : Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392

**PERSETUJUAN
Ujian Terbuka**

Judul Tesis : **Pembangunan Berkelanjutan Implementasi Undang-Undang
Desa Perspektif Etika Islam (Studi Di Kecamatan Tegineneng
Kabupaten Pesawaran)**
Nama : Agus Defriyanto
NPM : 1676137001
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka pada Program
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Bandar Lampung , Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. A. Fauzie Nurdin, M. S
NIP.195212041980031002

Dr. M. Sidi Ritaudin, M. Ag
NIP.196505101992031003

**Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung**

Dr. Septiawadi, M. Ag
NIP.197409032001121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
Alamat : Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul **”Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasi Undang-Undang Desa Perspektif Etika Islam (Studi Di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)”** yang ditulis oleh: **Agus Defriyanto, (NPM : 1676137001)** ini telah lulus dalam Ujian Tesis Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Tim Penguji,

Ketua Sidang	: Dr. Septiawadi, M.Ag
Penguji I	: Dr. Himyari Yusuf, M. Hum
Penguji II	: Prof. Dr. H. A. Fauzie Nurdin, MS
Sekretaris	: Dr. A. Fauzan, M. Pd

Tanggal Lulus Ujian Tesis Terbuka : 16 Oktober 2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
Alamat : Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "**Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasi Undang-Undang Desa Perspektif Etika Islam (Studi Di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)**" yang ditulis oleh: **Agus Defriyanto, (NPM : 1676137001)** ini telah lulus dalam Ujian Tesis Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: Dr. Septiawadi, M.Ag
Penguji I	: Dr. Himyari Yusuf, M. Hum
Penguji II	: Prof. Dr. H. A. Fauzie Nurdin, MS
Sekretaris	: Dr. A. Fauzan, M. Pd

Tanggal Lulus Ujian Tesis Terbuka : 16 Agustus 2018


Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Idham Kholid, M. Ag
NIP.196010201988031005

ABSTRAK

**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN IMPLEMENTASI UNDANG
UNDANG DESA PERSPEKTIF ETIKA ISLAM**
(Studi Di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)

Pembangunan hanya dapat mempertahankan mutu manusiawinya apabila dilandasi oleh sikap hormat terhadap manusia, bukan hanya manusia terhadap abstraksi, sebagai suatu paham filosofis, melainkan terhadap segenap manusia konkret yang hidup dalam wilayah yang terkena pembangunan itu. Hormat terhadap manusia berarti mengakui kedudukannya yang sama, tidak melakukannya sebagai obyek perencanaan, berorientasi pada harapan-harapannya, tidak pernah mengorbankan pihak yang satu demi keuntungan pihak yang lain, tidak membela kemajuan dengan menyengsarakan yang lain. pembangunan berkelanjutan adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.



Penelitian ini bersifat *field research*, jenis penelitian ini lapangan yang memfokuskan pada pembangunan berkelanjutan implementasi Undang-Undang Desa perspektif etika Islam, kemudian data-data yang sudah terkumpul dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung kepada obyek sasaran yaitu dengan mengadakan wawancara pada pemerintahan kecamatan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda-pemudi, guna untuk mendapatkan sumber dan materi yang menjadi objek penelitian. Undang-undang desa tidak hanya mengamankan pengaturan tentang keuangan desa, tetapi juga meliputi pengakuan terhadap kewenangan desa, kerjasama antar desa, penguatan lembaga pemasyarakatan desa, penetapan dan pemberdayaan desa adat, partisipasi masyarakat desa dan sebagainya. Disisi lain demokratisasi desa juga masih terkendala oleh lemahnya tingkat partisipasi yang substantif dan konstruktif dari masyarakat desa. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Selanjutnya, apakah desa akan menjadi desa yang maju dan rakyatnya sejahtera dimasa mendatang, ditentukan oleh sejauh mana etika para pengelola keuangan desa. Masalah etika adalah salah satu masalah yang banyak dibicarakan dewasa ini, terutama etika yang menyangkut tentang hidup di lingkungan masyarakat, banyak dari mereka yang mengadopsi

budaya barat sedangkan budaya lokal juga telah lama menjajakkan dan menjelaskan tentang bagaimana manusia beretika tersebut, dan yang jadi masalahnya longgarnya pegangan terhadap agama, yang mengakibatkan maraknya budaya materialistis, hedonis dan skularistis. Pengaruh modernisasi yang cukup pesat menjadikan manusia lebih menginginkan hidup serba instan tanpa lagi mempertimbangkan baik atau tidaknya perbuatan tersebut.

Penelitian ini berangkat dari menurunnya etika pengemban kebijakan yang bahkan sudah merambah ke berbagai kalangan, dimana kejujuran, tidak mengambil segala sesuatu yang bukan haknya, mendahulukan kepentingan masyarakat adalah implementasi dari etika Islam, saat etika Islam digunakan dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan desa maka etika kehidupan berbangsa pun dapat berlangsung dengan baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan implementasi undang-undang desa bukan hanya berkaitan mengenai masalah pembangunan yang terealisasi disuatu daerah yang dilakukan masyarakat setempat, melainkan juga terdapat makna yang berkaitan dengan pembinaan etika, khususnya bagi para aparatur pemerintahan kecamatan dan masyarakat desa, karena implementasi undang-undang desa untuk para aparatur pemerintahan kecamatan dan masyarakat desa. Bertitik tolak pada krisis etika yang sedang dialami masyarakat saat ini disebabkan oleh salah satunya punahnya kejujuran, tidak mengambil segala sesuatu yang bukan haknya yang sudah digantikan dengan budaya materialistis, hedonis dan skularistis. Maka nilai-nilai pada etika Islam sangat relevan bagi pembinaan etika generasi saat ini. Implikasi penelitian ini adalah bahwa nilai-nilai yang ada pada pembangunan desa sangat dibutuhkan untuk pendidikan etika bagi generasi dewasa ini.

ABSTRACT

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE LAW THE VILLAGE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ETHICS

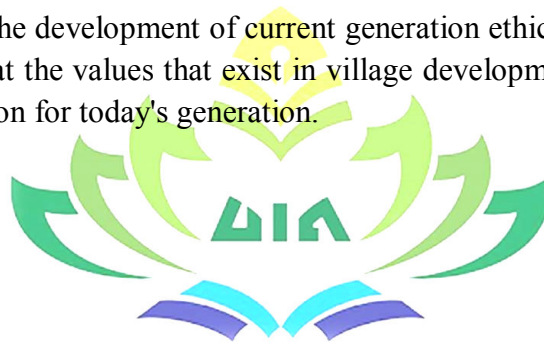
(Study In Districts Tegingeneng Pesawaran)

Development can only maintain its human qualities when based on respect for human beings, not just human beings against abstraction, as a philosophical idea, but against all concrete people living in the affected areas. Respect for man means acknowledging his equal position, not doing it as the object of planning, oriented towards his expectations, never sacrificing one for the benefit of the other, not defending progress by afflicting the other. sustainable development is an effort to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs.

This research is field research, this type of field research that focuses on the continuous development of the implementation of the Village Law ethical perspective of Islam, then the data have been collected analyzed by using qualitative analysis then drawn conclusions by using deductive methods. This research is done by interviewing and direct observation to the target object by conducting interviews on districts government, adat leaders, religious figures, community figures, and youth leaders, in order to get the source and the material that become the object of research. Village laws not only mandate village finance arrangements, but also include recognition of village authority, inter-village co-operation, strengthening village prisons, establishing and empowering indigenous villages, village community participation and so on. On the other hand the democratization of the village is also constrained by the lack of substantive and constructive participation from the village community. At least this is used by parties who are only concerned with personal interests. Furthermore, whether the village will become an advanced village and prosperous people in the future, determined by the extent to which ethics of village financial managers. Ethical issues are one of the most talked-about issues of today, especially ethics concerning living in the community, many of them adopting western culture whereas local culture has also longed to explain and explain how ethical people are, and the problem is the lack of grip against religion, resulting in the rise of materialistic, hedonic and skularistic cultures. The influence of modernization is fast enough to make people want to live all-round instant without considering the good or not the action.

This study departs from the declining ethics of policy-makers who have even penetrated into various circles, where honesty, not taking everything that is not his right, prioritizing the interests of society is the implementation of Islamic ethics, when Islamic ethics is used well by the village government organizers then the ethics of national life can work well.

The results of this study indicate that the continuous development of village law implementation is not only related to the realization of development problems in a region conducted by the local community, but also there are meanings related to ethical development, especially for the sub-district and village government apparatuses, because the implementation of the law -a village invited to the sub-district and village government apparatus. Starting at an ethical crisis that is being experienced by society today is caused by one of the extinction of honesty, not taking everything that is not the right that has been replaced with materialistic, hedonic and skularistic culture. So the values on Islamic ethics are very relevant for the development of current generation ethics. The implication of this research is that the values that exist in village development are indispensable for ethical education for today's generation.



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ذ	Dz	ظ	Zh	ن	N
ب	B	ر	R	ع	‘	و	W
ت	T	ز	Z	غ	Gh	ه	H
ث	Ts	س	S	ف	F	ء	’
ج	J	ش	Sy	ق	Q	ي	Y
ح	Ha	ص	Sh	ك	K		
خ	Kh	ض	Dh	ل	L		
د	D	ط	Th	م	M		

2. Vokal

Vokal Pendek		Contoh	Vokal	Panjang	Contoh	Vokal Rangkap	
	A	جدل	ا	Â	سار	اي...	Ai
	I	سبل	ي	Î	قيل	و...	Au
	U	ذكر	و	Û	يجور		

3. Ta' marbuthah

Ta' marbuthah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kashrah*, dan *dhammah*, transliterasinya ada /t/. Sedangkan *ta' marbuthah* yang mati transliterasinya adalah /h/. Seperti kata: *Thalhah*, *janatu al-Na'im*.

4. *Syaddah* dan Kata Sandang.

Dalam transliterasi, tanda *syaddah* dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Seperti kata: *nazzala, rabbana*. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*. Contoh : *al- markaz, al Syamsu*.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah *rabbul 'alamin*, atas *rahman* dan *rahim*-Nya peneliti dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis dengan judul **Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasi Undang-Undang Desa Perspektif Etika Islam (Studi Di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)**. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW., Utusan-Utusan Allah, para keluarga, sahabat dan umat-Nya yang setia pada jalan-Nya.

Karya ilmiah berupa tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana, program studi Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag).

Atas bantuan dari semua pihak dalam menyelesaikan tesis ini, peneliti mengucapkan banyak terimakasih. Ucapan terimakasih peneliti haturkan kepada;

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, sebagai Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag sebagai direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
3. Dr. Septiawadi, M. Ag, sebagai ketua prodi Aqidah dan Filsafat Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
4. Prof. Dr. H. A. Fauzie Nurdin, M. S sebagai pembimbing I;

5. Dr. M. Sidi Ritaudin, M. Ag sebagai pembimbing tesis II. Semoga Allah melimpahkan ridho dalam perjuangannya.
6. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan;
7. Pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung;
8. Para tokoh adat, tokoh masyarakat, aparatur desa serta aparatur kecamatan dan tokoh agama kecamatan Tegineneng yang telah memberikan pengetahuan dan wawasannya kepada penulis;
9. Kedua orang tua, kakak, dan keluarga besar peneliti yang selalu memberi dukungan dan do'a. Semoga Allah memberi kesehatan, keberkahan dan ridho kepada mereka;
10. Keluarga kelas Aqidah dan Filsafat Islam, angkatan 2016. (Dian Setiadi, Heri Kurniawan, Melva, Rani Rosani, Rosalia);
11. Almamaterku tercinta UIN RADEN INTAN LAMPUNG, tempatku menempuh studi, menimba ilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kiranya para pembaca dapat memberikan kritik dan saran guna perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya, semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	20
1. Identifikasi Masalah.....	20
2. Batasan Masalah.....	22
3. Rumusan Masalah.....	22
C. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN	23
D. TUJUAN PENELITIAN.....	24
E. MANFAAT/SIGNIFIKASI PENELITIAN	24
F. KERANGKA TEORI	25
G. METODOLOGI PENELITIAN.....	28
BAB II HAKIKAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	35

	A. Pengertian Dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan	35
	B. Implementasi Undang-Undang Desa.....	46
	C. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	55
	D. Makna Etika Islam Bagi Pembangunan.....	58
	DESKRIPSI MASYARAKAT DI TEGINENENG	
BAB III	KABUPATEN PESAWARAN DAN IMPLEMENTASI	
	UNDANG-UNDANG DESA.....	64
	A. Keadaan Geografis dan Demografis.....	64
	a. Penduduk dan Pendidikan.....	65
	b. Mata Pencaharian	67
	c. Sosial Keagamaan.....	69
	d. Sarana Kesehatan.....	71
	e. Kondisi Perumahan.....	71
	B. Kondisi Masyarakat Tegineneng	72
	1. Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.....	72
	2. Ekonomi dan Budaya.....	74
	3. Implementasi Kebijakan Perumahan Masyarakat.....	76
	C. Undang-undang Desa	78
	1. Hakikat Undang-undang Desa.....	78
	2. Tujuan Dan Fungsi Undang-undang Desa	84
	D. Implementasi Undang-undang Desa dan Dampaknya di Tegineneng Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	89
BAB IV	PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM	
	PANDANGAN ETIKA ISLAM.....	111
	A. Pembangunan Berbasis Etika Islam.....	111

	B. Peran Etika Islam dalam Pembangunan	
	Berkelanjutan	111
	C. Aktualisasi Etika Islam dalam Pembangunan di	
	Tegineneng.....	119
BAB V	PENUTUP.....	126
	A. KESIMPULAN	126
	B. SARAN	127
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Keadaan Penduduk (Jiwa)	65
2. Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan (Jiwa)	67
3. Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian (Jiwa)	68
4. Tabel 4 Tabel Penduduk Menurut Agama Di Tegineneng Tahun 2017 (jiwa).....	69
5. Tabel 5 Fasilitas Berdasarkan Tempat Ibadah.....	70
6. Tabel 6 Sarana Kesehatan	71
7. Tabel 7 Kondisi Rumah	71
8. Tabel 8 Tingkat Pendidikan Masyarakat 2017	73
9. Tabel 9 Tingkat Kesehatan Masyarakat.....	74
10. Tabel 10 Pendapatan Rata-rata Penduduk Tahun 2017	75
11. Tabel 11 Pendapatan Rata-rata Penduduk Tahun 2017.....	75
12. Tabel 12 Pola Konsumsi Tahun 2017	76
13. Tabel 13 Tingkat Perumahan Masyarakat Tahun 2017	77
14. Tabel 14 Indikator Kesejahteraan Sebelum ada ADD tahun 2017 dan Sesudah ada ADD.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-undang Desa) menandai babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional, dimana desa menjadi titik tumpu yang mendapatkan perhatian serius. Undang-undang Desa diyakini sebagai gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju, berkeadilan dan menyejahterakan. Sebagai dasar hukum bagi keberadaan desa, Undang-undang Desa mengkonstruksi cara pandang baru praksis berdesa (pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa). Desa diakui dan dikukuhkan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus dirinya sendiri.

Perubahan dan paradigma baru atas desa itu sangat penting mengingat kondisi objektif dan dinamika desa-desa di Indonesia yang secara umum masih memprihatinkan. Desa identik dengan ketertinggalan dalam semua aspek kehidupan. Kewenangan mengatur dan mengurus dirinya sendiri yang dibarengi dengan memberikan hak-hak desa, sehingga desa memiliki kemampuan finansial yang memadai guna melaksanakan kewenangannya, sebagaimana ditegaskan Undang-undang Desa, menjadi faktor penggerak peningkatan pembangunan desa yang sekaligus menjadi ruang krusial implementasi Undang-undang Desa.

Pembangunan desa sebagai sistem yang dikonstruksi Undang-undang Desa, menempatkan masyarakat pada posisi strategis, sebagai subjek pembangunan, dengan demikian, masyarakat memiliki ruang dan peran strategis dalam tata kelola desa, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan desa. Isu penting dalam konteks ini adalah peningkatan keberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya desak yang efektif untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik dan penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi sama halnya dengan perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang lain, daerah satu dengan daerah lainnya. Namun, secara umum ada satu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Berikut pengertian pembangunan menurut para ahli:¹

- Nugroho dan Rochim Danuri, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.
- Ginanjar Kartasasmita, pembangunan yaitu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
- Nurcholish Madjid, pembangunan adalah usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan tanpa meninggalkan aspek moralitas bangsa.
- Plato, berpendapat bahwa tidak ada guna pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang tanpa dilandasi oleh perannya etika.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangannya yaitu proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.

Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan ataupun pembangunan ekonomi masyarakat dan tetap mengindahkan peran etika. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan dibidang sosial, politik, ataupun pembangunan ekonomi masyarakat. ADD adalah bagian keuangan desa yang

¹ Badruddin. *Teori dan Indikator Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), h. 72.

diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).²

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional riil dan meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi selalu di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan.³ Dengan berdasarkan pendekatan bahwa pembangunan didasarkan pada pembangunan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang. Dalam hal ini pembangunan desa mengutamakan prinsip imbang kewajiban yang serasi antara keduanya, yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat yang memberikan partisipasi dalam pembangunan berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan.⁴

Melihat dari arti hakiki pembangunan, pada dasarnya menekankan pada aspek nilai-nilai kemanusiaan, seperti menunjang kelangsungan hidup atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, harga diri atau adanya perasaan yang layak menghormati diri sendiri dan tidak menjadi alat orang lain, kebebasan atau kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan. Selain itu, arti pembangunan yang paling dalam adalah kemampuan orang untuk mempengaruhi masa

² Loncolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 31.

³ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dan Bina Grafika, 1999) h. 14.

⁴ Kansil dan Cristine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: SinarGrafika, 2002), h. 3.

depannya, yang mencakup kapasitas, keadilan, penumbuhan kuasa dan wewenang.

Berkaca dari pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang di programkan Negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol “Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)”. Pada masa orde baru secara substensial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat top-down, pada era reformasi secara substensial pembangunan desa lebih kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantara Program Inpres Desa Tertinggal dan bantuan masyarakat tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat botten-up atau kombinasi top-down dan botten-up. Program pembangunan desa yang bersifat botten-up tertuang dalam undang-undang Otonomi Daerah (OTDA).

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang

menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan pada potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintah ditingkat paling bawah, yaitu desa.⁵

Franz Magnis Suseno memberikan pendapatnya bahwa pembangunan hanya dapat mempertahankan mutu manusiawinya apabila dilandasi oleh sikap hormat terhadap manusia, bukan hanya manusia terhadap abstraksi, sebagai suatu paham filosofis, melainkan terhadap segenap manusia konkret yang hidup dalam wilayah yang terkena pembangunan itu. Hormat terhadap manusia berarti mengakui kedudukannya yang sama, tidak melakukannya sebagai obyek perencanaan, berorientasi pada harapan-harapannya, tidak pernah mengorbankan pihak yang satu demi keuntungan pihak yang lain, tidak membela kemajuan dengan menyengsarakan yang lain.⁶

Menyikapi perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, konsep pembangunan yang direncanakan secara sengaja patut dicermati, dengan tujuan mentransformasi format sosial atas dasar kerja bersama untuk menatap masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan memiliki daya saing di era global.⁷

Pelaksanaan bantuan alokasi dana desa di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran tahun 2017 yaitu sebesar Rp 12.457.863.243 (dua belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) terdiri dari 16 (enam belas) desa yaitu: Trimulyo, Gerning, Kresno Widodo, Gedung Gumanti, Kota Agung, Bumi Agung, Kejadian, Batang Hari Ogan, Negara Ratu Wates, Gunung Sugih Baru, Sinar Jati, Margorejo, Margo Mulyo, Panca Bakti, Rejo Agung, Sriwedari, yang berjumlah 17.250 (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh) KK. Kondisi perekonomian di

⁵ Akbar Prabawa, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 3 No. 228 (Desember 2015).

⁶ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Gramedia, 1986), h.18.

⁷ A. Fauzie Nurdin, *Budaya Muakhi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), h. 19.

Kecamatan Tegineneng didominasi pada sektor pertanian 70% (tujuh puluh persen), dan pedagang, wiraswasta, PNS dan pensiunan sebesar 30% (tiga puluh persen).⁸

Diterbitkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat ini karena pemerintah desa diyakini lebih mampu prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang kebutuhan permasalahan yang lebih luas dan rumit. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹

Berikut ini, tujuan dari disahkannya UU Desa ini antara lain:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

⁸ Haryoto, *Wawancara*, Sekretaris Camat Tegineneng, 02/03/2018.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Asas pengaturan yang termaktub dalam UU Desa adalah:¹⁰

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa diakui, ditata, dan dijamin;

¹⁰ *Ibid.*

9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Setiap produk hukum, seperti Undang-Undang, tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan setelah disahkan. Begitu pula dengan UU Desa. Kelebihan dan kekurangan yang ada di UU Desa. Penulis akan menganalisa kelebihan dan kekurangan tersebut.

- a. Kelebihan

Pada UU Desa ini, terdapat poin yang memang sudah dicanangkan sekitar 7 tahun lamanya. Yaitu, adanya aturan yang membahas terkait alokasi anggaran untuk desa. Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang keuangan desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi.

Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, tentu diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu menyejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal. Jika mampu mengelola dengan baik dan bijaksana, maka bukan hal yang mustahil jika masyarakat desa yang berada di garis kemiskinan dapat berkurang dan mungkin saja dapat bersaing dengan masyarakat desa lainnya atau bahkan masyarakat global secara umumnya.

Pada perangkat desa seperti kepala desa juga tidak luput dari pembahasan dalam UU Desa. kepala desa menurut UU Desa pasal 26 ayat 1, bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada pasal yang sama di ayat 3 huruf c, dijelaskan bahwa kepala desa menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. Selain itu, segala hal yang berhubungan dengan kepala desa, baik itu tugas, wewenang, larangan, hingga masa jabatan seorang kepala desa, juga tertuang di UU Desa. Pada jajaran perangkat desa lainnya, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

juga diberikan penjelasan-penjelasan terhadap seperti apa fungsi BPD, tugas-tugasnya, wewenang, kewajiban, hingga larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPD.

Secara umum, UU Desa telah menjabarkan secara sistematis dan mampu memberikan hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Dengan adanya UU ini, maka setiap desa dapat menyejahterakan masyarakatnya sesuai dengan prakarsanya pada masing-masing desa. Adanya UU ini juga menjadi dasar hukum yang sangat berarti bagi setiap desa, karena UU ini bisa dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan-pembangunan di desa. Maka, kelebihan UU Desa yang paling terlihat adalah telah adanya dasar hukum yang jelas bagi setiap desa di Indonesia.

b. Kekurangan

Di balik kelebihan, tentu terdapat pula kekurangan. Begitupula pada UU Desa. Ada berbagai kekurangan yang terdapat dalam UU Desa. Tidak hanya dalam segi isi, namun juga dalam hal penerapannya. Dari segi isi, terdapat kekurangan terutama dalam pengertian desa adat. Sebelum terbitnya UU ini, setiap wilayah memiliki pengertian desa adat yang berbeda-beda. Sebagai contohnya, di Bali. Pengertian desa adat adalah tempat pelaksanaan ajaran agama dalam sprit takwa, etika, dan upacara yang bertalian pada wilayah *pawongan* (warga/krama desa), *palemahan* (wilayah desa), dan *parahyangan* (keyakinan agama). Sedangkan menurut UU Desa, desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Maka dari itu, harus ada penyeragaman pengertian arti desa adat, agar tidak ada gelojak dikemudian hari.

Masih dalam segi isi UU Desa, dikatakan bahwa setiap desa akan mendapatkan dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling sedikit 10 persen setiap tahunnya. Maka, dapat diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.2 hingga 1.4 miliar setiap tahunnya. Berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU Desa yaitu, 10 persen dari dan

transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia.

Total dana yang sangat fantastis itu, tidak mustahil akan diselewengkan oleh perangkat desa yang tidak bertanggungjawab. Maka, penting adanya pengawasan, dalam hal ini adalah tugas BPD dan pemerintah daerah setempat, yang dilakukan secara berkala terhadap setiap desa agar pembangunan desa lebih tepat sasaran. Masalah lainnya juga akan timbul, yaitu adanya perbedaan-perbedaan keadaan atau kondisi desa yang ada di Indonesia. Ada desa yang memang sudah mandiri dan sudah mampu menyejahterakan masyarakatnya dengan berbagai cara sebelum lahirnya UU Desa. Akan tetapi, ada pula desa yang tertinggal dan masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jika nantinya akan dikucurkan dana alokasi tersebut, dikhawatirkan akan mubazir bagi desa maju dan akan tetap merasa kekurangan bagi desa tertinggal. Sekali lagi, peran pengawasan sangat diharapkan mampu mengawasi penggunaan dana alokasi tersebut agar dana alokasi tersebut tepat sasaran sesuai kebutuhan dan keperluan masing-masing desa.

Masa jabatan kepala desa juga mungkin saja akan menjadi permasalahan. Pada UU Desa, dijelaskan masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 3 periode, boleh berturut-turut atau tidak. Masa jabatan yang tergolong lama ini, ditakutkan akan lahir “raja-raja kecil” di desa. Terlebih lagi, dengan kewenangan yang diberikan pada setiap kepala desa cukup bebas dan keuntungan-keuntungan menjadi kepala desa yang dapat menggiurkan bagi setiap orang, memungkinkan seseorang dengan segala cara agar dapat menduduki jabatan sebagai kepala desa. Untuk itu, masyarakat desa harus jeli memilih kepala desa yang memang berkompeten dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di desanya. Dengan menggunakan pemilihan secara langsung, masyarakat desa diharapkan mampu menepatkan orang-orang terbaik di desanya pada setiap posisi di perangkat desanya, terlebih pada posisi kepala desa. Tingkatan kepedulian masyarakat desa dalam berdemokrasi, secara tidak

langsung, juga akan berpengaruh dalam pembangunan-pembangunan di wilayahnya. Penempatan orang baik dan memang mampu mengatasi permasalahan desa pada tingkat kepala desa, pastilah akan berdampak positif dalam perubahan-perubahan yang terjadi ke depannya. Sebaliknya, jika salah memilih, bukan malah mengatasi permasalahan tetapi akan menimbulkan permasalahan baru yang mungkin lebih besar lagi.

Di saat masyarakat Indonesia masih memegang teguh tradisi kearifan lokalnya, justru pemerintah bangsa Indonesia seolah mengabaikan keberadaan mereka dan menjadikan materi sebagai anak emas. Sekarang, saat bangsa Indonesia vis a vis (tidak saling memihak) dengan globalisasi, yang membawa dampak terhadap pergeseran paradigma dan tradisi masyarakat, justru pemerintah bangsa Indonesia menggantungkan harapannya terhadap masyarakat. Jika memang demikian keadaannya, bangsa Indonesia dihadapkan dengan tiga masalah serius. *Pertama*, bangsa Indonesia dihadapkan dengan masalah tentang bagaimana melanjutkan proses pembangunan nasionalnya dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian penting di dalamnya, yang juga berarti bahwa bangsa Indonesia harus melakukan pembangunan terhadap masyarakatnya terlebih dahulu.

Kedua, karena masyarakat terdiri dari kumpulan individu-individu yang memiliki keberagaman dalam banyak hal, maka bangsa Indonesia juga harus mampu membangun kesadaran setiap warga negaranya dalam rangka memperkuat masyarakat. *Ketiga*, bangsa Indonesia harus mampu mencari dan menemukan format yang tepat sebagai modal utama bagi keberlangsungan kepentingan pembangunan nasional kedepan.

Kejayaan seseorang terletak kepada etikanya yang baik. Etika yang baik selalu membuat seseorang menjadi aman, tenang dan tidak adanya perbuatan yang tercela. Seseorang yang beretika mulia selalu melakukan kewajiban-kewajibannya. Dia melakukan kewajiban terhadap dirinya sendiri yang menjadi hak dirinya, terhadap Tuhan yang menjadi hak Tuhannya, terhadap makhluk lain

dan terhadap sesama manusia.¹¹

Sebagai agama yang berdasarkan tauhid, Islam menekankan penyatuan semua aspek dan dimensi kehidupan manusia dalam kesatuan penciptaan ilmu pengetahuan dan peradaban. Prinsip tauhid dalam ajaran Islam menekankan hubungan erat antara agama dengan negara, yaitu tidak ada pemisah antara agama dengan negara (*al-din wa al-dawlah*). Berdasarkan prinsip tauhid, ajaran-ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan, antaranya sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian maupun politik.

Konsep pembangunan dalam Islam yaitu keupayaan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat keseluruhannya di dunia maupun di akhirat dalam proses harmonis dan dinamis. Pembangunan harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhannya dari segi lahir dan batin, sehingga tercapai kehidupan yang berkualitas.¹²

Kehidupan berkualitas sudah menjadi realitas cita-cita sosial, namun kehidupan berkualitas tidak akan turun dari langit begitu saja. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas menjadi milik bersama dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, mutlak harus diusahakan secara baik, serius dan dilandasi oleh komitmen kebersamaan. Upaya demikian lazim dikenal dengan pembangunan.

Al-Quran menyebut manusia berulang kali diangkat derajatnya karena aktualisasi jiwanya secara posesif. Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu pada prinsipnya condong kepada kebenaran (*hanief*) sebagai fitrah dasar manusia. Allah menciptakan manusia dengan potensi kecenderungan, yaitu cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada keindahan,, cenderung kepada kemuliaan, dan cenderung kepada kesucian. Firman Allah QS Ar-Ruum ayat 30, sebagai berikut:



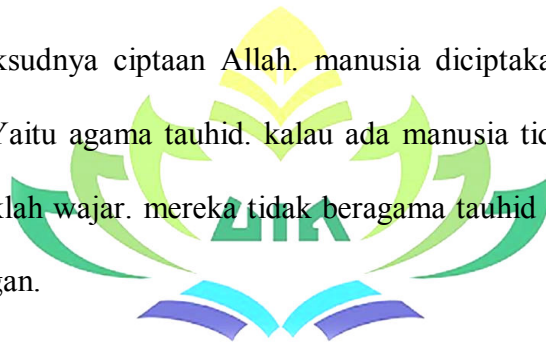
¹¹ M. Yatim Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.2.

¹² *Ibid.*



Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. 30:30)

Fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama Yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan.



Manusia juga diciptakan sebagai makhluk berpribadi yang memiliki tiga unsur padanya, yaitu unsur perasaan, unsur akal (intelektual), dan unsur jasmani. Ketiga unsur ini berjalan secara seimbang dan saling terkait antara unsur dengan unsur yang lain. Hal inilah indicator hidup manusia dilandasi oleh tiga unsur tersebut. Jadi, unsur yang terdapat dalam diri pribadi manusia yaitu rasa, akal dan badan harus berjalan seimbang, apabila tidak maka manusia akan berjalan pincang. Sebagai contoh: apabila manusia hanya menitik beratkan pada fungsi akal saja, akan terjerumus dan tenggelam dalam kehidupan yang rasionalistis, yaitu hanya hal-hal yang dapat diterima oleh akal itulah yang dapat diterima kebenarannya. Hal-hal yang tidak dapat diterima oleh akal merupakan hal yang tidak benar. Sedangkan pengalaman-pengalaman kejiwaan yang irasional hanya dapat dinilai sebagai hasil ilusi semata-mata. Maka al-quran memberikan petunjuk kepada manusia, yaitu mengajarkan agar adanya keseimbangan antara unsur-unsur

tersebut, yaitu unsur perasaan terpenuhi kebutuhannya, unsur akal dan demikian juga unsur jasmani terpenuhi kebutuhannya.¹³

Berbicara tentang fungsi manusia menurut al-quran, apabila memperhatikan surat Al-Mukminun ayat 115 yang dikemukakan, bahwa *“manusia adalah makhluk fungsional dan bertanggung jawab”*. Artinya manusia berfungsi terhadap diri pribadinya, terhadap masyarakat, terhadap lingkungan dan berfungsi terhadap Allah Sang Pencipta. Fungsi manusia antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Manusia Terhadap Diri Pribadi

Fungsi manusia terhadap diri pribadi yaitu memenuhi kebutuhan unsur-unsur secara menyeluruh agar kebutuhan pribadi tetap terjaga. Unsur jasmani yang memerlukan makan-minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan lainnya dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Akal yang merupakan salah satu segi unsur rohani kita bertabiat suka berfikir. Tabiat suka berfikir akan dipenuhi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang berguna bagi hidup manusia. Rasa yang juga merupakan salah satu segi unsur rohani yang selalu merindukan keindahan, kebenaran, keadilan¹⁴

2. Fungsi Manusia Terhadap Masyarakat

Fungsi manusia terhadap masyarakat ditegaskan atas dasar rasa yang tertanam dalam bahwa umat manusia merupakan keluarga besar, berasal satu keturunan Adan dan Hawa, dan dijadikan Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar merka saling interaksi untuk saling mengenal, tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan bertaqwa. Antara sesama manusia tidak dapat perbedaan tinggi rendah martabat kemanusiaannya. Perbedaan martabat manusia hanyalah terletak pada aktivitas amal perbuatannya dan rasa ketaqwaan kepada Allah. Firman Allah QS. Al-Hujarat:13, Allah mengajarkan manusia sebagai berikut, yang artinya: *“Hai manusia, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan telah kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia diantara kamu di*

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan UII, 1984), h. 8.

¹⁴ *Ibid*, h.4.

hadirat Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat ini dapat diketahui bahwa manusia adalah makhluk individual, makhluk religius dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individual manusia mempunyai dorongan untuk kepentingan pribadi, sebagai makhluk religi manusia mempunyai dorongan untuk mengadakan hubungan dengan kekuatan di luarnya (Allah), adanya hubungan yang bersifat vertikal, dan sebagai makhluk sosial manusia mempunyai dorongan untuk berhubungan dengan manusia yang lainnya. Maka kemudian terbentuklah kelompok-kelompok masyarakat.¹⁵

3. Fungsi Manusia Terhadap Alam dan Lingkungan

Fungsi manusia terhadap alam adalah bagaimana manusia memanfaatkan potensi alam untuk mencukupkan kebutuhan hidup manusia. Manusia berkewajiban mengolah dan menjaga potensi alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia merupakan tuntutan fungsi manusia terhadap alam. Oleh karena, dalam mengolah potensi alam yang diberikan Allah kepada manusia merupakan *fardhu kifayah*, karena tidak semua manusia mempunyai kemampuan untuk menggali potensi alam yang diberikan tersebut. Untuk itu, apabila manusia menyalahgunakan potensi alam artinya tidak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berarti mengabaikan fungsi manusia terhadap alamnya.

4. Fungsi Manusia Terhadap Allah

Fungsi manusia terhadap Allah ditegaskan dalam al-quran surat Adz-Dzariyat ayat 56, sebagai berikut yang artinya:

“Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar merka beribadah kepada-Ku”.

Dengan demikian beribadah kepada Allah yang menjadi fungsi manusia terhadap Allah baik dalam bentuk umum maupun bentuk khusus. Ibadah dalam bentuk umum ialah melaksanakan hidup sesuai ketentuan-ketentuan

¹⁵ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), h. 41.

Allah, sebagaimana dianjurkan al-quran dan Sunnah Rasul. Sedangkan ibadah dalam bentuk khusus (*mahdhah*) yaitu berbagai macam pengabdian kepada Allah yang cara melakukannya sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam bidang aqidah, fungsi manusia terhadap Allah adalah meyakini bahwa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. bertuhan kepada selain Allah berarti suatu penyimpangan dari fungsi manusia terhadap Allah. Bertuhan kepada Allah adalah sesuai sifat dasar manusia yaitu religius, tetapi sifat *hanief* yang ada pada manusia membuat manusia harus condong kepada kebenaran yaitu mentauhidkan Allah.¹⁶

Fokus utama pembangunan dalam Islam adalah pembangunan insaniah manusia itu sendiri. Pembangunan yang coba diketengahkan yang datangnya daripada kesadaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerjasama, mensejahterakan dalam lingkup iman kepada Allah swt, disertai dengan ketinggian moral dan akhlak.¹⁷

Konsep masyarakat Islam tidak seperti masyarakat yang dibentuk Barat. Elemen pembentuk masyarakat Islam itu lebih luas. Berbasis sila Pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan falsafah pancasila menjadi pedoman dasar dalam mengatur aspek-aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Masyarakat Islam adalah komunitas individu yang bertauhid. Ekonomi harus dikaitkan dengan teologi, politik, juga wajib ditautkan dengan etika Islam. Islam sebagai pandangan hidup, perundang-undangan dalam setiap aspek-aspek yang berhubungan dengan kehidupan, baik personal maupun sosial. Demikian, ditegaskan bahwa untuk membentuk masyarakat Islam yang baik, maka harus menjunjung tinggi Etika yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran bukanlah representasi dari sebuah dunia yang di luar organisme hidup. Kesadaran tidak lain adalah sebuah proses melahirkan terus-menerus sebuah dunia melalui proses kehidupan. Interaksi sistem kehidupan dengan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 124.

lingkungannya adalah interaksi kesadaran, demikian pula kehidupan itu sendiri adalah proses kesadaran, proses mental.¹⁸

Berbicara tentang bagaimana perbuatan baik dan buruk maka tidak terlepas dari pembahasan apa itu etika, seperti dijelaskan oleh Abuddin Nata dalam bukunya akhlak tasawuf, *“etika adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat dan perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik dan buruk.”*¹⁹

Menurut Burhanuddin Salam, etika mempunyai pengertian sama dengan kesusilaan, memuat ajaran tentang baik buruknya perbuatan. Jadi perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan yang baik atau perbuatan buruk, penilaian ini menyangkut perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.²⁰

Berbicara etika, sering kali disamakan dengan moral, susila, dan akhlak yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia dari sudut tingkah laku yang baik dan buruk, kesemua istilah sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik, teratur, aman, damai dan tentram sehingga sejahtera batiniah dan lahiriyah. Hanya saja ada perbedaan diantaranya terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika dalam etika penilaian baik dan buruk berdasarkan pada akal pikiran dan pada moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat, maka akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik dan buruk adalah Al-quran dan al-hadis.²¹ Selain itu juga perbedaaan antara etika, moral dan susila terletak pada kawasan pembahasannya, jika etika lebih banyak bersifat teoritis maka moral dan susila lebih banyak bersifat praktis.

Relevan dengan pandangan diatas, Muhammad Said juga mengungkapkan perbedaan etika dan moral, jika moral atau moralitas dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sedangkan etika

¹⁸ A. Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama Fritjof Capra*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), h. 117.

¹⁹ Abuddin Nata, *Op. Cit.* h. 92

²⁰ Burhanuddin, Salam, *Op. Cit.* h. 2

²¹ Abuddin Nata, *Op. Cit.* h, 97.

dipergunakan sebagai kerangka pemikiran untuk mengkaji sistem-sistem atau nilai atau kode.²² Jadi muatan bobot etika lebih banyak pada sifat teori sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis.²³

Sejalan dengan pandangan diatas, Burhanuddin Salam dalam bukunya *Etika Individual* yang telah menukil dari W.J.S Poerwadarminto mengemukakan bahwa moral adalah ajaran tentang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan, sedangkan etika adalah ilmu pengetahuan asas-asas akhlak (moral)²⁴.

Moralitas menurut Poespoprodjo adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruknya perbuatan manusia.²⁵

Hal yang mendasar yang tidak dapat terlepas dari pembicaran tentang pembenaran moral adalah persoalan yang berkenaan dengan pertanyaan bagaimana seseorang dapat hidup dengan cara yang baik setiap saat. Manusia terlahir dalam keadaan baik sehingga menjadi tugasnya untuk selalu mempertahankan kebaikan tersebut senantiasa ada dalam sebutan dirinya. Tanggung jawab dari eksistensinya di dunia ini adalah memfungsikan dirinya sedemikian rupa agar meraih nilai-nilai moral menjadi miliknya yang sejati, sehingga ia pantas disebut sebagai manusia.

Standar moral manusia banyak ditentukan oleh tingkat perkembangan sosialnya, intelegensinya, dan ilmu pengetahuan yang berkembang. Moralitas tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia sebagai pembuka bagi kehidupan yang lebih maju kearah kehidupan yang membahagiakan dan penuh makna.²⁶

²² Muhammad, Said, *Etika Masyarakat Indonesia*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1980), h. 23-24.

²³ Hamah, Ya'kub, *Etika Islam :Pembinaan Akhlakul Karimah*, (Bandung: Diponegoro, 1996), h. 14.

²⁴ Burhanuddin Salam. *Op. cit*, h. 2.

²⁵ Poespoprodjo, *Filsafat Moral "Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek"*, (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), h.118.

²⁶ Undang Ahmad Kamaluddin, *Filsafat Manusia "Sebuah Perbandingan Antara Islam Dan Barat"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 220.

Dari beberapa pemaparan tentang etika diatas, dapat dipahami bahwa etika adalah suatu kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu manusia dapat berkata perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk, dengan demikian maka etika itu mencangkup tentang benar dan salah perbuatan dari setiap manusia dalam arti bahwa benar dan salah memainkan peranan dalam hidup manusia. Etika juga merupakan fenomena manusiawi yang universal dan etika hanya terdapat pada manusia tidak pada makhluk lain.

Berbicara masalah etika, di Indonesia sendiri pembahasan mengenai etika sudah banyak diperbincangkan, kegelisahan-kegelisahan sudah mulai tampak dari berbagai kalangan, terutama pada masyarakat yang memegang jabatan penting sekarang ini sebagian etika anggotanya sudah rusak, atau mulai merosot, dimana kepentingan umum tidak lagi dinomor satukan, akan tetapi kepentingan dan keuntungan pribadilah yang menonjol pada banyak orang.

Kejujuran, kebenaran, keadilan dan keberanian telah tertutup oleh penyelewengan-penyelewengan baik yang terlihat ringan maupun berat, banyak terjadi adu domba, hasad dan fitnah, menjilat, menipu, berdusta, mengambil hak orang sesuka hati, disamping perbuatan-perbuatan maksiat lainnya . Yang dihindangi oleh kemorotan etika itu bukan hanya orang dewasa, akan tetapi telah menjalar sampai kepada tunas-tunas muda yang kita harapkan untuk melanjutkan perjuangan membela nama baik bangsa dan negara kita.

Kerusakan etika saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan, dan itu terjadi pada semua level masyarakat. Anak-anak remaja hingga orang dewasa sudah banyak yang terjangkit penyakit ini. Para pejabat sudah tidak mempunyai rasa malu meminta dan mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan etika adalah sebagai berikut :²⁷

1. Kurangnya pembinaan mental,
2. Kurangnya pengenalan terhadap nilai pancasila,
3. Kegoncangan suasana dalam masyarakat,
4. Kurang jelasnya hari depan dimata anak muda,
5. Pengaruh budaya asing.

Menyikapi fenomena tersebut, penulis berharap di Indonesia sangatlah mendesak untuk dilakukannya gerakan restorasi di segala bidang. Pasalnya, bangsa ini telah mengalami gejala kemerosotan etika yang ditandai krisis kepemimpinan dan instabilitas kepentingan pribadi yang mengatasnamakan kepentingan umum.

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa dalam penelitian ini penulis mengangkat pembangunan berkelanjutan dan implementasi undang-undang desa sebagai objek material serta etika Islam sebagai objek formalnya. Dengan maksud peneliti ingin mengungkap karakteristik serta implikasi pembangunan berkelanjutan dan implementasi undang-undang desa dan meletakkan etika Islam sebagai pisau analisisnya

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa pembahasan dan penelitiannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-undang desa tidak hanya mengamanatkan pengaturan tentang keuangan desa, tetapi juga meliputi pengakuan terhadap kewenangan desa, kerjasama antar desa, penguatan lembaga pemasyarakatan desa,

²⁷ Zakiah Darajat, *Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 48.

penetapan dan pemberdayaan desa adat, partisipasi masyarakat desa dan sebagainya. Disisi lain demokratisasi desa juga masih terkendala oleh lemahnya tingkat partisipasi yang substantif dan konstruktif dari masyarakat desa. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Selanjutnya, apakah desa akan menjadi desa yang maju dan rakyatnya sejahtera dimasa mendatang, ditentukan oleh sejauh mana etika para pengelola keuangan desa.

- b. Pembangunan desa sebagai sistem yang dikonstruksi Undang-undang Desa, menempatkan masyarakat pada posisi strategis, sebagai subjek pembangunan, ironisnya ditingkat pemerintahan desa terjadi pragmatisme yang mengarah pada hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. Disatu sisi dana desa menjadi berkah bagi desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun disisi lain belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat. Akibat itu semua, dana desa terkesan menimbulkan ketergantungan baru karena belum digunakan secara optimal.
- c. Kejujuran, tidak mengambil segala sesuatu yang bukan haknya, mendahulukan kepentingan masyarakat adalah implementasi dari etika Islam, saat etika Islam digunakan dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan desa maka etika kehidupan berbangsa pun dapat berlangsung dengan baik. Maka tak heran, dewasa ini terlalu banyak aparat penyelenggara pemerintahan negara/desa yang harus dipensiunkan dini.
- d. Masalah etika adalah salah satu masalah yang banyak dibicarakan dewasa ini, terutama etika yang menyangkut tentang hidup di lingkungan masyarakat, banyak dari mereka yang mengadopsi budaya barat sedangkan budaya lokal juga telah lama menjajakkan dan menjelaskan tentang bagaimana manusia beretika tersebut, dan yang jadi masalahnya

longgarnya pegangan terhadap agama, yang mengakibatkan maraknya budaya materialistis, hedonis dan skularistis.

- e. Krisis etika juga disebabkan banyaknya pengaruh budaya-budaya barat, dan mulai dilupakannya kearifan-kearifan lokal yang ada.
- f. Pengaruh modernisasi yang cukup pesat menjadikan manusia lebih menginginkan hidup serba instan tanpa lagi mempertimbangkan baik atau tidaknya perbuatan tersebut.

2. Batasan Masalah

Setelah teridentifikasinya masalah pada penelitian ini, patutlah dibatasi permasalahannya agar fokus kajiannya dapat ditelusuri, diantara batasan-batasan masalah tersebut, yaitu:

- a. Pembangunan berkelanjutan dipahami sebagai mentransformasi format sosial atas dasar kerja bersama untuk menatap masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan memiliki daya saing di era global, maka penting juga untuk mengetahui makna atau hakikat dari adanya sebuah pembangunan tersebut, dan juga bagaimana proses pelaksanaan yang seutuhnya, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan dalam etika Islam.
- b. Etika sebagai perilaku sosial merupakan salah satu masalah yang penting dalam setiap lini kehidupan, dan banyak bidang baik ilmu pengetahuan ataupun kebudayaan yang juga membahas masalah tersebut, maka penelitian ini menggali dan menjelaskan nilai-nilai etika pada wilayah tertentu yaitu pembangunan berkelanjutan implementasi undang-undang desa dalam kaitanya pada bidang etika Islam.
- c. Akhirnya peneliti membatasi pembahasan yang dijadikan penelitian: Pembangunan Berkelanjutan Implementasi Undang-undang Desa, yang dalam hal ini membahas pembangunan berkelanjutan.

3. Rumusan Masalah

Masalah penelitian pada hakikatnya merupakan perbedaan antara teori dengan praktik dan rincian lebih lanjut dari judul penelitian. Meskipun penelitian

filsafat bersifat deskriptif kualitatif, namun sebagai suatu penelitian harus mengimplikasikan adanya masalah yang belum terungkap, meskipun pengertian masalah penelitian tersebut bukan hanya pada hubungan antar variabel. Dalam suatu masalah penelitian termasuk penelitian kualitatif filsafat, terkadang unsur-unsur serta hubungan antar unsur yang harus dijawab melalui penelitian.

Beranjak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembangunan berkelanjutan mengimplementasikan Undang-undang Desa di Kecamatan Tegineneng?
2. Bagaimana implementasi Undang-undang Desa dalam pembangunan berkelanjutan?

C. Peneliti Dahulu Yang Relevan

Sejauh pengetahuan peneliti belum ada judul penelitian yang sama dengan penelitian ini, namun penelitian tentang pembangunan berkelanjutan dan pembahasan yang mengarah pada kajian penelitian ini sudah banyak dikaji, beberapa penelitian tersebut antara lain:

1. Budi Winarno, dalam bukunya *“Etika Pembangunan”* dalam buku ini berisikan pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan yang tidak lepas dari etika pembangunan itu sendiri yang pembangunan tidak lagi hanya diukur sebatas pada pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, tetapi juga setiap kebijakan dipersoalkan.
2. Yatimin Abdullah dalam bukunya *“Pengantar Studi Etika”* membahas tentang etika dalam kehidupan manusia sebagai nilai-nilai pegangan hidup, namun tidak menyentuh hakekat nilai-nilai. Karena etika yang selama ini diajarkan belum menjamin seseorang menjadi baik karena mereka tidak mengajarkan nilai-nilai etikanya secara utuh.
3. Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa: PP RI Nomor 22 tahun 2015, PMK RI Nomor 93 tahun 2015, PP RI nomor 45 tahun 2015, SKB 3 menteri Tahun 2015, fokus kajian penelitian ini adalah

kurangnya pedoman umum penyelenggaraan pemerintah desa. Karya A. Saibani.

4. Buku Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, strategi, dan peluang karya Muderajad Koncoro, (Erlangga, Jakarta, 2004) fokus kajian yaitu pada permasalahan perencanaan daerah di era otonomi, strategi pembangunan daerah, dan peluang pembangunan bisnis daerah.
5. Marwan Jafar dalam bukunya *Kebangkitan Desa* dalam buku ini berisikan pembahasan mengenai kebangkitan desa, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan objek material dan formal penelitian ini, maka tujuan penelitian ini antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan dan mengungkapkan secara objektif dan mendalam tentang pembangunan dalam mengimplementasikan Undang-undang Desa, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dalam memaknai etika Islam.
2. Untuk menjelaskan konsep etika Islam, yakni etika Islam dan eksistensinya sehingga tercapailah tujuan yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Tegineneng.

E. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Agar dapat tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu tentang etika Islam.

b. Secara Praktis

1. Bagi Penulis: menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khusus yang berhubungan dengan konsep etika Islam dan eksistensinya sehingga tercapailah tujuan yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Tegineneng.
2. Bagi Aperatur Desa: dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang akan diambil sebagai pedoman program alokasi dana desa.
3. Bagi Perguruan Tinggi: dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang kesejahteraan masyarakat.

F. Kerangka Teori

Pembangunan hanya dapat mempertahankan mutu manusiawinya apabila dilandasi oleh sikap hormat terhadap manusia, bukan hanya manusia terhadap abstraksi, sebagai suatu paham filosofis, melainkan terhadap segenap manusia konkret yang hidup dalam wilayah yang terkena pembangunan itu. Hormat terhadap manusia berarti mengakui kedudukannya yang sama, tidak melakukannya sebagai obyek perencanaan, berorientasi pada harapan-harapannya, tidak pernah mengorbankan pihak yang satu demi keuntungan pihak yang lain, tidak membela kemajuan dengan menyengsarakan yang lain.

Diterbitkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat ini karena pemerintah desa diyakini lebih mampu prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang kebutuhan permasalahan yang lebih luas dan rumit. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menyikapi perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, konsep pembangunan yang direncanakan secara sengaja patut dicermati, dengan tujuan

mentransformasi format sosial atas dasar kerja bersama untuk menatap masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan memiliki daya saing di era global.

Berbicara masalah moral/ moralitas memang tidak akan ada habisnya, baik itu dalam kajian-kajian keilmiah maupun pada sosial, budaya kemasyarakatan. Moral sering diartikan dengan perbuatan yang baik dan buruk, benar atau salah. Menurut Burhanuddin Salam dalam bukunya *Etika Individual “Pola Dasar Filsafat Moral”* mengemukakan bahwa Moral berasal dari bahasa latin *mores*. *Mores* berasal dari kata *mos* yang berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan.²⁸ Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik-buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.²⁹

Kemudian Abuddin Nata menjelaskan lagi bahwa pengertian etika menyangkut 3 hal, diantaranya:³⁰

1. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk
2. Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah
3. Ajaran atau gambaran tingkah laku yang baik.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa etika adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan-batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah.

Burhanuddin Salam menjelaskan lagi dalam bukunya yang lain yang berjudul *Etika Sosial “Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia* bahwa pengertian dari moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Sistem nilai terkandung dalam ajaran berbentuk petuah-petuah, nasihat, wejangan, peraturan, perintah dan sebagainya yang diwariskan secara

²⁸ Burhanuddin Salam, *Etika Individual (Pola Dasar Filsafat Moral)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), h. 2.

²⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Cet. XII, h. 654.

³⁰ Abuddin Nata, *Op. Cit.* h. 93.

turun-temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik agar ia benar-benar menjadi manusia yang baik.³¹

Etika adalah tradisi kepercayaan, dalam agama atau kebudayaan, tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Etika memberi manusia aturan atau petunjuk konkret tentang bagaimana ia harus hidup, bagaimana ia harus bertindak dalam hidup ini sebagai manusia yang baik, dan bagaimana menghindari perilaku-prilaku yang tidak baik.

Moralitas tidak bisa terlepas dari istilah etika, pada dasarnya kedua istilah itu sama-sama membahas tentang perbuatan baik dan buruk, hanya saja ada sedikit perbedaan diantara istilah-istilah tersebut, etika lebih pada tataran teoritis, sedangkan moral lebih pada tataran praktis. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Faisal Ismail, bahwa moral atau moralitas dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu perbuatan sedang dilakukan seseorang, dan etika dipergunakan sebagai kerangka pemikiran untuk mengkaji sistem-sistem nilai atau kode.³²

Dari beberapa pengertian tentang moral diatas, peneliti lebih cenderung pada pendapat dari Burhanuddin Salam dalam bukunya yang berjudul Etika Sosial “Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia bahwa pengertian dari moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Sistem nilai terkandung dalam ajaran berbentuk petuah-petuah, nasihat, wejangan, peraturan, perintah dan semacamnya yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik agar ia benar-benar menjadi manusia yang baik. Modernitas merupakan rintisan gaya hidup yang serba rasionalis, empiris, materialistis dan hedonis dalam kubangan doktrin humanisme. konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah manusia adalah pengendali utama realitas kehidupan. Akibat cara pandang yang demikian, dunia kini telah dilanda tragedi dan krisis, salah satunya krisis etika.

³¹ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial “Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia”*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 3.

³² Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam”Pergumulan Kultur Dan Struktur”*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Keagamaan, 2002), h. 252.

Gagasan tersebut diharapkan mampu mendeskripsikan dan mengungkapkan secara objektif dan mendalam tentang pembangunan dalam mengimplementasikan Undang-undang Desa, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dalam memaknai etika Islam.

Maka dari itu perlu dibangun konsep spiritualitas dimana pemahaman tentang manusia tidak saja dipahami dari sisi hukum positivistik semata, melainkan juga dari sudut pandang transendental spiritualistik yakni etika Islam dan eksistensinya sehingga tercapailah tujuan yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Tegineneng.

G. Metodologi Penelitian

Model dalam penelitian ini termasuk model penelitian mengenai masalah aktual, dan bersifat lapangan (*field research*), maka bahan-bahan atau sumber data yang digunakan adalah data-data yang ada dilapangan. Yaitu data yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan perspektif etika Islam. Maka pada tahap pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

a. Metode Wawancara

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian wawancara berstruktur dan tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur artinya responden mendapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan dan perasaanya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Akan tetapi kemudian setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan ia dapat mengadakan wawancara yang lebih berstruktur walaupun informasi emic yang diterimanya dijadikan bahan untuk merumuskan sejumlah pertanyaan yang lebih berstruktur.

b. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan yang menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Peneliti menggunakan observasi partisipan yaitu dimana penulis ikut langsung mencatat dan mengamati segala bentuk kegiatan dan kejadian yang ada untuk disajikan dalam pengumpulan data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting yang berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiah yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki .

2. Populasi Dan Informan

a. Populasi

Populasi menurut Winarno Surakhmat adalah keseluruhan individu yang akan diteliti. Karena tidak mungkin penelitian selalu langsung meneliti segenap populasi dengan tujuan, penelitian menemukan generalisasi secara umum, maka perlu adanya sejumlah sampel yang representatif yaitu yang mewakili keseluruhan populasi tersebut. Adapun yang menjadi populasi adalah masyarakat kecamatan Tegineneng.

Hal ini yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Tegineneng, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama. Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran terdiri dari 16 (enam belas) desa yaitu: Trimulyo, Gerning, Kresno Widodo, Gedung Gumanti, Kota Agung, Bumi Agung, Kejadian, Batang Hari Ogan, Negara Ratu Wates, Gunung Sugih Baru, Sinar Jati, Margorejo, Margo Mulyo, Panca Bakti, Rejo Agung, Sriwedari, tetapi tidak seluruh populasi ini akan dijadikan sampel, melainkan

hanya beberapa saja yang hendak dijadikan sampel dari seluruh populasi yang dianggap dapat mewakili.



b. Informan

Untuk melaksanakan sampel dalam penelitian diperlukan teknik informan, yaitu cara yang digunakan untuk menentukan jumlah informan yang benar-benar dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah masyarakat kecamatan Tegineneng, untuk meneliti seluruh populasi, tentu akan banyak mengalami kesulitan dan tidak efektif jika dilihat dari segi waktu yang ada.

Untuk menentukan orang-orang yang akan dijadikan informan digunakan, menurut Kartini Kartono yaitu berdasarkan tujuan. Informan bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas srata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Dalam teknik ini siapa yang akan diambil sebagai informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang menurut dia sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti, jadi pengumpulan data yang telah diberi penjelasan oleh peneliti akan mengambil siapa saja yang menurut pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Teknik ini dilakukan dengan jalan penelitian memilih orang-orang atau kelompok yang dijadikan informan dengan dasar pertimbangan orang tersebut mempunyai hubungan erat dengan kegiatan pembangunan berkelanjutan. Dengan pertimbangan jumlah penduduk sebanyak 10.000 jiwa yang terdiri dari 65 % perempuan dan 35% laki-laki, adapun orang-orang yang dijadikan informan yaitu: 18 tokoh adat, 3 tokoh masyarakat, 3 tokoh agama dan 16 orang aparatur desa, 4 orang aparatur kecamatan dengan jumlah total 44 orang. berikut rinciannya:

1. Tokoh adat yang terdiri dari 6 desa, dan berikut nama-nama tokoh adat yang akan penliti jadikan informan:
 - a. Tokoh adat desa Kejadian ada 3 orang yaitu Jala Reza, Bambang Widiatmo, Hermanto;

- b. Tokoh adat desa Rejo Agung ada 3 orang yaitu Sukendar, Abdul Rohim, Ma'ruf Syafi;
 - c. Tokoh adat desa Negara Ratu Wates ada 3 orang yaitu Andhika Yuliandika, Januri, Aris Munandar;
 - d. Tokoh adat desa Batang Hari Ogan ada 3 orang yaitu Yurnalis, Raizalmli, Risman;
 - e. Tokoh adat desa Gunung Sugih Baru ada 3 orang yaitu Jusni Hanafi, Husen Burhan, Zulkifli;
 - f. Tokoh adat desa Trimulyo ada 3 orang yaitu Nyoto Prayitno, Sahri, Solikin.
2. Tokoh masyarakat terdiri dari 3 orang yaitu Syahrudin S. Pd (Camat Tegineneng), Haryoto A., S. IP (Sekertaris Kecamatan Tegineneng), Sugiyana, SE (Staf Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa).
3. Tokoh agama terdiri 3 orang yaitu Abdul Qodhir, Ahmad Daroini, dan Muhammad Sholehuddin.
4. Masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan implementasi Undang-undang Desa 20 orang yang terdiri dari 10 laki-laki dan 10 perempuan, dan berikut nama-namanya:
- 1) Jaya Sakti Desa Kejadian
 - 2) Solich Saadi Mardiyah Desa Kejadian
 - 3) Indra Gunawan Desa Batang Hari Ogan
 - 4) M. Kaliman Desa Batang Hari Ogan
 - 5) Sukarno Desa Rejo Agung
 - 6) Surono Desa Rejo Agung
 - 7) Johan Desa Gunung Sugih Baru
 - 8) M. Angga P. Desa Gunung Sugih Baru
 - 9) Dipwantono Desa Sinar Jati
 - 10) Ahmad Hamdani S. Desa Sinar Jati
 - 11) Silvia Anggraini Desa Sinar Jati
 - 12) Widia Fitriana Desa Sinar Jati
 - 13) Okta Permata Sari Desa Margo Mulyo
 - 14) F. Yunita Astuti Desa Margo Mulyo
 - 15) Hardina Desa Trimulyo
 - 16) Vinalis Budiarti Desa Trimulyo

- 17) Mela Ariani Desa Margo Rejo
- 18) Suyanti Desa Margo Rejo
- 19) Neli Susanti Desa Rejo Agung
- 20) Meli Putri Yuningsih Desa Rejo Agung

B. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan diidentifikasi, diklasifikasi, guna memperoleh hakikat fundamental untuk menemukan nilai-nilai yang ada pada pembangunan berkelanjutan yang di tinjau dari pandangan etika Islam.
2. Hasil dari identifikasi dan klasifikasi tersebut kemudian dianalisa secara komprehensif untuk dapat menemukan nilai-nilai yang menjadi hakikat etika Islam.

C. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan filsafat. Secara rinci dalam menganalisis data akan digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Deskripsi, yaitu menggambarkan atau menyajikan serta memahami hakikat pembangunan berkelanjutan dan hakikat nilai-nilai etika Islam yang terkandung di dalamnya.
2. Interpretasi, yaitu menafsirkan, membuat tafsiran tetapi yang tidak subjektif melainkan harus bertumpu pada evidensi objektif, untuk mencapai kebenaran otentik. Data yang telah dideskripsikan diberi penafsiran, sehingga memperoleh makna baru yang lebih tepat, dan dapat diungkap secara lebih baik dan mendasar tentang bagaimana mengungkap pembangunan berkelanjutan sebagai implementasi undang-undang desa perspektif etika Islam.

3. Abstraksi, yaitu untuk menangkap hakikat dengan cara memurnikan objek dari aspek-aspek yang bersifat khusus, sehingga hakikatnya menjadi sesuatu yang bersifat umum.
4. Holistika, yaitu tinjauan secara lebih dalam untuk mencapai kebenaran secara utuh. Objek dilihat dari interaksi dengan seluruh kenyataan.
5. Hermeneutik, yaitu sebagai suatu metode diartikan sebagai cara menafsirkan simbol kongkrit untuk dicari arti dan maknanya. Metode ini mengisyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak di alami kemudian dibawa ke masa sekarang. Tokoh adat yang terdiri dari 6 desa, dan berikut nama-nama tokoh adat yang akan peneliti jadikan informan:

- a. Tokoh adat desa Kejadian ada 3 orang yaitu Jala Reza, Bambang Widiatmo, Hermanto;
- b. Tokoh adat desa Rejo Agung ada 3 orang yaitu Sukendar, Abdul Rohim, Ma'ruf Syafi;
- c. Tokoh adat desa Negara Ratu Wates ada 3 orang yaitu Andhika Yuliandika, Januri, Aris Munandar;
- d. Tokoh adat desa Batang Hari Ogan ada 3 orang yaitu Yurnalis, Raizalmli, Risman;
- e. Tokoh adat desa Gunung Sugih Baru ada 3 orang yaitu Jusni Hanafi, Husen Burhan, Zulkifli;
- f. Tokoh adat desa Trimulyo ada 3 orang yaitu Nyoto Prayitno, Sahri, Solikin.
- g. Tokoh masyarakat terdiri dari 3 orang yaitu Syahrudin S. Pd (Camat Tegineneng), Haryoto A., S. IP (Sekertaris Kecamatan Tegineneng), Sugiyana, SE (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa).
- h. Tokoh agama terdiri 3 orang yaitu Abdul Qodhir, Ahmad Daroini, dan Muhammad Sholehuddin. Masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan implementasi Undang-undang Desa 20 orang yang terdiri dari 10 laki-laki dan 10 perempuan, dan berikut nama-namanya:

- 1) Jaya Sakti Desa Kejadian

- 2) Solich Saadi Mardiyani Desa Kejadian
- 3) Indra Gunawan Desa Batang Hari Ogan
- 4) M. Kaliman Desa Batang Hari Ogan
- 5) Sukarno Desa Rejo Agung
- 6) Surono Desa Rejo Agung
- 7) Johan Desa Gunung Sugih Baru
- 8) M. Angga P. Desa Gunung Sugih Baru
- 9) Dipwantono Desa Sinar Jati
- 10) Ahmad Hamdani S. Desa Sinar Jati
- 11) Silvia Anggraini Desa Sinar Jati
- 12) Widia Fitriana Desa Sinar Jati
- 13) Okta Permata Sari Desa Margo Mulyo
- 14) F. Yunita Astuti Desa Margo Mulyo
- 15) Hardina Desa Trimulyo
- 16) Vinalis Budiarti Desa Trimulyo
- 17) Mela Ariani Desa Margo Rejo
- 18) Suyanti Desa Margo Rejo
- 19) Neli Susanti Desa Rejo Agung
- 20) Meli Putri Yuningsih Desa Rejo Agung

D. Teknik Penyimpulan Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat, maka dalam penyimpulan penelitian ini, peneliti menggunakan pola penyimpulan lingkaran hermeneutik, yaitu suatu pola pemahaman dengan menggunakan metode induktif dan deduktif.

BAB II

HAKIKAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

E. Pengertian Dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan hanya dapat mempertahankan mutu manusiawinya apabila dilandasi oleh sikap hormat terhadap manusia, bukan hanya manusia terhadap abstraksi, sebagai suatu paham filosofis, melainkan terhadap segenap manusia konkret yang hidup dalam wilayah yang terkena pembangunan itu. Hormat terhadap manusia berarti mengakui kedudukannya yang sama, tidak melakukannya sebagai obyek perencanaan, berorientasi pada harapan-harapannya, tidak pernah mengorbankan pihak yang satu demi keuntungan pihak yang lain, tidak membela kemajuan dengan menyengsarakan yang lain.³³

Defenisi pembangunan berkelanjutan yang dibuat oleh komisi sedunia lingkungan hidup dan pembangunan (*world commission on environment and development = wced*) menyebutkan pembangunan berkelanjutan adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.³⁴

Selaras dengan pengertian diatas, Moeljarto Tjokrowinoto mengungkapkan pembangunan secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, *industrialization*, *economic growth*, *europanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan term *political change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang *multi interpretable*, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti. Makna dasar dari *development* adalah pembangunan, artinya serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.³⁵

³³ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Gramedia, 1986), h.18.

³⁴ Sudjoko, dkk., *Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), h.8.13.

³⁵ Moeljarto Tjokrowinoto, *Birokrasi dalam Polemik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004), h. 74.

Pembangunan dapat dilihat sebagai sebuah proses penyebaran kesejahteraan dari kehidupan sosial. Tujuan terdalam dari sebuah pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, kesempatan pendidikan dan layanan kesehatan. Sangat berbeda dengan pandangan-pandangan yang sempit terkait dengan konsep pembangunan, seperti mengidentifikasi pembangunan dengan mengukur tingkat pertumbuhan pendapatan kotor nasional/*Gross National Product* (GNP), atau dengan peningkatan standar hidup manusia, sesungguhnya pembangunan dapat dipahami sebagai sebuah kebebasan. Ide tentang pembangunan telah kehilangan signifikansinya disebabkan oleh ketiadaan dimensi etika atau moral. Secara praktis, etika menjadikan pembangunan lebih bermakna bagi kehidupan seluruh umat manusia dan lingkungan secara komprehensif.

Suatu pembangunan hanya dapat mempertahankan mutu manusiawinya apabila dilandasi oleh sikap hormat terhadap manusia, bukan hanya manusia terhadap abstraksi, sebagai suatu paham filosofis, melainkan terhadap segenap manusia konkret yang hidup dalam wilayah yang terkena pembangunan itu. Hormat terhadap manusia berarti mengakui kedudukannya yang sama, tidak melakukannya sebagai obyek perencanaan, berorientasi pada harapan-harapannya, tidak pernah mengorbankan pihak yang satu demi keuntungan pihak yang lain, tidak membela kemajuan dengan menyengsarakan yang lain.³⁶

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi sama halnya dengan perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang lain, daerah satu dengan daerah lainnya. Namun, secara umum ada satu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Berikut pengertian pembangunan menurut para ahli:³⁷

- Nugroho dan Rochim Danuri, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak

³⁶ Franz Magnis Suseno, *Op. Cit.* h.18.

³⁷ Badruddin. *Teori dan Indikator Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), h. 72.

secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

- Ginanjar Kartasasmita, pembangunan yaitu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
- Nurcholish Madjid, pembangunan adalah usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan tanpa meninggalkan aspek moralitas bangsa.
- Plato, berpendapat bahwa tidak ada guna pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang tanpa dilandasi oleh perannya etika.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangannya yaitu proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.

Gagasan mengenai pembangunan menjadi sangat urgen untuk dikumandangkan sebagai sebuah tantangan yang serius bagi negara-negara berkembang. Adapun semangat yang diusung dalam pembangunan tersebut adalah usaha untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat atau warga negara. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita pembangunan tersebut dibutuhkan kesadaran dan rencana serta pelaksanaan pembangunan yang terukur dan terlembaga. Tujuannya agar keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan yang lebih baik dimasa depan tetap terjaga.

Pembangunan sebagai suatu kebijakan publik semestinya harus dilihat sebagai sebuah proses politik. Ini berarti bahwa dalam membahas pembangunan, kita akan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan antar alain: siapa yang mendapatkan keuntungan dalam proses pembangunan, apa yang mereka dapatkan dari proses pembangunan, bagaimana mereka mendapatkannya, dan kapan.³⁸

³⁸ Budi Winarno, *Gagalnya Organisasi Desa dalam Pembangunan di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Kencana, 2008), h. ix.

Pembangunan pada hakikatnya adalah peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih enak dan lebih tenteram, serta lebih menjamin kelangsungan hidup kedepan. Dengan demikian usaha pembangunan mempunyai makna humanisasi, atau dengan kata lain usaha untuk memanusiakan manusia. Pembangunan dari dan untuk manusia seutuhnya, yang berarti manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan, serta berusaha untuk menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hidupnya, baik kehidupan material maupun spiritual.³⁹ Tidak dapat dipungkiri memang, dalam tataran empirik ternyata pembangunan tidak hanya memproduksi hal-hal positif, akan tetapi secara simultan juga menghasilkan hal-hal yang negatif bagi kehidupan manusia. Bahkan yang lebih mengesankan, lingkungan yang *notabene* merupakan domain dan sumber kehidupan bagi manusia juga menjadi korban akibat dari aktivitas pembangunan yang dilakukan.

Oleh karena itu, wacana dan praktek pembangunan berada dalam kondisi ketidak selarasan yang kritis. Gagasan tentang pembangunan dalam kecenderungan intervensionisnya dewasa ini semakin kehilangan reputasinya dalam dasawarsa terakhir. Dalam dunia akademis, gagasan pembangunan mengalami *demisifikasi* melalui perdebatan beberapa mazhab pemikiran. Di Indonesia, mungkin tidak ada faktor lain yang lebih kuat menyumbang kehancuran reputasi pembangunan daripada citra identik antara pembangunan otoritarianisme (orde Baaru). Citra itu terbentuk diam-diam dan gradual, lantaran satu-satunya *memory* kita tentang pembangunan adalah model pembangunan gaya Orde Baru.⁴⁰

Disamping itu, gagasan pembangunan dalam prakteknya telah menghasilkan bentuk-bentuk baru tanggung jawab politik dalam skala global. Selain itu, gagasan ini juga telah menghasilkan aplikasi pembangunan. Namun kini, setelah lebih dari 50 tahun berjalan, pembangunan telah kehilangan daya pikat dan vitalitasnya bagi

³⁹ Machnun Husein, *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), h. 1.

⁴⁰ B. Herry Priyono, "Mencari Badan Publik: Refleksi bagi Rehabilitasi Arti Pembangunan" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*", (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2004), h. 110.

banyak orang. Kita tengah menghadapi suatu krisis yang muncul dari serangkaian ketidakselarasan dalam pembangunan.⁴¹

Pembangunan yang semestinya mendatangkan keselarasan dan keseimbangan bagi kehidupan manusia, ternyata telah mengalami anomaly dan kondisi paradoks. Pembangunan justru menghasilkan ketidakadilan, kesenjangan dan ketidakselarasan. Hal ini terjadi karena proses pembangunan yang terjadi tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip etika.

Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakikatnya juga merupakan usaha yang mempunyai makna etik, baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Karena itu, bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik, akan tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan itu. Jika nilai-nilai etika tidak melekat dalam proses pembangunan, maka pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan *dehumanistik*, atau merusak kemanusiaan.⁴²

Secara denotatif kata pembangunan memiliki beberapa makna positif, antara lain: perubahan sosioekonomi, pertumbuhan, kemajuan, modernisasi. Namun istilah pembangunan juga sering dikonotasikan sebagai jargon dan semboyan yang digunakan untuk memajukan, memakmurkan dan menjawab semua tantangan kemiskinan serta keterbelakangan (*underdevelopment*) di negara-negara Dunia Ketiga (*developing countries*). Adapun yang dimaksud dengan pembangunan adalah peningkatan kondisi hidup secara efektif yang diukur dengan bertambahnya *income per kapita* dan progress teknologi. Uraian makna diatas mengindikasikan bahwa pembangunan memiliki esensi makna luhur dan terpuji. Akan tetapi, pada tataran praktis-empirik seringkali terjadi apa yang disebut dengan paradoks pembangunan. Dia justru menciptakan sesuatu yang buruk bagi kehidupan manusia (seperti: ketidakadilan sosial, kemiskinan,

⁴¹ Philip Quarles Ufford dan Ananta Kumar, *Kritik Moral Pembangunan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 14.

⁴² Machnun Husein, *Op. Cit*, h.1.

ketimpangan ekonomi), terutama bagi mereka yang mayoritas tinggal di negara berkembang.⁴³

Merujuk pada pendapat Azyumardi Azra, yang menyatakan bahwa pembangunan sebenarnya dapat dipahami sebagai sebuah proses meluasnya kebebasan hakiki yang dapat dinikmati oleh setiap individu dalam masyarakat. Pembangunan bukan hanya diukur dari bertambahnya GNP atau *income per capita* nasional, atau meningkatnya industrialisasi. Namun keberhasilan pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya bila diukur dengan parameter kebebasan. Adapun yang dimaksud dengan kebebasan disini, yaitu: apakah tujuan-tujuan pembangunan yang dilakukan benar-benar telah memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti: pangan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Apakah masyarakat ikut berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut atau dengan kata lain seberapa besar masyarakat dilibatkan oleh pemerintah dalam proses pembangunan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang ideal maka diperlukan "*ethical assessment*" dalam proses pembangunan. *Moral dimension of development* bisa menjadikan pembangunan lebih bermakna lagi bagi kehidupan manusia dan lingkungannya secara positif dan komprehensif. Karena secara substantif, prinsip-prinsip dasar etika akan selalu mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan keadilan, kebebasan, otonomi, otoritas dan demokrasi.⁴⁴ Harus diakui memang bahwa ketika etika hadir mendampingi pembangunan maka akan tercipta kondisi equilibrium yang lebih berpihak pada kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Masalah pembangunan memang sebuah persoalan yang dilematis, disatu sisi kita membutuhkan pembangunan untuk perubahan dan kemajuan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, namun di sisi lain ternyata pembangunan justru memproduksi kemiskinan, kesenjangan dan ketidakadilan sosial.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ David A. Crocker, *Ethic of Global Development: Agency, Capability and Deliberative Democracy*, (Cambridge University Press, 2008), h. 73.

Industrialisasi sebagai salah satu contoh pembangunan adalah persoalan yang dilematis. Menurut George J. Aditjondro industrialisasi merupakan berkah, tetapi tidak untuk semua lapisan masyarakat. Industrialisasi yang berlangsung di Indonesia hanya berpihak kepada kelas atas (*upper class*). Sementara kelas bawah (*lower class*) lebih diposisikan sebagai instrumen bagi berputarnya roda pembangunan dan industrialisasi tersebut. Selain itu, lingkungan dan alam dengan segala sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya terus dieksploitasi tanpa pernah berfikir secara cermat dan komprehensif tentang dampak yang dapat ditimbulkan dari aktivitas pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.⁴⁵

Pada hakikatnya gagasan pembangunan berkelanjutan secara historis dikembangkan untuk membendung gerakan antikapitalisme dan ideologi sosialisme di Dunia Ketiga pada era perang dingin yang semakin kuat.⁴⁶ Isu kebebasan (*freedom*) dalam pembangunan perlu mendapat atensi primer. Sebagai agen pembangunan setiap individu bebas untuk mencapai tujuan dan kepentingan pribadi meskipun terdapat berbagai hambatan sosial, politik dan ekonomi. Hambatan yang membuat tertundanya kepentingan seseorang tercapai. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka individu harus berkolaborasi dengan institusi publik dan individu lainnya. Dalam proses pembangunan individu bebas menentukan keputusannya sendiri, mewujudkan tujuannya melalui usahanya sendiri bahkan bebas melakukan perbedaan.⁴⁷

Proses pembangunan yang dilakukan juga harus memperhatikan isu HAM. Prinsip ini sesungguhnya sejalan dengan ajaran semua agama bahwa manusia harus saling menghargai dan menyayangi tanpa perbedaan ras, agama, suku, dan status sosial ekonomi. Semua manusia yang berakal sehat kiranya akan sepakat dengan prinsip bahwa kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin orang lain memperlakukan kita.⁴⁸ Dari pengertian ini, seyogyanya proses

⁴⁵ Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 289.

⁴⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 28.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Aleksius Jemadu, *Op. Cit.*, h. 289.

pembangunan yang dilakukan harus berpihak pada setiap individu, karena hasil positif dalam bentuk perubahan dan kemajuan yang dihasilkan dari pembangunan tersebut layak untuk dinikmati oleh setiap orang, dan bukan menjadikan beberapa orang atau kelompok sebagai objek dan korban dari pembangunan yang dijalankan.

Pembangunan diharapkan bisa menjadi *keeping hope alive*, sehingga jaminan terhadap hak-hak yang paling fundamental dalam kehidupan manusia seperti: keamanan, kesejahteraan ekonomi, stabilitas politik, kualitas pendidikan, perlindungan hukum, dan pelayanan kesehatan dapat tersedia dengan pasti.

Menurut Mohtar Mas'ood, ada tiga pendekatan yang bisa digunakan untuk memahami praktek pembangunan, antara lain: *pertama*, politik sebagai panglima. Pendekatan ini memprioritaskan pertimbangan politik dalam proses pembangunan dan menekankan peran negara yang diwakili oleh para birokratnya, sebagai aktor utama dalam pembangunan. Menurut pendekatan ini menyatakan bahwa pembangunan hanya mungkin berhasil kalau dijamin oleh negara yang kuat. Dengan demikian, esensi dari proses pembangunan adalah pembinaan kekuatan negara. *Kedua*, ekonomi sebagai panglima. Pendekatan ini mengutamakan peran pengusaha dan korporasi dalam pembangunan. Para aktor ini dalam memformulasi kebijakan ekonomi selalu berdasarkan pertimbangan pasar, yaitu mengikuti dinamika kekuatan persediaan dan permintaan. *Ketiga*, etika sebagai panglima. Pendekatan ini menegaskan bahwa cara paling efektif untuk menangani persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh rakyat adalah dengan membantu mereka menemukan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, otoritas pembuatan keputusan tentang pembangunan yang selama ini dimonopoli oleh pemerintah harus dikembalikan pada rakyat atau komunitas lokal. Pendekatan ini juga berpendapat bahwa mekanisme yang diandalkan adalah kekuatan rakyat. Demi menanggulangi krisis pembangunan saat ini, seperti masih meluasnya kemiskinan, memburuknya perusakan lingkungan dan meningkatnya tindak kekerasan,

pendekatan yang didasarkan pada ideologi populisme ini menganjurkan pengaktifan kembali lembaga-lembaga komunitas lokal.⁴⁹

Salah satu pendekatan di atas, menekankan pada peran negara dalam pembangunan. Peningkatan peran negara dalam pembangunan memiliki dimensi yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, peran negara tidak terlalu besar hanya terbatas pada fungsi regulator pembangunan, dan proses pembangunan lebih banyak dikendalikan oleh sektor privat yang berbasis pada kekuatan pasar. Sedangkan dinegara-negara berkembang, peran negara memiliki intervensi yang cukup kuat, hal ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:⁵⁰ *Pertama*, intervensi negara dibutuhkan karena sebagian besar warga negara masih hidup dibawah garis kemiskinan. *Kedua*, karena kinerja individu dalam mekanisme pasar tidak menjamin tingkat distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dinegara berkembang tidak merata, kesenjangan pendapatan antara golongan kaya dan golongan miskin sangat lebar. *Ketiga*, peran negara dan pasar dapat menjamin pertumbuhan ekonomi dengan mengkombinasikan antara peran negara dan pasar dalam pembangunan, seperti yang terjadi dinegara-negara Asia Timur (*developmental state*).

Etika atau moralitas sering menunjukkan alasan-alasan dan pembenaran etika dari tindakan tertentu. Maka etika pembangunan diartikan sebagai alasan-alasan moral dari upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu perwujudan masyarakat yang adil makmur material dan spiritual. Etika juga merupakan pedoman moral bagi suatu tindakan manusia dan menjadi sumber pemikiran baik-buruk tindakan itu.⁵¹

Di saat masyarakat Indonesia masih memegang teguh tradisi kearifan lokalnya, justru pemerintah bangsa Indonesia seolah mengabaikan keberadaan mereka dan menjadikan materi sebagai anak emas. Sekarang, saat bangsa Indonesia vis a vis (tidak saling memihak) dengan globalisasi, yang membawa

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Budi Winarno, *Pertarungan Negara Versus Pasar*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), h. 21.

⁵¹ Mubyarto, *Etika Pembangunan Ekonomi dalam Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1986), h.127.

dampak terhadap pergeseran paradigma dan tradisi masyarakat, justru pemerintah bangsa Indonesia menggantungkan harapannya terhadap masyarakat. Jika memang demikian keadaannya, bangsa Indonesia dihadapkan dengan tiga masalah serius. Pertama, bangsa Indonesia dihadapkan dengan masalah tentang bagaimana melanjutkan proses pembangunan nasionalnya dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian penting di dalamnya, yang juga berarti bahwa bangsa Indonesia harus melakukan pembangunan terhadap masyarakatnya terlebih dahulu.

Kedua, karena masyarakat terdiri dari kumpulan individu-individu yang memiliki keberagaman dalam banyak hal, maka bangsa Indonesia juga harus mampu membangun kesadaran setiap warga negaranya dalam rangka memperkuat masyarakat. Ketiga, bangsa Indonesia harus mampu mencari dan menemukan format yang tepat sebagai modal utama bagi keberlangsungan kepentingan pembangunan nasional kedepan.⁵²

Agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan hidup. Karena itulah maka pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup harus dipandang sebagai hal yang terkait erat satu sama lain sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan yang lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan penggeseran titik berat pembangunan konvensional (yang hanya memusatkan pada pembangunan ekonomi) ke arah yang mencakup pembangunan sosial budaya dan ekologi lingkungan atau dengan kata lain, yang ingin dicapai disini adalah sebuah integrasi pembangunan sosial budaya dan pembangunan lingkungan hidup ke dalam arus utama pembangunan nasional, agar kedua aspek tersebut mendapat perhatian yang sama berharga dengan aspek ekonomi. Pembangunan aspek sosial budaya dan lingkungan hidup tidak boleh dikorbankan demi dan atas nama pembangunan ekonomi.⁵³

⁵² Sudjoko, *Op. Cit*, h. 8.17.

⁵³ *Ibid*.

Untuk mewujudkan makna hakiki yang terkandung dalam wacana pembangunan, maka menghadirkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika dalam proses pembangunan adalah sebuah keniscayaan. Seperti slogan yang sudah panjang lebar dijelaskan di atas bahwa pembangunan tanpa etika adalah buta dan etika tanpa pembangunan adalah kosong. Maka dari itu interaksi antara etika dan pembangunan harus saling melengkapi agar tercipta kondisi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, secara tegas harus dikatakan bahwa peran etika dalam proses pembangunan sangatlah signifikan. Karena pembangunan yang berbasis nilai-nilai etika dapat menjamin keadilan, keselarasan, keseimbangan dalam kehidupan sosial skala global. Disamping dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang berbasis etika secara gradual dapat mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin dalam sebuah masyarakat, yang sama sekali tidak berorientasi pada kepuasan dan kesenangan pribadi atau kelompok. Serta yang paling penting adalah keberadaan etika dalam proses pembangunan mempunyai komitmen yang kuat pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan sebagaimana mestinya, demi kelangsungan hidup generasi-generasi penerus dimasa depan.

F. Implementasi Undang-Undang Desa

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah berkelanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul sejak beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798. Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi pelaksanaannya, diantaranya ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu; pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang yang diikuti pendekatan secara ideal. Pembangunan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan

yaitu; keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Kuatnya peran pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan menimbulkan beberapa akibat. Pertama, yang dilakukan gagal menangkap aspirasi, potensi, dan kebutuhan masyarakat di daerah. Hal ini terjadi karena kuatnya dominasi pemerintah pusat sehingga para pengambil keputusan gagal memahami aspirasi dan dinamika yang berkembang ketika daerah tingkat grass root. Pada akhirnya, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah gagal dalam menjawab persoalan-persoalan yang berada di tengah-tengah masyarakat karena daerahnya. Kedua, sentralisme pembangunan telah menciptakan ketergantungan daerah terhadap pusat. Hal ini ditunjukkan terutama dalam hal pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Setidaknya ada empat faktor yang membuat daerah sangat tergantung pada pusat menyangkut pembiayaan proyek-proyek pembangunan, yaitu: (1) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan; (2) tingginya tingkat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Dalam konteks ini, pemerintah pusat menguasai sumber-sumber pajak penting yang bersifat lucrative (pajak bidang usaha dan penghasilan orang, pajak pertambahan nilai, dan bea cukai); (3) akibat yang ditimbulkan dari faktor kedua adalah minimnya sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan; dan (4) faktor politis. Dalam hal ini ada kekhawatiran pusat jika daerah diberi kekuasaan yang besar dalam hal keuangan dan pendapatan akan muncul gerakan disintegrasi dan separatism.⁵⁴ Dalam sejarah, tuntutan seperti ini muncul justru ketika daerah tidak diberi otonomi yang memadai sehingga mereka merasa tidak diberi peran yang signifikan dalam mengelola pembangunan di daerahnya. Ketiga, banyak daerah yang potensial gagal berkembang karena sumber daya daerah yang penting sebagai penopang pembangunan daerah ditarik ke pusat, dan pemerintah daerah hanya mendapatkan sedikit saja dari hasil-hasil kekayaan daerahnya, akibatnya banyak daerah merasa tidak puas dengan kondisi ini sehingga muncul desakan ke arah pembentukan

⁵⁴ Mudrajat Kuncoro, *"Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan"*, (Jakarta: Prisma, 1995), h. 75.

daerah teritorial sendiri yang lepas dari pemerintahan RI. Irian Jaya dan DI Aceh dapat dijadikan contoh untuk menjelaskan hal ini.

Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja,⁵⁵ menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Dari sisi ekonomi A. Fauzi, setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama menyangkut alasan etika. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan

⁵⁵ Sutamihardja, *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana, IPB, 2004.*

lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi, Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergeneration welfare maximization*).⁵⁶

Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citkannya. Namun demikian ada kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum. Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi ditempat yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Akan tetapi kenyataannya aktivitas produksi yang tinggi dapat saja terjadi bersamaan dengan kemelaratan yang tersebar luas. Kondisi ini dapat membahayakan lingkungan. Jadi pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat terpenuhi kebutuhan

⁵⁶ A. Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 48.

dengan cara meningkatkan potensi produksi mereka dan sekaligus menjamin kesempatan yang sama semua orang.⁵⁷

Konsep pembangunan menurut Soedjatmoko yaitu gerak majunya suatu sistem sosial menghadapi tantangan-tantangan baru. Dan hal itu hanya mungkin jikalau ada perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat itu sendiri.⁵⁸ Lebih lanjut, Soedjatmoko menyampaikan bahwa yang kita perlukan ialah suatu pola pembangunan yang *employment oriented*, yang mengutamakan keadilan sosial, etika sosial dan memperkuat kesanggupan untuk berdiri dikaki sendiri.

Berdiri di atas kaki sendiri tidak mungkin dilakukan jika kita masih menggantungkan diri kepada negara lain maupun investor asing terus-menerus. Jika demikian halnya, maka ekonomi nasional kita sudah bergeser dari nilai-nilai ekonomi kerakyatan menuju ekonomi kapitalis.

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti ; meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya.

Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pendekatan pencapaian terhadap keberlanjutan ataupun kesinambungan berbagai aspek

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ B.J. Habibie, "M. Dawam Rahardjo, ICMI dan Habibienomics" dalam buku, Ihsan Ali Fauzi (ed), *Demi Toleransi Demi Pluralisme*, (Pustaka Cidesindo: Universitas Michigan, 1997), h. 33.

kehidupan yang mencakup; keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta keberlanjutan pertahanan dan keamanan.⁵⁹

a) Keberlanjutan Ekologis

Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- Memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan di bumi tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara dan seluruh kehidupan berkelanjutan.
- Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan yaitu; daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya terpulihkan. ketiga untuk melaksanakan kegiatan yang tidak mengganggu integritas tatanan lingkungan yaitu hindarkan konversi alam dan modifikasi ekosistem, kurangi konversi lahan subur dan kelola dengan buku mutu ekologis yang tinggi, dan limbah yang dibuang tidak melampaui daya asimilatifnya lingkungan.
- Memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman kehidupan yang menentukan keberlanjutan proses ekologis. Proses yang menjadikan rangkaian jasa pada manusia masa kini dan masa mendatang. Terdapat tiga aspek keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman genetika, spesies, dan tatanan lingkungan. Untuk mengkonversikan keanekaragaman hayati tersebut perlu hal-hal berikut yaitu “menjaga ekosistem alam dan area yang representatif tentang kekhasan sumberdaya hayati agar tidak dimodifikasikan, memelihara seluas mungkin area ekosistem yang dimodifikasikan untuk keanekaragaman dan keberlanjutan keanekaragaman spesies, konservatif terhadap konversi lahan pertanian”.

⁵⁹ Djajadinigrat, *Untuk Generasi Masa Depan: “Pemikiran, Tantangan dan Permasalahan Lingkungan*, (Bogor: ITB, 2001), h. 114.

b) Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan memiliki dua hal utama keduanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan aspek keberlanjutan lainnya. Keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal tersebut diatas dapat dicapai melalui kebijaksanaan makro ekonomi mencakup reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, mobilisasi tabungan domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset.

c) Keberlanjutan Ekonomi Sektoral

Penyesuaian kebijakan yang meningkatkan keberlanjutan ekonomi makro secara jangka pendek akan mengakibatkan distorsi sektoral yang selanjutnya mengabaikan keberlanjutan ekologis. Hal ini harus diperbaiki melalui kebijaksanaan sektoral yang spesifik dan terarah. Oleh karena itu penting mengindahkan keberlanjutan aktivitas dan ekonomi sektoral.

d) Keberlanjutan Sosial Budaya

Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu:

- Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.
- Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Halangan terhadap

keberlanjutan sosial harus dihilangkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkannya untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita.

- Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi.
- Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Beberapa persyaratan dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial yaitu : prioritas harus diberikan pada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk manfaat bersama, investasi pada perkembangan sumberdaya misalnya meningkatkan status wanita, akses pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi harus berkelanjutan melalui investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras dengan distribusi aset produksi yang adil dan efektif, kesenjangan antar regional dan desa, kota, perlu dihindari melalui keputusan lokal tentang prioritas dan alokasi sumber daya.

➤ Keberlanjutan Politik

Keberlanjutan politik diarahkan pada respek pada human right, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi dibidang ekonomi, sosial dan politik, demokrasi yang dilaksanakan perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan dan bertanggungjawab, kepastian kesediaan pangan, air, dan pemukiman.

➤ Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan.

Keberlanjutan keamanan seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara dan bangsa perlu diperhatikan.

Dawam Raharjo berpandangan bahwa pembangunan dan negara menjalankan hubungan yang independen. Negara independen dari agama (termasuk Islam), Islam juga independen dari pembangunan. Tapi saling berdialog, dari pandangan diatas, tak heran jika karya-karya Dawam menggunakan nilai spirit agama dalam

mendukung pembangunan masyarakat. Pemahaman Dawam mengenai pembangunan dan negara, sifatnya dialektis, terus tumbuh dan berkembang. Lebih jauh, Dawam memberikan koreksi tentang model pembangunan yang bersumbu pada industrialisasi dan eksploitasi SDA. Ia menilai, Indonesia gagal dalam mengelola SDA, terutama sektor pertambangan. Menurutnya, pengelolaan SDA ini tidak berdampak pada kenaikan pendapatan negara secara signifikan, terlebih bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional, jauh panggang dari api.⁶⁰

Menurut Dawam, membangun bangsa Indonesia, harus dilakukan dari bawah arus pinggiran. Rakyat yang berada dibawah garis kemiskinan dan rata-rata tersebar di pedesaan, sebagai solusi kemandirian bangsa ini, melibatkan masyarakat secara partisipatif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan ruang bagi masyarakat desa melalui ekonomi kreatif dan teknologi tepat guna. Diskursus Islam Progresif muncul sebagai dorongan pembaharuan pemikiran yang kontekstual sesuai dengan tantangan zaman. Pembaharuan ini berangkat atas lahirnya modernisasi dan ketertinggalan pada aspek pemikiran.⁶¹

Keberlanjutan bukanlah merupakan konsep yang sederhana melainkan kompleks, karena dalam operasionalnya banyak hal yang perlu diperhatikan dan saling berkaitan. Oleh karena pemahaman pembangunan berkelanjutan penting ditingkatkan terutama bagi pengambil kebijakan baik skala makro maupun mikro guna mencapai tujuan pembangunan. Untuk memahami konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, maka dalam pengaplikasian atau penerapannya dibutuhkan landasan konsep atau teori yang dapat dijadikan acuan dalam menuju arah pembangunan, oleh karena itu penulis mencoba mendalami dan menggambarkan berbagai konsep dan pertimbangan-pertimbangan aspek keberlanjutan guna membantu mengidentifikasi dan memformulasikan berbagai strategi, guna menjadi acuan dalam mencapai tujuan pembangunan, khusus di Indonesia.

⁶⁰ Dawam Rahardjo, "*Aliansi Kebangsaan: Indonesia Telah Gagal Mengelola SDA*", www.jakartakita.com, (akses internet tanggal 02 Maret 2018, jam 16.00 WIB).

⁶¹ Budhi Munawar Rahman, *Reorientasi Pembaharuan Islam*, (Jakarta: Democracy Project, 2010), h. 78.

G. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berikut ini merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan:

1. Meningkatkan pendapatan per kapita negara

Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan di suatu negara adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Pada beberapa data, pendapatan per kapita menjadi indikator dari sukses tidaknya suatu negara. Pembangunan berkelanjutan tentu akan berbanding lurus dengan naiknya devisa negara yang berimbas pada pendapatan per kapita Indonesia.

2. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi

Adanya pembangunan nasional tentu akan berimbas pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah 2 hal yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi tidak menekankan pada pemerataan tarif hidup masyarakat. Meski begitu meningkatkannya pembangunan juga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

3. Meningkatkan dan menyetarakan taraf hidup penduduk

Di poin sebelumnya telah dibahas mengenai perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor pembeda adalah pada pembangunan ekonomi yang menekankan adanya kesetaraan taraf hidup penduduk. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah meningkatkan dan menyetarakan taraf hidup masyarakat di berbagai daerah.

4. Meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran

Masalah pengangguran adalah isu yang terus terjadi di Indonesia dan belum terselesaikan. Salah satu upaya mengatasi pengangguran adalah peningkatan pembangunan. Diharapkan hal tersebut bisa meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan di daerah-daerah.

5. Mengurangi kesenjangan sosial

Kesenjangan sosial masih saja terjadi di Indonesia, dimana jarak antara warga mampu dan warga tidak mampu cukup jauh. Tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan salah satunya adalah mengurangi tingkat kesenjangan sosial tersebut agar lebih setara lagi.

6. Meningkatkan kapasitas produksi

Meningkatkan kapasitas produksi menjadi tujuan pembangunan Indonesia yang lain. Pembangunan yang baik tentu akan meningkatkan sektor produksi suatu negara. Hal ini akan mendorong kualitas dan kuantitas produksi barang dan jasa yang ada dalam industri di Indonesia.

7. Meningkatkan investasi negara

Pembangunan berkelanjutan yang baik akan membuat geliat ekonomi suatu negara menjadi lebih maju. Salah satu fungsinya adalah untuk menarik investor agar lebih banyak dan tidak ragu lagi untuk berinvestasi di Indonesia. Tentu output yang diharapkan adalah menambah pendapatan dan keuangan negara.

8. Mengurangi angka kemiskinan

Kemiskinan adalah isu penting yang harus diatasi di Indonesia. Seperti diketahui bahwa di Indonesia masih banyak masyarakat miskin. Adanya pembangunan ekonomi yang baik dan berkelanjutan diharapkan bisa mengurangi persentase dan angka kemiskinan di Indonesia.

9. Menciptakan keadilan dan kemakmuran dalam bermasyarakat

Pada akhirnya, pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran dalam bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator lain seperti berkurangnya kesenjangan sosial dan kemiskinan.

10. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan

Pemerintah melakukan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperbaiki beberapa sektor, termasuk mengarahkan sektor pendidikan dan kesehatan. Tentu dua sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.



H. Makna Etika Islam Bagi Pembangunan

Perubahan dan paradigma baru atas desa itu sangat penting mengingat kondisi objektif dan dinamika desa-desa di Indonesia yang secara umum masih memprihatinkan. Desa identik dengan ketertinggalan dalam semua aspek kehidupan. Kewenangan mengatur dan mengurus dirinya sendiri yang dibarengi dengan memberikan hak-hak desa, sehingga desa memiliki kemampuan finansial yang memadai guna melaksanakan kewenangannya, sebagaimana ditegaskan Undang-undang Desa, menjadi faktor penggerak peningkatan pembangunan desa yang sekaligus menjadi ruang krusial implementasi Undang-undang Desa.

Pembangunan desa sebagai sistem yang dikonstruksi Undang-undang Desa, menempatkan masyarakat pada posisi strategis, sebagai subjek pembangunan, dengan demikian, masyarakat memiliki ruang dan peran strategis dalam tata kelola desa, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan desa. Isu penting dalam konteks ini adalah peningkatan keberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya desak yang efektif untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik dan penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangannya yaitu proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.

Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan ataupun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan dibidang sosial, politik, atau pun pembangunan ekonomi masyarakat. ADD adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil

pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional riil dan meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi selalu di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan. Dengan berdasarkan pendekatan bahwa pembangunan didasarkan pada pembangunan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang. Dalam hal ini pembangunan desa mengutamakan prinsip imbang kewajiban yang serasi antara keduanya, yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat yang memberikan partisipasi dalam pembangunan berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan.

Melihat dari arti hakiki pembangunan, pada dasarnya menekankan pada aspek nilai-nilai kemanusiaan, seperti menunjang kelangsungan hidup atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, harga diri atau adanya perasaan yang layak menghormati diri sendiri dan tidak menjadi alat orang lain, kebebasan atau kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan. Selain itu, arti pembangunan yang paling dalam adalah kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya, yang mencakup kapasitas, keadilan, penumbuhan kuasa dan wewenang.

Berkaca dari pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang di programkan Negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa

dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol “Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)”. Pada masa orde baru secara substensial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat top-down, pada era reformasi secara substensial pembangunan desa lebih kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantara Program Inpres Desa Tertinggal dan bantuan masyarakat tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat bottom-up atau kombinasi top-down dan bottom-up. Program pembangunan desa yang bersifat bottom-up tertuang dalam undang-undang Otonomi Daerah (OTDA).

Franz Magnis Suseno memberikan pendapatnya bahwa pembangunan hanya dapat mempertahankan mutu manusiawinya apabila dilandasi oleh sikap hormat terhadap manusia, bukan hanya manusia terhadap abstraksi, sebagai suatu paham filosofis, melainkan terhadap segenap manusia konkret yang hidup dalam wilayah yang terkena pembangunan itu. Hormat terhadap manusia berarti mengakui kedudukannya yang sama, tidak melakukannya sebagai obyek perencanaan, berorientasi pada harapan-harapannya, tidak pernah mengorbankan pihak yang satu demi keuntungan pihak yang lain, tidak membela kemajuan dengan menyengsarakan yang lain.

Masih dalam segi isi UU Desa, dikatakan bahwa setiap desa akan mendapatkan dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling sedikit 10 persen setiap tahunnya. Maka, dapat diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.2 hingga 1.4 miliar setiap tahunnya. Berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU Desa yaitu, 10 persen dari dan

transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia.

Total dana yang sangat fantastis itu, tidak mustahil akan diselewengkan oleh perangkat desa yang tidak bertanggungjawab. Maka, penting adanya pengawasan, dalam hal ini adalah tugas BPD dan pemerintah daerah setempat, yang dilakukan secara berkala terhadap setiap desa agar pembangunan desa lebih tepat sasaran. Masalah lainnya juga akan timbul, yaitu adanya perbedaan-perbedaan keadaan atau kondisi desa yang ada di Indonesia. Ada desa yang memang sudah mandiri dan sudah mampu menyejahterakan masyarakatnya dengan berbagai cara sebelum lahirnya UU Desa. Akan tetapi, ada pula desa yang tertinggal dan masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jika nantinya akan dikucurkan dana alokasi tersebut, dikhawatirkan akan mubazir bagi desa maju dan akan tetap merasa kekurangan bagi desa tertinggal. Sekali lagi, peran pengawasan sangat diharapkan mampu mengawasi penggunaan dana alokasi tersebut agar dana alokasi tersebut tepat sasaran sesuai kebutuhan dan keperluan masing-masing desa.

Dihadapkan lagi masa jabatan kepala desa juga mungkin saja akan menjadi permasalahan. Pada UU Desa, dijelaskan masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 3 periode, boleh berturut-turut atau tidak. Masa jabatan yang tergolong lama ini, ditakutkan akan lahir “raja-raja kecil” di desa. Terlebih lagi, dengan kewenangan yang diberikan pada setiap kepala desa cukup bebas dan keuntungan-keuntungan menjadi kepala desa yang dapat menggiurkan bagi setiap orang, memungkinkan seseorang dengan segala cara agar dapat menduduki jabatan sebagai kepala desa. Untuk itu, masyarakat desa harus jeli memilih kepala desa yang memang berkompeten dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di desanya. Dengan menggunakan pemilihan secara langsung, masyarakat desa diharapkan mampu menepatkan orang-orang terbaik di desanya pada setiap posisi di perangkat desanya, terlebih

pada posisi kepala desa. Tingkatan kepedulian masyarakat desa dalam berdemokrasi, secara tidak langsung, juga akan berpengaruh dalam pembangunan-pembangunan di wilayahnya. Penepatan orang baik dan memang mampu mengatasi permasalahan desa pada tingkat kepala desa, pastilah akan berdampak positif dalam perubahan-perubahan yang terjadi ke depannya. Sebaliknya, jika salah memilih, bukan malah mengatasi permasalahan tetapi akan menimbulkan permasalahan baru yang mungkin lebih besar lagi.

Salah satu elemen penting dalam pembangunan adalah stakeholders. Stakeholders adalah mereka yang tinggal di desa, pihak yang merencanakan, mengontrol dan mengevaluasi terkait dengan semua proses pembangunan yang berkelanjutan. Target dari pembangunan pun pada akhirnya ditujukan pada stakeholders itu sendiri.

Islam merupakan agama yang mengajarkan akhlak yang begitu sempurna mulai dari kejujuran, tidak egois, kedisiplinan, patuh kepada pemimpin, patuh kepada semua peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan agama. Etika Islam mengajarkan untuk menggantungkan keinginan terbesarnya kepada akhirat sehingga setiap stakeholders dalam pembangunan selalu mengambil celah agar setiap tindakannya mendapat ridho dari Allah.

Mereka yang berperan sebagai subjek pembangunan akan mengimplementasikan pembangunan yang sebaik-baiknya yang dapat menguntungkan manusia, dan berusaha menghindari sekelumit permasalahan yang diprediksikan akan terjadi. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk menindas sebagian stakeholders karena Islam mengajarkan tentang etika, keadilan dan kemaslahatan umat manusia.

Selanjutnya, perlu ditanamkan dalam pribadi bahwa tidak ada sedikitpun keinginan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari program pembangunan yang dilakukan dengan menggantungkan beberapa pihak yang bertentangan dengan undang-undang sebagai sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam pembangunan, karena Islam mengajarkan kejujuran. Sesungguhnya

kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur dan menjaga etikanya sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta dan tidak menjaga etikanya maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta.

Mereka yang berperan sebagai pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan (pemerintah) akan melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tidak sedikitpun memanfaatkan jabatan dengan cara-cara yang batil, karena etika Islam mengajarkan untuk amanah dalam setiap aktifitas yang diperbuat, karena pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin.

Mereka yang berperan sebagai masyarakat akan patuh kepada semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ketika pemerintah melarang demikian maka masyarakat pun patuh selama bukan dalam perintah kemaksiatan.

Demikianlah, etika Islam mengajarkan pribadi setiap manusia dalam setiap seluk-beluk kehidupan manusia. Apabila etika Islam dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam pembangunan berkelanjutan implementasi undang-undang desa, maka desa yang terbentuk pun akan menjadi sebaik-baiknya desa. Karena pada hakikatnya desa dinilai dari bagaimana sikap dan tingkah laku masyarakat yang hidup didalamnya.

BAB III

DESKRIPSI MASYARAKAT TEGINENENG DI KABUPATEN PESAWARAN DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA

A. Keadaan Geografis dan Demografis

Kecamatan Tegineneng adalah salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Pesawaran yang paling Utara. Kecamatan Tegineneng merupakan pemekaran dari Kecamatan Natar Lampung Selatan.

Kecamatan Tegineneng merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pesawaran dengan luas sekitar 142,63 ha, dan penduduk sekitar 53.790 jiwa dengan jarak 29.64 Km dari Ibu Kota Kabupaten Pesawaran. Jumlah Desa di Kecamatan Tegineneng sebanyak 16 desa.

1. Bumi Agung
2. Kejadian
3. Batang Hari Ogan
4. Negara Ratu Wates
5. Gunung Sugih Baru
6. Gedung Gumanti
7. Kresno Widodo
8. Sinar Jati
9. Margo Rejo
10. Gerning
11. Panca Bakti
12. Margo Mulyo
13. Rejo Agung
14. Kota Agung
15. Trimulyo
16. Sriwedari



Kecamatan Tegineneng memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

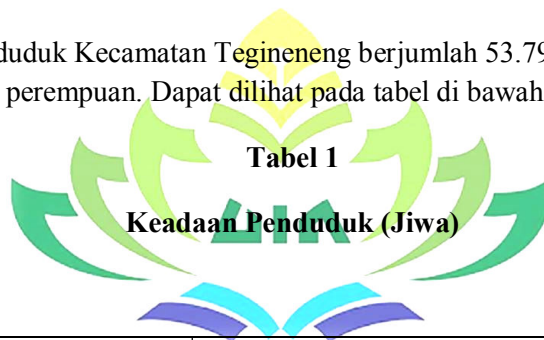
- Sebelah Utara Berbatasan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran

- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri dan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Kecamatan Tegineneng sebagian besar terdiri dari daerah dataran, dari luas wilayah Kecamatan Tegineneng sebesar 142,63 ha, 70% diantaranya adalah daerah lahan pertanian dengan kepadatan penduduk sekitar 53.790 jiwa, Kecamatan Tegineneng merupakan daerah yang beriklim tropis basah (type B) dengan musim hujan berkisar antara bulan April sampai dengan Bulan Desember, sedangkan musim kemarau antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober.⁶²

a. Keadaan Penduduk dan Pendidikan

Jumlah penduduk Kecamatan Tegineneng berjumlah 53.790 jiwa dengan 27.980 laki-laki dan 25.810 perempuan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



NO	Desa	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bumi Agung	3764	3524	7288
2	Kejadian	834	817	1651
3	Batang Hari Ogan	1282	1317	2599
4	Negara Ratu Wates	476	502	978
5	Gunung Sugih Baru	658	756	1414
6	Gedung Gumanti	2321	2161	4482
7	Kresno Widodo	2212	2193	4405
8	Sinar Jati	588	595	1183
9	Margo Rejo	2305	2065	4370

⁶² Haryoto, *Wawancara*, Sekretaris Camat Tegineneng, 16/02/ 2018.

10	Gerning	1936	1869	3905
11	Panca Bakti	822	819	1641
12	Margo Mulyo	2039	1997	4090
13	Rejo Agung	1237	1088	2325
14	Kota Agung	2128	2081	4209
15	Trimulyo	3003	2842	5845
16	Sriwedari	2375	1184	3559
Jumlah		27.980 jiwa	25.510 jiwa	53.790 jiwa

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Tegineneng tahun 2017

Dari tabel di atas desa Bumi Agung dan Trimulyo adalah desa dengan jumlah penduduk terbanyak dengan rincian desa Bumi Agung jumlah penduduknya 7.288 jiwa yang terdiri dari 3.764 laki-laki dan 3.524 perempuan sedangkan desa Trimulyo berjumlah 5.845 jiwa yang terdiri dari 3.003 laki-laki dan 2842 perempuan,. Banyaknya jumlah penduduk di karenakan salah satunya adalah luasnya wilayah dari kedua desa tersebut, ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor padatnya penduduk di kedua desa tersebut.

Sedangkan desa yang termasuk desa paling sempit lahannya dan paling sedikit penduduknya adalah desa Negara Ratu Wates. Dengan jumlah penduduk 978 jiwa.

Penduduk yang ada Kecamatan Tegineneng diperoleh melalui pendidikan formal, 38 PAUD, 12 buah gedung TK, 42 buah gedung SD, 12 buah gedung SLTP, 4 buah gedung SLTA, Dilihat dari tingkat pendidikannya maka dapat kita lihat table dibawah ini.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan (Jiwa)

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	%
1	TK	9.719	18 %
2	SD	16.211	30 %
3	SMP	17.967	33 %
4	SMA	7.681	15 %
5	Sarjana	1.315	3 %
6	Tidak Tamat SD	897	1 %
Jumlah		53.790 jiwa	100 %

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Tegineneng tahun 2017

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah penduduk berdasarkan pendidikan. jumlah penduduk yang berpendidikan TK berjumlah 9.719 jiwa kalau dipersentasikan 18%. Penduduk yang berpendidikan SD berjumlah 16.211 jiwa persentasinya 30%. Penduduk dengan pendidikan SMP berjumlah 17.967 jiwa persentasi 33%. Jumlah penduduk berpendidikan SMA 7.681 jiwa dengan persentasi 15%. Sedangkan penduduk yang pendidikan sarjana berjumlah 1.315 jiwa persentasinya 3%. dan yang tidak tamat SD berjumlah 897 jiwa dengan pesentasi 1%.

b. Mata Pencarian

Kondisi perekonomian masyarakat di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran di dominasi pada sektor pertanian 70% (tujuh puluh persen), dan lainnya pedagang, wiraswasta, PNS dan pensiunan sebesar 30% (tiga puluh persen). Mayoritas pekerjaan masyarakat di Kecamatan Tegineneng adalah petani kakau, baik sawah maupun kebun belum di manfaatkan secara optimal membuat produksi pertanian belum meningkat.

Sedangkan masyarakat yang menjadi buruh tani hanya mendapat penghasilan perhari antara Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)- Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Dibidang ekonomi, masih sedikitnya lembaga perekonomian di wilayah Kecamatan Tegineneng yang terkait seperti: perdagangan, jasa dan industri kecil, atau

UMKM, yang kurangnya kegiatan pembinaan kepada masyarakat. Perlunya upaya dalam usaha-usaha untuk jasa, perdagangan, industri kecil dan menengah di hadapkan dan dikembangkan lebih lanjut untuk menggerakkan roda perekonomian khususnya di Kecamatan Tegineneng. Lebih jelasnya dapat dilihat kondisi perekonomian masyarakat pada tabel 3.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian (Jiwa)

No	Mata pencapaian	Jumlah	%
1	Petani /pekebun	12.888	24
2	Wiraswasta/ pedagang	8.980	16
3	Buruh/buruh tani	11.700	22
4	Tukang	7.487	14
5	PNS	3.188	6
6	Pelajar	9.547	18
Jumlah		53.790 jiwa	100 %

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Tegineneng tahun 2017

Tabel di atas menjelaskan jumlah penduduk berdasarkan mata pencapaian yang terdiri dari petani/pekebun, wiraswasta/pedagang, buruh, tukang dan PNS, dari beberapa mata pencapaian di atas penduduk Kecamatan Tegineneng sebagian besar berprofesi sebagai petani/pekebun dengan jumlah mencapai 12.888 jiwa, hal ini disebabkan lahan pertanian dan perkebunan yang masih luas.

Jika dipikir secara sederhana, secara fungsional dan dengan kacamata maka permasalahannya ialah “Rakyat Indonesia yang tinggal di desa adalah umumnya petani, meningkatkan kualitas hidup mereka ialah menambah kualitas produk pertanian serta-merta meningkatkan harga jual produk tersebut sejajar dengan harga pangan internasional dan sejajar pula dengan peningkatan terus menerus harga konsumsi lainnya. Pemerintah harus mengurangi subsidi kepada penduduk kota yang relatif kaya dan juga kepada petani luar negeri yaitu dengan membayar harga pangan di dalam impor hampir 2 (dua) kali lipat dari harga pangan di dalam negeri. Apakah mungkin, subsidi tersebut diberikan kepada petani miskin?”⁶³

⁶³ Fauzie Nurdin, *Sosiologi Pembangunan*, (Jogjakarta: Panta Rhei, 2014, h. 96

c. Sosial Keagamaan

Penduduk Kecamatan Tegineneng yang beragama Islam mencapai 96.6 % sedangkan 4,4 % memeluk agama Kristen dan Budha.

Tabel 4

Tabel Penduduk Menurut Agama Di Tegineneng Tahun 2017 (jiwa)

NO	Pekon	Agama					
		Islam	Protestan	Budha	Hindu	Katolik	Jumlah
1	Bumi Agung	7288	-	-	-	-	7288
2	Kejadian	1648	-	-	-	4	1652
3	Batang Hari Ogan	2599	-	-	-	-	2599
4	Negara Ratu Wates	978	-	-	-	-	978
5	Gunung Sugih Baru	1410	-	-	-	4	1414
6	Gedung Gumanti	4472	-	5	-	5	4482
7	Kresno Widodo	4390	7	-	-	8	4405
8	Sinar Jati	1183	-	-	-	-	1183
9	Margo Rejo	4200	20	50	-	100	4370
10	Gerning	3901	-	1	-	3	3905
11	Panca Bakti	1641	-	-	-	-	1641
12	Margo Mulyo	4090	-	-	-	-	4090
13	Rejo Agung	2325	-	-	-	-	2325
14	Kota Agung	4209	-	-	-	-	4209
15	Trimulyo	5845	-	-	-	-	5845
16	Sriwedari	3500	-	-	-	59	3559

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Tegineneng tahun 2017

Tabel di atas menjelaskan jumlah penduduk berdasarkan agama, di kecamatan Tegineneng ada lebih dari satu agama yang dianut diantaranya Islam, Budha, Protestan dan Katolik. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Tegineneng menganut agama Islam, hanya di desa Margo Rejo, Sriwedari, Kresno Widodo, Gunung Sugih Baru, Gedung Gumanti dan Kejadian ada sebagian penduduk yang menganut agama Protestan, Budha dan Katolik.

Berdasarkan keagamaan mayoritas penduduk kecamatan Tegineneng beragama Islam, adapun fasilitas atau tempat ibadah berdasarkan agama atau keyakinan sebagai berikut:

Tabel 5

Fasilitas Berdasarkan Tempat Ibadah

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Masjid	109
2.	Gereja Katolik	1
3.	Gereja Protestan	3
4.	Vihara	1
5.	Pura	-

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Tegineneng tahun 2017

Jumlah tempat ibadah yang terdiri dari 109 masjid dan langgar atau surau yang tersebar di masing-masing desa, 1 gereja Katolik, 3 gereja Protestan dan 1 Vihara.

d. Sarana Kesehatan

Di Kecamatan Tegineneng sarana kesehatan di setiap desa cukup memadai, terbukti hanya ada 16 puskesmas di desa untuk pertolongan pertama masyarakat. Dan hanya ada 1 puskesmas di Kecamatan Tegineneng. Adapun sarana kesehatan di kecamatan Tegineneng dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 6

Sarana Kesehatan

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1.	Puskesmas	1

2.	Puskesmas	16
----	-----------	----

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Tegineneng tahun 2017

e. Kondisi Perumahan

Data kondisi rumah di Kecamatan Tegineneng Sebagai berikut:

Tabel 7

Kondisi Rumah

No	Klasifikasi	Presentase %
1.	Permanen	65 %
2.	Semi Permanen	25 %
3.	Non Permanen	10 %

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Tegineneng tahun 2017

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa kondisi rumah masyarakat Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran terdiri dari 3 klasifikasi yaitu rumah premanen, semi premanen, dan non permanen. Rumah permanen yaitu rumah yang memiliki ciri dinding bangunannya dari tembok, berlantai semen atau kramik, dan atapnya berbahan genteng. Sedangkan rumah semi premanen yaitu rumah yang memiliki ciri dindingnya setengah tembok atau setengah bambu, lantainya semen, atapnya terbuat dari gentang seng ataupun asbes. Rumah non premanen memiliki ciri rumah berdinding kayu, mambu atau gedek, dan tidak berlantai (tanah), atas rumahnya dari seng maupun asbes.

Kondisi rumah masyarakat di Kecamatan Tegineneng terdiri dari rumah premenen sebesar 65% (enam puluh lima per seratus), semi premanen sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dan rumah non premenen sebesar 10% (sepuluh per seratus).

B. Kondisi Masyarakat Tegineneng

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapainya kesejahteraan masyarakat, dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

1. Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat

Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk mengembangkan potensi anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak tersebut cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya dan tidak tergantung kepada orang lain. Pendidikan dapat di peroleh melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal. Masyarakat Kecamatan Tegineneng jika ditinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, bahkan ada juga yang melanjutkan kejenjang SMA, dan strata satu (S1). Tetapi hampir dari masyarakat Kecamatan Tegineneng berpendidikan SMA. Faktor anak sekolah dikarenakan para orang tua tidak menganjurkan dan juga tidak ada keinginan dari anak untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, mereka hanya cepat-cepat mencari pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga.



Tabel 8
Tingkat Pendidikan Masyarakat 2017

No	Keterangan	Jumlah %
1.	Penduduk usia 10 tahun keatas yang buta huruf	0
2.	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	2
3.	Penduduk tamat SD/ sederajat	20
4.	Penduduk tamat SMP/ sederajat	25
5.	Penduduk tamat SMA/ sederajat	46
6.	Penduduk tamat D-3	4
7.	Penduduk tamat S-1	2
8.	Penduduk tamat S-2	1
Total		100

Sumber: Kesimpulan wawancara kepala desa Kecamatan Tegineneng

Tingginya warga yang berlatar belakang SMA atau sederajat membuat pengetahuan masyarakat mengetahui pentingnya pendidikan. Akan tetapi berpenghasilan rendah membuat warga takut untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Warga yang berpendidikan S1 diantaranya adalah anak-anak yang memiliki perkebunan luas dan pemilik sawah yang luas, PNS didinas pendidikan atau guru SD.

Kesehatan yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia antara nagara dalam *Human Devolepmentn Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut merupakan indukator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita).

Indikator kesehtan yang menjadi komponen sejahtera meliputi:

- 1) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum perkiraan kalori dan protein yaitu 2100 kk 1l/hari.
- 2) Sandang, dinyatakan dengan idikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
- 3) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk menyediakan obat-obatan dirumah, ongkos dokter dan perawat.

Untuk indikator kesehatan, indikator yang mewakili dalam IPM adalah umur harapan hidup waktu lahir. namun bila ditanya lebih lanjut bagaimana cara meningkatkan umur hidup, sulit dijawab dengan pasti. Oleh karena itu tampaknya diperlukan serangkaian indikator kesehatan lain yang diperkirakan berdampak pada kesehatan yang pada gilirannya meningkatkan umur harapan hidup waktu lahir.

Tabel 9

Tingkat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator	Tahun 2017
1.	Angka Kematian Bayi	1 %
2.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	0 %
3.	Angka Harapan Hidup	4 %
4.	Presentase Persalinan Ditangani Medis	95 %

Sumber: Kesimpulan wawancara kepala desa Kecamatan Tegineneng

Tabel diatas menunjukan bahwa meningkatnya taraf kesehatan masyarakat Tegineneng. Hal ini ditegaskan oleh seorang tokoh masyarakat yang menjelaskan bahwa tidak adanya penurunan kesehatan yang diakibatkan kekurangan cukup gizi atau kematian bayi dan ibu hamil, hal ini disebabkan hampir seluruh masyarakat Tegineneng dalam pemenuhan gizi sudah tercukupi.

Dalam proses kelahiran penduduk Kecamatan Tegineneng sudah sedikit menggunakan tabib (dukun bayi), penduduk sudah beralih ke bidan, dan mudahnya akses jalan menuju puskesmas atau puskesdes, masyarakat yang sudah mengikuti kemajuan zaman serta mudahnya mengakses jaringan internet untuk mengetahui informasi tentang kesehatan.

2. Ekonomi dan Budaya

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari kepala rumah tangga ataupun pendapatan anggota rumah tangga. penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan seperti: pangan kebutuhan jasmani, kesehatan, maupun pendidikan serta kebutuhan lainnya yang bersifat material.

Masyarakat Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani, dikarenakan di Kecamatan Tegineneng memiliki lahan yang luas serta tanah yang subur untuk bercocok tanam, sebagian besar masyarakat menanam padi dan jagung sebagai sumber pendapatan.

Adapun besaran pendapatan masyarakat Kecamatan Tegineneng menurut profesi sebagai berikut:

Tabel 10

Pendapatan Rata-rata Penduduk Tahun 2017

No	Jenis Profesi	Pendapatan Per Bulan
1.	Petani	Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000
2.	Buruh	Rp 500.000 – Rp 1.000.000
3.	Pedagang	Rp 700.000 – Rp 1.800.000

Sumber: Wawancara kepala desa Kecamatan Tegineneng

Berdasarkan tabel diatas menunjukan pendapatan masyarakat dengan pengelolaan alokasi dana desa tahun 2015. Pendapatan masyarakat tetap tidak mengalami perubahan secara signifikan sekalipun ADD tiap tahun bertambah.

Tabel 11

Pendapatan Rata-rata Penduduk Tahun 2017

No	Jenis Profesi	Pendapatan Per Bulan
1.	Petani	Rp 1.000.000 – Rp 1.800.000
2.	Buruh	Rp 500.000 – Rp 1.500.000
3.	Pedagang	Rp 700.000 – Rp 1.900.000

Sumber: Wawancara kepala desa Kecamatan Tegineneng

Dari kedua tabel diatas terlihat bahwa kenaikan pendapatan penduduk di Kecamatan Tegineneng tidak mengalami peningkatan yang besar, ini menunjukan alokasi dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Kecamatan Tegineneng, kurang baik dalam pembuatan program dan pengelolaannya.

3. Implementasi Kebijakan Perumahan Masyarakat

Pengeluaran dilakukan untuk kebutuhan hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi pada umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor terpenting karena makanan merupakan barang utama untuk kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai barang konsumsi (termasuk sadang, perumahan bahan bakar, dan sebagainya), yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga.

Keanekaragamannya tergantung kepada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi. Hasil kesimpulan wawancara penulis dengan kepala desa di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kebutuhan konsumsi setiap hari tidak selalu sama. Penghasilan tidak menentu menjadi salah satu faktor berapa porsi pengeluaran perharinya. Jika pendapatan masyarakat tinggi maka konsumsi masyarakat akan tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan masyarakat sedikit maka hanya untuk kebutuhan pangan saja. Umumnya pengeluaran untuk konsumsi berkisar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) perhari. Ini belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan, pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor dan sebagainya.

Menurut perhatian biro pusat statistik konsumsi masyarakat meliputi seluruh pengeluaran rumah tangga baik makanan, pendidikan, kesehatan maupun perumahan. Berikut ini merupakan tabel pola konsumsi masyarakat Kecamatan Tegineneng.

Tabel 12

Pola Konsumsi Tahun 2017

No	Pola Konsumsi	Penegluaran Per Bulan
1.	Pengeluaran Makanan	Rp 800.000
2.	Pengeluaran Pendidikan	Rp 500.000

3.	Penegeluaran Kesehatan	Rp 200.000
Jumlah Penegeluaran		Rp 1.500.000

Sumber: Hasil Kesimpulan wawancara kepala desa Tegieneng

Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengeluaran konsumsi makanan masih lebih besar dibandingkan konsumsi perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat masih bergelut untuk memenuhi kebutuhan makanan. Sehingga masyarakat Kecamatan Tegieneng harus mencari pekerjaan tambahan untuk meningkatkan pendapatan.

Menurut WHO, rumah atau struktur fisik bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu. Sedangkan perumahan adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik, misalnya penyediaan air bersih, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Permukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya, perumahan memberi kesan tentang rumah beserta sarana dan rasaran lingkungannya.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perumahan merupakan suatu lingkungan untuk tempat tinggal, struktur fisik, atau bangunan untuk berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani, serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial maupun politik dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Tabel 13

Tingkat Perumahan Masyarakat Tahun 2017

No	Jenis Profesi	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Kepemilikan Rumah	Hak Milik	Hak Milik
2.	Jumlah Rumah Per / KK	8.063	8.056

3.	Rumah Berkualitas Baik	65 %	70 %
4.	Rumah Tangga di Aliri Listrik	95 %	98 %
5.	Rumah Tangga Memiliki MCK yang Baik	75 %	79 %

Sumber: Hasil Kesimpulan wawancara kepala desa Tegineneng

Dari tabel diatas jelas menunjukan bahwa program alokasi dana desa berdampak positif jika dilihat dari jumlah-jumlah rumah berkualiatas baik yaitu naik sebesar 15%, sedangkan jika dilihat dari tingkat penerangan listrik naik sebesar 3%, tetapi belum berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari fasilitas MCK yang belum cukup memadai.

C. Undang-undang Desa

1. Hakikat Undang-undang Desa

Pemerintahan desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan dalam kehidupan bernegara di Indonesia, karena struktur pemerintahan desa sudah mempunyai struktur pemerintahan sendiri yang bersifat mandiri, walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Hal ini dapat dilihat dari sudah adanya struktur kepengurusan perangkat desa, mekanisme pengelolaan dana desa atau yang lebih dikenal dengan kas desa, adanya harta desa baik itu berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak (tanah desa atau tanah adat) yang diakui secara turun-temurun menjadi harta kekayaan desa.

Hak dan kekayaan desa itu dapat dikelola sepenuhnya oleh pemerintahan desa, sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat, yang cara pengelolaannya juga menyesuaikan dengan model atau gaya kepemimpinan desa setempat, sehingga antara desa yang satu dengan desa lainnya dapat saja berbeda. Inilah yang disebut dengan otonomi asli desa. Disebut otonomi asli desa karena dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan desa sebelum diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 adanya tingkat keragaman yang tinggi antara desa yang satu dengan desa lainnya.⁶⁴

Keragaman itu mulai dari struktur penyelenggaraan pemerintahan desa, adat isitiadat yang berlaku di desa, pengaturan hubungan antar sesama warga desa, pengaturan pergaulan bujang gadis, pengaturan perkawinan adat, pengaturan pembagian waris, pengaturan hubungan darah dalam keluarga (ada yang matrilineal dan patrilineal), pengaturan terkait dengan upacara adat, pengaturan terkait dengan pengolahan hutan dan lain sebagainya.

⁶⁴ Taliziduhu Ndaraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta; PT. Bina Aksara, 1981), h.13.

Tujuan bernegara yang tertuang dalam pembukaan UUD Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, hal ini bermakna bahwa pemerintah harus melindungi dan menjamin keberadaan keragaman yang ada di desa, bukan dengan menyederhanakan persoalan dengan cara menyeragamkan pemerintahan desa.

Hadirnya Kemendesa PDTT dalam pemerintahan kali ini tak urung menjadi magnet baru bagi aparat dan masyarakat desa. Sebab, dengan adanya nomenklatur kementerian baru yang akan fokus memperhatikan pembangunan dan pemberdayaan desa ini sangat diharapkan berdampak baik terhadap kondisi perdesaan yang selama ini masih kurang mendapat perhatian. Harapan itu tentu tidak begitu saja muncul karena pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian khusus kepada desa. Masyarakat desa berharap dapat merasakan langsung perhatian dari pemerintah dengan hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Melihat semangat tersebut, Menteri Desa PDTT memasukkan program pembangunan desa dalam Nawa Kerja sebagai salah satu program prioritas lima tahun pengabdian kerja. Dengan memprioritaskan pembangunan desa, kita berharap akan terjadi perkembangan desa kearah yang lebih baik.

Harapan itu tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah, terutama Kementerian Keuangan yang telah menetapkan pagu anggaran untuk Kemendesa PDTT sebesar Rp 36 Triliun dalam waktu lima tahun. Besarnya anggaran tersebut tentu mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, berdasarkan beban kewenangan Kemendesa PDTT yang semakin luas. Dalam RPJMN yang sudah dirancang, Kemendesa PDTT mendapat anggaran Rp 36 Triliun selama 5 tahun pemerintahan.

Dana Desa yang relatif banyak itu, tentu harus digunakan secara efektif sehingga berdampak positif bagi warga desa. Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas yang terkait dengan pembangunan desa, antara lain mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian dan prasarana kesehatan desa seperti air bersih, sanitasi lingkungan dan posyandu, sarana dan prasarana pendidikan, seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; serta sarana dan prasarana ekonomi/usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha ikan dan ternak.⁶⁵

Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna, dan peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin dan kelompok perempuan.

Di tingkat desa, Menteri Desa PDTT berharap agar aparat desa terampil mengelola dana. Aparatur dan masyarakat desa perlu diberikan pemahaman dan

⁶⁵ Marwan Jafar, *Kebangkitan Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015), h. xvii.

pengetahuan untuk itu. sehingga dana yang dikucurkan kesetiap desa yang ada, bisa menjadi bagian dalam menggerakkan perekonomian desa. Selanjutnya dana itu akan berkontribusi bagi kemajuan ekonomi nasional.⁶⁶

Desa merupakan bagian birokrasi Negara yang menjalankan birokratisasi di desa. Pasca kemerdekaan eksistensi desa tetap dipertahankan dengan jumlah sampai sekarang 73.000 desa dan 8.000 kelurahan. Pengaturan desa yang selama ini berlaku tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman terutama menyangkut masalah kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, kemajuan dan pemerataan pembangunan, sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah yang dapat mengganggu keutuhan Negara. Tahun 2014 lahir UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mendapat reaksi dari masyarakat namun ada pihak yang meragukan kemampuan Undang-undang ini untuk mewujudkan desa yang kuat, maju dan mandiri. Tentu menarik dipertanyakan, apakah materi muatan Undang-undang ini mampu mewujudkan desa yang kuat dan mandiri? Hal ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu: Hakikat dan perubahan fundamental pembangunan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 antara lain dari Rekonstruksi terhadap pemahaman dan hakekat desa, kewenangan dan keuangan yang berimbang, karena ditenggarai akar permasalahan sulitnya membangun desa berakibat terhadap pembangunan nasional. Dengan harapan UU no. 6 Tahun 2014 memberi kedudukan yang strategis dan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengelola wilayah desa dengan didukung oleh dana yang memadai sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah desa di masa yang akan datang tidak membangun desa secara maksimal.

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Sejak masa penjajahan Hindia Belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu. Di samping itu, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.⁶⁷

Pasca kemerdekaan Indonesia, sebagai bentuk pengakuan terhadap desa, eksistensi desa tetap dipertahankan. Hal ini tercermin dengan adanya pengaturan desa melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh

⁶⁶ *Ibid*, h. 9.

⁶⁷ C.S.T. Kansil, *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghalia, 1988), h. 84.

Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁶⁸

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rendahnya kualitas peraturan perundang-undangan tentang desa membangkitkan animo dan semangat berbagai kalangan masyarakat untuk melakukan perubahan. Pada tahun 2014, upaya tersebut membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2014). Keberadaan UU No. 6 Tahun 2014 mendapat berbagai reaksi dari masyarakat, sebagian besar mengapresiasi namun ada pula pihak yang meragukan kemampuan UU ini untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sebagai penompang dan pendukung untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.⁶⁹

Memperhatikan dinamika dan perkembangan pemikiran ditengah berkenaan dengan pro dan kontra kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentunya secara akademis menarik untuk menelaah lebih lanjut materi muatan yang terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014, apakah materi muatan Undang-undang ini mampu mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis?

Kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 sesungguhnya lahir dari kesenjangan antara peran dan fungsi strategis desa dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang dihadapkan dengan lemahnya kewenangan yang dimiliki desa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, sehingga membuat desa yang secara fisik ada namun dilihat dari fungsinya seperti ada ditengah masyarakat.

Secara sosiologis, kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 didasarkan beberapa pertimbangan, *pertama*, secara sosiologis, jelas bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di desa. Tetapi selama ini, pembangunan cenderung berorientasi pada pertumbuhan kota.⁷⁰

Sumber daya ekonomi yang tumbuh di kawasan Desa diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga desa kehabisan sumber daya dan menimbulkan arus

⁶⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 17.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Jala Reza, *Wawancara*, Tokoh Adat Desa Kejadian, 16/02/ 2018.

urbanisasi penduduk. Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada Desa.

Kedua, ide dan pengaturan otonomi Desa kedepan dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya ekonomi dan politik desa. “Otonomi Desa” hendak memulihkan basis penghidupan masyarakat desa, dan secara sosiologis hendak memperkuat desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri, mengingat transformasi desa dari patembayan menjadi paguyuban tidak berjalan secara alamiah seiring dengan perubahan zaman, akibat dari interupsi negara (struktur kekuasaan yang lebih besar).

Ketiga, pengaturan tentang otonomi desa dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain), dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global. Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kuat (dalam hal ini negara) untuk menghadapinya. Oleh karena itu, diperlukan pembagian tugas dan kewenangan secara rasional di negara dan masyarakat agar dapat masing-masing bisa menjalankan fungsinya. Prinsip dasar yang harus dipegang erat dalam pembagian tugas dan kewenangan tersebut adalah daerah dan desa dapat dibayangkan sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel dalam entitas negara. Berikutnya, ketiganya memiliki misi yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahkan yang lebih mendasar adalah *survival ability* bangsa. Otonomi desa adalah instrumen untuk menjalankan misi tersebut.⁷¹

2. Tujuan Dan Fungsi Undang-undang Desa

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Desa, tujuan Undang-undang Desa adalah sebagai berikut:⁷²

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman keanekaragaman sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan NKRI demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia.
- c. Melestarikan dan mewujudkan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.
- d. Mendorong prakarsa gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

⁷¹ Bambang Widiatmo, *Wawancara*, Tokoh Adat Desa Kejadian, 16/02/ 2018.

⁷² Sri Palupi, dkk, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-undang Desa Berbasis Hak*, (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), h. 5.

- e. Membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat kesejahteraan umum.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan budaya sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- h. Memajukan perekonomian warga masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan nasional.

Delapan butir tujuan di atas adalah soal hak. Pengakuan/rekognisi, partisipasi, keadilan, kesejahteraan ekonomi, pemajuan budaya, mewujudkan layanan publik, adalah perkara hak. Jadi, inti dari Undang-Undang Desa adalah soal hak. Soal memenuhi hak semua warga dan masyarakat. Hak untuk diakui, untuk mendapatkan keadilan, memperoleh kesejahteraan, untuk terlibat dalam pembangunan desa, untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, untuk mengembangkan ekonomi, dan juga untuk mengurus desa sendiri. Pertanyaannya, apakah hak-hak itu dapat terwujud dengan Undang-Undang Desa? Undang-Undang Desa hanya memberikan jaminan. Jaminan bahwa hak-hak itu dilindungi oleh Undang-Undang dan jika dilanggar akan ada sanksinya. Sebagai contoh, pada pasal 4 butir (d) di atas disebutkan, undang-undang desa bertujuan mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama. Jika warga desa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan desa, misalnya dalam menyusun perencanaan desa dan perencanaan desa hanya dibuat oleh beberapa orang saja, maka telah terjadi pelanggaran atas hak berpartisipasi warga.⁷³

Hak yang dijamin dalam Undang-Undang Desa tidak akan terwujud apabila warga dan masyarakat tak tahu haknya dan tak tahu bagaimana membuat pemerintah desa sebagai pihak yang mengemban kewajiban benar-benar mewujudkan hak-hak tersebut. Perlu ada kerjasama sinergis atau saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat desa dalam melaksanakan Undang-Undang Desa agar Undang-Undang Desa dapat mencapai tujuannya.⁷⁴

Bagaimana Pendekatan Berbasis Hak Dilaksanakan? Yang bisa dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat desa, di antaranya adalah:

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

1. Memperkuat kapasitas warga, komunitas dan perangkat desa. Warga dalam hal ini adalah pemegang hak, sementara perangkat desa adalah pengemban kewajiban. Penguatan kapasitas ini dimaksudkan agar warga mengetahui dan dapat menuntut haknya, sementara perangkat desa dapat menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga. Penguatan kapasitas warga, komunitas dan perangkat desa dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, di antaranya: (a) memberikan pemahaman tentang hak warga dan kewajiban pemerintah desa untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak warga dan masyarakat, (b) memastikan warga mendapatkan akses atas informasi tentang kebijakan desa yang mempengaruhi kehidupannya, (c) memastikan warga dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa, (d) memastikan adanya upaya peningkatan kapasitas warga, seperti pendidikan dan pelatihan termasuk peningkatan kapasitas berorganisasi dan tersedianya alat/instrumen informasi yang diperlukan (buku, majalah, media komunikasi berbasis teknologi/internet, dan lainnya) yang ramah dan terjangkau oleh warga.
2. Membangun strategi pengembangan kapasitas warga, komunitas, dan perangkat desa melalui berbagai pendekatan, di antaranya: (a) membuat forum dialog yang melibatkan warga (perempuan, kelompok tani, kelompok nelayan, pedagang guru, dan kelompok kepentingan lainnya), pemerintah desa, BPD, perwakilan kelembagaan desa (RT, RW, LKMD, Karang Taruna, PKK, posyandu, lembaga adat atau forum kewargaan lainnya yang ada di desa); (b) mengidentifikasi masalah-masalah desa, menganalisisnya, dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Cara ini dimaksudkan agar masyarakat dan pemerintah desa memahami masalah dan memiliki visi yang sama tentang arah pembangunan desanya; (c) dengan cara tersebut di atas pemerintah dan masyarakat desa dapat menyusun kebijakan dan strategi pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes); (d) mengalokasikan anggaran dan melakukan pemantauan/pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
3. Adanya rencana dan strategi penguatan kapasitas hanya akan berjalan apabila disertai dengan wujud nyata meluasnya ruang-ruang partisipasi warga dan komunitas. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi yang aktif, bebas, dan bermakna. Aktif adalah warga/komunitas bersemangat dan secara terus menerus memberikan sumbangan dalam berbagai bentuk, diantaranya usulan/pendapat, kritikan, dan lainnya, di berbagai forum yang dilakukan di desa. Bebas adalah melibatkan diri atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan, termasuk berani mengatakan “tidak” atas pendapat yang tidak mereka setujui. Bermakna adalah tidak sekadar hadir, tetapi mampu menyuarakan kepentingan (masalah) yang menyangkut diri mereka sendiri dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka. Dalam hal ini memperluas ruang partisipasi “aktif-bebas-bermakna” warga untuk turut berkontribusi, menilai, dan menikmati pembangunan, dapat dilakukan di antaranya dengan cara: (a)

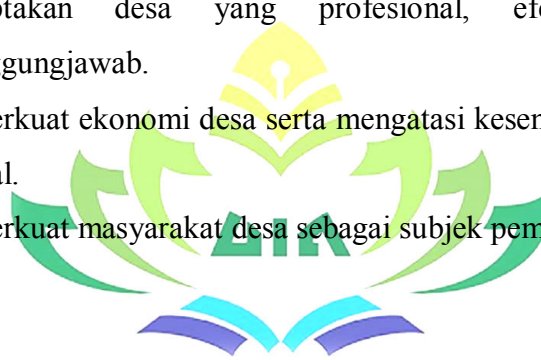
menegaskan bahwa partisipasi adalah hak, (b) membangun dan memperkuat kelembagaan partisipasi warga, (c) membangun mekanisme partisipasi yang memungkinkan warga bisa terlibat secara aktif, bebas, dan bermakna dalam setiap proses kebijakan, program dan proyek pembangunan, (d) mengembangkan inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas partisipasi.

4. Mengembangkan metode/cara mewujudkan prinsip non-diskriminasi dan prioritas pada yang miskin, marjinal dan rentan, di antaranya dengan cara: (a) melakukan identifikasi kelompok miskin, marjinal, dan kelompok rentan yang ada di desa dan membuat pendataan secara terpilah (non-agregat). Data terpilah di antaranya etnis, agama, jenis kelamin, status sosial ekonomi, usia, dan kategori lain yang relevan dengan persoalan pemenuhan hak, (b) menemukan penyebab/akar masalahnya, (c) memprioritaskan program dan proyek pembangunan untuk mengatasi masalah mereka.
5. Salah satu prinsip dari pembangunan berbasis hak adalah akuntabilitas. Artinya bahwa semua kebijakan pemerintah desa dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat, dengan cara: (a) melaksanakan forum musyawarah desa, (b) menyediakan mekanisme komplain dan penyelesaiannya, (c) menyediakan sistem informasi desa, seperti papan informasi, buku/buletin desa, website, dan lainnya.
6. Menerapkan prinsip-prinsip kunci berikut dalam setiap kebijakan, program dan proyek pembangunan:
 - a. warga diakui sebagai aktor kunci pembangunan dan bukan penerima pasif dari layanan dan bantuan,
 - b. partisipasi adalah cara dan sekaligus tujuan,
 - c. pemberdayaan warga sebagai strategi,
 - d. proses dan hasil pembangunan harus dimonitor dan dievaluasi,
 - e. analisis situasi yang melibatkan segenap kelompok kepentingan,
 - f. program difokuskan pada kelompok miskin, marjinal, dan rentan,
 - g. proses pembangunan adalah milik masyarakat lokal,
 - h. pendekatan *top-down* (dari atas) dan *bottom-up* (dari bawah) digunakan secara sinergis (saling melengkapi),
 - i. program diarahkan untuk mengurangi/menghapus kesenjangan sosial-ekonomi,
 - j. analisis situasi digunakan untuk identifikasi penyebab langsung, penyebab pokok, dan akar persoalan dari masalah pembangunan,
 - k. penilaian tujuan dan target penting dalam perancangan program,

1. pelaksanaan program mendukung akuntabilitas terhadap semua kelompok kepentingan.

Selanjutnya yaitu tujuan dari Undang-undang Desa itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
2. Memberikan penghormatan pada desa, bahwa di Indonesia ini terdiri dari banyak desa yang beragam.
3. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum desa berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat desa.
4. Menciptakan desa yang profesional, efektif, efisien dan bertanggungjawab.
5. Memperkuat ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
6. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.⁷⁵



D. Program dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Tegineneng

Program/perencanaan (*planning*) yaitu fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis, perencanaan ini ditunjukkan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan di ketahui pada masa depan. Agar resiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah “memilih”. Artinya memilih tujuan, dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan

⁷⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa: Tata Kelola Keuangan Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 6.

pun tidak ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan.⁷⁶

Sementara itu menurut Jones program adalah terjemahan dari doktrin ke dalam pola-pola tindakan yang nyata dan alokasi dari energi-energi dan sumber-sumber daya lainnya di dalam lembaga itu sendiri dan berhubungan dengan lingkungan ekstern.

Perencanaan menurut Williams, perencanaan adalah proses untuk mengantisipasi dan mengubah sesuatu yang belum terjadi, melihat jauh ke depan, mencari solusi yang optimal, yang dirancang untuk meningkatkan dan idealnya memaksimalkan manfaat pembangunan secara pasti dan yang akan menghasilkan hasil yang diprediksi.

Namun kita sebagai umat muslim memiliki pandangan yang lebih bijak dan relevan daripada pendapat pakar perencanaan tersebut. Islam mengajarkan kita tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam Al- Quran dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindak lanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitupun dengan perencanaan.⁷⁷ Sebagaimana Allah berfirman dalam (QS. Ar-Ra'd:11) yang artinya *"Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"*.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diasumsikan bahwa program adalah seperangkat kegiatan yang akan dilakukan dengan penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia dan menghasilkan manfaat. Dalam merencanakan suatu program harus memiliki karakteristik antara lain, yaitu: (1) Program harus mempunyai batasan yang jelas serta sasaran yang dapat diukur; (2) Program harus dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk mempertimbangkan setiap kegiatan dalam pencapaian sasaran; (3) Program dapat dihitung secara analisis cost benefit.

⁷⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 91.

⁷⁷ Abu Usamah Abdurrahmah, *"Perencanaan Dalam Kaidah Islam"*, <https://islamisone.wordpress.com/2013/01/11/perencanaan-dalam-kaidah-islam/>, (akses internet tanggal 14 Februari 2018, jam 16.28 WIB).

Jadi kecuali mempunyai sasaran yang jelas, program juga harus dapat diukur outputnya. Selain dari pada itu program sendiri terdiri dari berbagai macam, menurut Munir, bahwa program tidak hanya mencakup pada bidang yang luas tetapi juga ruang lingkup, isi, durasi, kejelasan dan spesialisasi program input, kompleksitas tujuan dan kebaruan program yang bermacam-macam :

a. Ruang lingkup

Program kemungkinan memiliki lingkup, daerah, kota, kelompok, atau terbatas pada tempat dan kelompok tertentu. Beberapa program mungkin terpencar pada beberapa tempat dengan perhatian pada suatu hal tertentu.

b. Ukuran (Size)

Program dapat melayani sedikit atau ratusan atau mungkin ribuan bahkan jutaan orang.

c. Durasi

Program dapat berlaku dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, tahun atau mungkin tidak terbatas waktunya.

d. Kejelasan Dan Spesifikasi Program Input

Biasanya program memiliki tingkatan kejelasan. Secara ekstern terdapat program-program tersebar, variabel lebih banyak dan kadang-kadang sulit untuk digambarkan.

e. Kompleksitas Tujuan

Beberapa program dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan secara singkat dan jelas, sementara yang lain dengan tujuan yang lebih kompleks dan lebih sulit untuk didefinisikan dan diukur.

f. Kebaruan Program

Program dikatakan inovatif bila program tersebut pada akhir



pelaksanaannya mampu merubah secara karakteristik kebiasaan yang ada.

Model kesesuaian ini akan dapat berjalan dan berhasil seperti yang diharapkan, apabila di dalam proses pelaksanaan terhadap program Menurut Kuncoro memenuhi tiga kriteria, yaitu:

a. Proses pencairan ADD, yaitu kesesuaian antara apa yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok sasaran dengan apa yang ditawarkan oleh program ini, dimaksudkan bahwa kelompok sasaran akan mendapatkan manfaat dari apa yang ditawarkan oleh program, sehingga kebutuhannya dapat dipenuhi.

b. Pengalokasian ADD kesesuaian antara keputusan-keputusan organisasi pelaksana program dengan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan kelompok sasaran untuk meminta pelayanan program, ini mengacu pada realisasi pelayanan program bagi kelompok sasaran, seperti kegiatan PKK, pembinaan anak dan remaja, kegiatan gotong-royong, belanja perlengkapan.

c. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan berkesinambungan, dinamis, secara sinergis dan mendorong keterlibatan semua potensi, seperti partisipasi jaringan kerja dan keadilan. Program ADD merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagai implementasi program pemerintah yang tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, program ADD ini sebagai suatu program tentunya mempunyai tujuan yang akan dicapai.

Adapun tujuan program ADD, sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis program ADD, yaitu: Pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Tegineneng ini dikelola langsung oleh aparatur desa, kepala desa sebagai penanggungjawab program, sedangkan sekertaris desa sebagai ketua pelaksanaan program untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan program serta pengelolaan di masing-masing desa:

1) Bumi Agung

Luas wilayah di desa Bumi Agung 7,1 km², dengan kepala desa bapak Jamaludin, terdiri dari 10(sepuluh) dusun dan 39 (tiga puluh sembilan) RT, jumlah penduduk 7.288 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan) jiwa, dan 1.928 (seribu sembilan ratus dua puluh delapan) KK. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp. 903.665.386 (Sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).

Proses penentuan program ADD di desa Bumi Agung ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk membiayai program-program yaitu: pembangunan drainase dan gorong-gorong, pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, kegiatan fungsi aperatur pemerintah dan kegiatan sosialisasi susunan organisasi dana tata kerja sebesar Rp 352.429.501 atau sebesar 39%, Belanja pegawai sebesar Rp.542.199.232 atau sebesar 60%.

Serta yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Bumi Agung dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

2) Kejadian

Luas wilayah di desa Kejadian 4,3 km², dengan kepala desa bapak Jaya Sakti, terdiri dari 2 dusun dan 10 RT, jumlah penduduk 1.651 jiwa, dan 834 KK, desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.786.896.514. Proses penentuan program ADD di desa Kejadian ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP).

ADD tersebut digunakan untuk Belanja pegawai dan belanja oprasional penyelenggara pemerintah Rp.464.268.943 atau sebesar 59%. Balanja Modal, Pembangunan gorong-gorong, pembangunan rebet beton desa Kejadian, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian serta sosial budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp. 291.151.711 atau sebesar 37%. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Kejadian dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

3) Batang Hari Ogan

Luas wilayah di desa Batang Hari Ogan 8,09 km², dengan kepala desa bapak Indra Gunawan, terdiri dari 4 dusun dan 13 RT, jumlah penduduk 1.651 jiwa, dan 732 KK, desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.787.153.301. Proses penentuan program ADD di desa Batang Hari Ogan ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dantokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP).

ADD tersebut digunakan untuk Belanja pegawai dan belanja oprasional penyelenggara pemerintah Rp. 464.420.448 atau sebesar 59%. Balanja Modal, Pembangunan gorong-gorong, pembangunan rebet beton desa Batang Hari Ogan, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian serta sosial budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp. 291.246.721 atau sebesar 37%. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Batang Hari Ogan dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

4) Negara Ratu Wates

Luas wilayah di desa Negara Ratu Wates 4 km², dengan kepala desa bapak Saihon Efendi, terdiri dari 2 dusun dan 4 RT, jumlah penduduk 978 jiwa,

dan 249 KK, desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.775.405.121. Proses penentuan program ADD di desa Negara Ratu Wates ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk rekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP).

ADD tersebut digunakan untuk Belanja pegawai dan belanja operasional penyelenggara pemerintah Rp. 457.489.022 atau sebesar 59%. Belanja Modal, Pembangunan gorong-gorong, pembangunan rebet beton desa Negara Ratu Wates, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian serta sosial budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp. 286.899.894 atau sebesar 37%. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Negara Ratu Wates dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

5) Gunung Sugih Baru

Luas wilayah di desa Gunung Sugih Baru 16,2 km², dengan kepala desa bapak Hazairin Bustami, terdiri dari 3 dusun dan 8 RT, jumlah penduduk 1414 jiwa, dan 412 KK, desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp. 777.416.610. Proses penentuan program ADD di desa Gunung Sugih Baru ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk rekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP).

ADD tersebut digunakan untuk Belanja pegawai dan belanja operasional penyelenggara pemerintah Rp. 458.675.800 atau sebesar 59%. Belanja Modal, Pembangunan gorong-gorong, pembangunan rebet beton desa Gunung Sugih Baru, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian

serta sosial budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp. 287.644.145 atau sebesar 37%. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Gunung Sugih Baru dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

6) Gedung Gumanti

Luas wilayah di desa Gedung Gumanti 19,35 km², dengan kepala desa Ibu Rosmayati, terdiri dari 7 dusun dan 19 RT, jumlah penduduk 4482 jiwa, dan 1268 KK, desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp. 921.320.702. Proses penentuan program ADD di desa Gedung Gumanti ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja oprasional penyelenggara pemerintah Rp. 543.579.215 atau sebesar 59%. Balanja Modal, Pembangunan gorong-gorong, pembangunan rebet beton desa Gedung Gumanti, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian serta sosial budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp 340.888.660 atau sebesar 37%. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Gedung Gumanti dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

7) Kresno Widodo

Luas wilayah di desa Kresno Widodo 10,08 km², dengan kepala desa bapak Suprpto, terdiri dari 5 dusun dan 18 RT, jumlah penduduk 4405 jiwa, dan 1465 KK, desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp. 828.648.115. Proses penentuan program ADD di desa Kresno Widodo ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta

di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja oprasional penyelenggara pemerintah Rp. 488.902.388 atau sebesar 59%. Balanja Modal, Pembangunan gorong-gorong, pembangunan rebet beton desa Kresno Widodo, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian serta sosial budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp 306.599.803 atau sebesar 37%. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Kresno Widodo dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

8) Sinar Jati

Luas wilayah di desa Sinar Jati 7,18 km², dengan kepala desa bapak Imam Sunarto, terdiri dari 5 dusun dan 8 RT, jumlah penduduk 1183 jiwa, dan 689 KK, desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp. 795.207.098. Proses penentuan program ADD di desa Sinar Jati ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja oprasional penyelenggara pemerintah Rp. 469.172.188 atau sebesar 59%. Balanja Modal, Pembangunan gorong-gorong, pembangunan rebet beton desa Sinar Jati, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian serta sosial budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp 294.226.627 atau sebesar 37%. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Sinar Jati dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

9) Margo Rejo

Luas wilayah di desa Mago Rejo 10,08 km², dengan kepala desa bapak Sapuan, terdiri dari 7 dusun dan 16 RT, jumlah penduduk 4370 jiwa, dan 1290 KK, desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp. 863.789.374. Proses penentuan program ADD di desa Margo Rejo ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja oprasional penyelenggara pemerintah Rp. 509.635.731 atau sebesar 59%. Balanja Modal, Pembangunan gorong-gorong, pembangunan rebet beton desa Margo Rejo, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian serta sosial budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp 319.602.069 atau sebesar 37%. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Margo Rejo dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

10) Gerning

Luas wilayah di desa Gerning 8,66 km², dengan kepala desa Ibu Eko Wahyuningsih, terdiri dari 7 dusun dan 18 RT, jumlah penduduk 3905 jiwa, dan 1126 KK, desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp. 804.372.786. Proses penentuan program ADD di desa Gerning ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja oprasional penyelenggara pemerintah Rp. 474.579.950 atau sebesar 59%. Balanja Modal, Pembangunan gorong-gorong, pembangunan rebet beton desa Gerning, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian serta sosial

budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp 297.617.935 atau sebesar 37%. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Gerning dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

11) Panca Bakti

Luas wilayah di desa Panca Bakti 4,53 km², dengan kepala desa Ibu Enci Mintarsih, terdiri dari 3 dusun dan 9 RT, jumlah penduduk 1614 jiwa, dan 417 KK, desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.814.753.368. Proses penentuan program ADD di desa Panca Bakti ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja oprasional penyelenggara pemerintah Rp. 480.704.488 atau sebesar 59%. Balanja Modal, Pembangunan gorong-gorong, pembangunan rebet beton desa Panca Bakti, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian serta sosial budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp 301.458.747 atau sebesar 37%. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Panca Bakti dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

12) Margo Mulyo

Luas wilayah di desa MargoMulyo 6,957 km², dengan kepala desa bapak Marsono, terdiri dari 6 dusun dan 24 RT, jumlah penduduk 4090 jiwa, dan 1219 KK, desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp. 832.339.575. Proses penentuan program ADD di desa Margo Mulyo ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim

Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja oprasional penyelenggara pemerintah Rp. 491.080.349 atau sebesar 59%. Balanja Modal, Pembangunan gorong-gorong, pembangunan rebet beton desa Margo Mulyo, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian serta sosial budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp 307.965.643 atau sebesar 37%. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Margo Mulyo dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

13) Rejo Agung

Luas wilayah di desa Rejo Agung 10,08 km², dengan kepala desa bapak Mungalim, terdiri dari 5 dusun dan 18 RT, jumlah penduduk 2325 jiwa, dan 1465 KK, desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp. 886.585.804. Proses penentuan program ADD di desa Rejo Agung ini, melalui proses musyawarah antara aperatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja oprasional penyelenggara pemerintah Rp. 523.085.624 atau sebesar 59%. Balanja Modal, Pembangunan gorong-gorong, pembangunan rebet beton desa Rejo Agung, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian serta sosial budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp 328.036.748 atau sebesar 37%. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Rejo Agung dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

14) Kota Agung

Luas wilayah di desa Kota Agung 10,08 km², dengan kepala desa bapak

Khoirul Ahmad, terdiri dari 5 dusun dan 18 RT, jumlah penduduk 4209 jiwa, dan 1965 KK, desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp. 828.648.115. Proses penentuan program ADD di desa Kota Agung ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk rekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja operasional penyelenggara pemerintah Rp. 473.637.982 atau sebesar 59%. Belanja Modal, Pembangunan gorong-gorong, pembangunan rebet beton desa Kota Agung, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian serta sosial budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp 297.027.210 atau sebesar 37%. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Kota Agung dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

15) Trimulyo

Luas wilayah di desa Trimulyo 10,07 km², dengan kepala desa bapak Bambang Iskandar, terdiri dari 9 dusun dan 29 RT, jumlah penduduk 5845 jiwa, dan 1477 KK, desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp. 861.801.446. Proses penentuan program ADD di desa Trimulyo ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk rekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja operasional penyelenggara pemerintah Rp. 508.462.853 atau sebesar 59%. Belanja Modal, Pembangunan gorong-gorong, pembangunan rebet beton desa Trimulyo, kegiatan

pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian serta sosial budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp 318.866.535 atau sebesar 37%. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Trimulyo dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

16) Sriwedari

Luas wilayah di desa Sriwedari 6,06 km², dengan kepala desa bapak Warsito, terdiri dari 4 dusun dan 12 RT, jumlah penduduk 3559 jiwa, dan 714 KK, desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.792.731.791. Proses penentuan program ADD di desa Sriwedari ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah di musyawarahkan serta di susun, dan dana sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPT).

ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja operasional penyelenggara pemerintah Rp. 467.711.757 atau sebesar 59%. Belanja Modal, Pembangunan gorong-gorong, pembangunan rebet beton desa Sriwedari, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian serta sosial budaya masyarakat dan kelompok tani sebesar Rp 293.310.762 atau sebesar 37%. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Sriwedari dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pesawaran.

Menurut Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi dana alokasi khusus dan di bagi untuk setiap desa secara propesional.

Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 pasal 100

tentang belanja alokasi dana desa untuk ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari ADD digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, oprasional pemerintah desa, tunjangan dan oprasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW.

Pengelolaan ADD mengacu pada asas:

- a. Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
- b. Asas adil adalah besarnya alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan), selanjutnya disebut alokasi dana propesional.

Besarnya presentase perbandingan atas asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah besarnya ADDM adalah 60 % (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besaran ADDP adalah 40 % (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.

Dari data yang di kumpulkan oleh penulis di ketahui bahwa besaran alokasi dana desa di Kecamatan tegineneng di setiap desanya tahun 2017 berkisar antara Rp 775.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) s/d Rp 903.665.386 (Sembilan ratus tiga juta enam ratus enam puluh lima tiga ratus delapan puluh enam rupiah) per tahun, sudah termasuk anggaran untuk aperatur desa, yang diberikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan.

Sedangkan program untuk penggunaan alokasi dana desa di Kecamatan

Tegineneng Kabupaten Pesawaran yaitu untuk pembangunan, gorong-gorong, pembangunan rabat beton, drainase, Pembangunan TPT , untuk bantuan oprasional lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kemasyarakatan, kegiatan pembinaan, kesenian dan sosial budaya masyarakat, kelompok tani, belanja pegawai, biaya musyawarah, kegiatan PKK, LPM dan sisanya untuk oprasional desa yaitu alat tulis, perlengkapan kantor lainnya, dan hanya ada 6 desa dari 16 desa yang programnya untuk pemberdayaan ekonomi yaitu desa Kejadian, Gerning, Kresno Widodo, Trimulyo, Sriwedari dan Sinar Jati namun belum terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan program ADD di Kecamatan Tegineneng ini program dan pengalokasian dana desa masing-masing desa hanya berfokus pada pembangunan balai desa dan gorong-gorong dan tunjangan untuk aperatur desa, sedangkan prasarana yang lain belum tersentuh seperti pembangunan sanitasi (prilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih), yang lebih dibutuhkan masyarakat belum ditangani dengan baik walaupun sudah ada di desa Kota Agung yang membangun wadiah air bersih, tetapi itu pun masih sangat jauh dari kata mencukupi untuk kebutuhan masyarakat karena terkendala dengan dana ADD yang minim.

Selain terkendala dengan dana ADD yang kurang, dana yang diperoleh hanya di fokuskan untuk oprasional desa, belanja aperatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ini untuk belanja aperatur desa sebesar 60% dan untuk kegiatan ekonomi hanya terlihat dari persentasi penggunaan alokasi dana desa antara 35%-45%, seperti desa Trimulyo 40%.

Diantara 16 desa di Kecamatan Tegineneng yang paling baik diantara desa yang lain yaitu desa Gerning, karena selain baik secara administratif maupun pengelolaan di lapangan, baik pula dalam pembagian alokasi dana desa untuk masing-masing pos, seperti pembangunan fisik, bantuan lembaga masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun oprasional desa sudah sesuai dengan peraturan pemerintah sebagaimana mestinya. Desa yang memiliki program

pemberdayaan masyarakat yaitu di 9 desa yaitu: Sriwedari, Trimulyo, Gerning, Sinar Jati, Kresno Widodo, Gunung Sugih Baru, Negara Ratu Wates, Kejadian dan Margo Mulyo Padang sedangkan di 7 desa yaitu: Margo Rejo, Bumi Agung, Kota Agung, Rejo Agung, Batang Hari Ogan, Panca Bakti dan Gedung Gumanti ADD hanya digunakan untuk pembangunan fisik, belanja oprasional desa dan BPD. Sedangkan berdasarkan UU no 6 tahun 2014 pasal 78, tujuan dari program ADD adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.
- 4) Meningkatkan pengamalan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong toyong masyarakat.
- 7) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Akan tetapi jika dilihat dari pelaksanaan alokasi dana desa di Kecamatan Tegineneng, tujuan program alokasi dana desa ini belum tersentuh secara menyeluruh. Dari tujuan ADD yang baru dirasakan oleh masyarakat yaitu pembangunan insfrastruktur desa, dan peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial, ini terlihat dari program-program di desa yang di alokasikan untuk ibu-ibu PKK yang digunakan untuk pengajian seperti desa Rejo Agung, Gedung Gumanti, Margo Rejo, Bumi Agung. Untuk pembangunan infrastrukturnya yaitu Trimulyo, Gerning, Margo Mulyo, Sriwedari, Sinar Jati, Gunung Sugih Baru, Kejadian, Negara Ratu Wates dan Kresno Widodo.

Peningkatan pendapatan desanya yaitu Sinar Jati, Gerning dan Trimulyo.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa tujuan dari program alokasi dana desa di Kecamatan Tegineneng ini yang dapat dikatakan tercapai yaitu peningkatan pembangunan insfrastruktur, dan peningkatan pengamalan nilai-nilai kegaamaan sosial budaya. Sedangkan peningkatan pendapatan desa dan masyarakat belum tercapai secara menyeluruh, karena terkendalanya dana yang kurang dan ketidak sesuaian program yang di susun oleh pemerintahan desa setempat. Aperatur desa belum memprioritaskan kegiatan ekonomi produktif sebagai salah satu program dari alokasi dana desa, aperatur desa lebih memprioritaskan pembangunan gorong-gorong dan sinitasi air bersih yang sangat kurang sehingga itu menjadi kebutuhan masyarakat setempat.

E. Dampak ADD 2017 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang diadakan dan di susun oleh pemerintah, maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilakukan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya masyarakat dimana masyarakat dapat dikatan sejahtera atau tidak sebagai indikator-indikatornya yaitu: tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, komposisi pengeluaran masyarakat, dan tingkat perumahan masyarakat yang menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat dalam program ADD. Maka berdasarkan hal tersebut dapat dilihat dari tabel 13 dibawah ini:

Tabel 13
Indikator Kesejahteraan Sebelum ada ADD tahun 2017 dan
Sesudah ada ADD

Indikator	Sebelum ada ADD tahun 2017	ADD 2017	Keterangan
Tingkat Pendidikan	50 %	50 %	Tidak Mengalami peningkatan
Tingkat Kesehatan	Persalinan tangan medis 95 %	95 %	Tidak Mengalami peningkatan
Tingkat Pendapatan Masyarakat	Rp 1.000.000 s/d Rp 1.900.000	Rp 1.000.000 s/d Rp 2.200.000	Mengalami peningkatan
Pengeluaran Masyarakat	Rp 800.000	Rp 800.000	Tidak Mengalami peningkatan
Tingkat Perumahan	65 %	80 %	Mengalami peningkatan 15 %
Insfratraktur gorong-gorong	40 %	85 %	Mengalami peningkatan 45 %

Sumber: Hasil Kesimpulan wawancara kepala desa Tegineneng

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri dengan tidak memerlukan bantuan orang lain.

Masyarakat Kecamatan Tegineneng jika ditinjau dari laterbelakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar sembilan tahun, bahkan ada masyarakat yang meneruskan kejenjang SMA, dan S1. Tetapi hampir 50%

masyarakat Kecamatan Tegineneng berpendidikan SMA.

Dampak adanya program ADD di Kecamatan Tegineneng pada bidang pendidikan belum dapat di rasakan oleh masyarakat sekitar, dikarenakan pengalokasian dana tersebut belum dialokasikan ke pendidikan.

Sekalipun program ADD tersebut belum dirasakan langsung oleh masyarakat namun tidak menjadikan masyarakat putus sekolah karena adanya bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu yang diberikan oleh pemerintah.

2. Tingkat Kesehatan

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis. Indikator kesehatan yang menjadi komponen kesejahteraan yaitu terpenuhinya pangan, sandang, dan kesehatan sehari-hari.

Dari program alokasi dana desa untuk kesehatan yaitu pembuatan gorong-gorong dan sanitasi air bersih yang dilakukan di desa Trimulyo, Gerning, Margo Mulyo, Sriwedari, Sinar Jati, Gunung Sugih Baru, Kejadian, Negara Ratu Wates dan Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng dengan pembuatan gorong-gorong tersebut sanitasi kesehatan akan lebih sehat dan telah mensejahterakan masyarakat di tingkat kesehatan.

Masyarakat Kecamatan Tegineneng dalam pemenuhan gizi sudah tercukupi, hal ini terlihat dari kecukupan akan makan yang di konsumsi oleh masyarakat. Selain itu juga Masyarakat Kecamatan Tegineneng dalam penanganan ibu melahirkan sudah sangat sedikit menggunakan tabib atau dukun bayi, sehingga angka kematian dan ibu melahirkan tidak ada.

Masyarakat Kecamatan Tegineneng yang memiliki masalah kesehatan lebih memilih berobat ke puskesmas, puskesmas dan bidan. Serta pola makanan dan kebutuhan kalori juga terpenuhi dengan baik sehingga jarang ada warga yang sakit karena kekurangan asupan makanan.

3. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang bersal dari pendapatan kepala rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material. Menurut Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang (SKPMP) 2017 tingkat pendapatan perbulan dikatan sejahtera adalah lebih dari Rp.500.000.

Adanya ADD ini tidak memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat, ini karena program ADD serta pengelolaan di Kecamatan Tegineneng kurang memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat, di Kecamatan Tegineneng ini yang menggunakan untuk kegiatan pemberdayaan yaitu: Rejo Agung, Gedung Gumanti, Margo Rejo, Bumi Agung. Desa Trimulyo, Gerning, Margo Mulyo, Sriwedari dan Sinar Jati adalah desa yang memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa kelompok tani, kerajinan tangan oleh ibu PKK namun pengelolaanya belum dikelola dengan baik sehingga secara ekonomi belum dapat memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Seharusnya dari program ADD digunakan untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan pembuatan industri rumah tangga kreatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.⁷⁸

4. Komposisi Pengeluaran

Pola konsumsi rumahtangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, maka semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makan pada seluruh pengeluaran rumah tangga. Dapat dikatan bahwa rumah tangga sejahtera bila presentase pengeluaran makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan prerentase pengeluaran untuk non makanan atau <80% dari pendapatan.

Meskipun tingkat pendapatan masyarakat tidak menentu karena

⁷⁸ Syahrudin, *Wawancara*, Camat Tegineneg, 17/02/2018.

masyarakat di Kecamatan Tegineneng mayoritas petani yang mengandalkan musim panen. Namun, jika pendapatan mereka tinggi maka konsumsi dapat tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan mereka semakin sedikit, maka hanya untuk kebutuhan pangan saja. Umumnya pengeluaran konsumsi berkisar Rp.20.000-30.000 perhari. Ini belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan perumahan serta pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

5. Tingkat Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10m dan bagian terluas rumah bukan tanah, dan status pengusaan tempat tinggal milik sendiri.

Bentuk bangunan rumah masyarakat Kecamatan Tegineneng sebesar 65% permanen, 25% semi permanen atau masih berbentuk rumah adat, 10% adalah dalam keadaan non permanen, dan seluruh status kepemilikan adalah milik sendiri. Sedangkan MCK warga juga 75% yang memiliki sanitasi yang baik selebihnya hanya MCK seadanya. Keadaan penerangan 95% warga sudah menggunakan listrik, dan sekitar 5% warga belum memiliki KWH sendiri.

Apabila dilihat dari indikator perumahan, warga belum dikatakan sejahtera karena luas bangunan belum memenuhi kategori sejahtera. Beberapa indikator yang telah dijelaskan, telah menunjukkan bahwa ADD berdampak positif bagi masyarakat sekitar seperti tidak harus menggunakan air sungai lagi untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sekalipun belum dapat memenuhi 100% kebutuhan air bersih.

Jika dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang ada, beberapa indikator kesejahteraan ini belum terpenuhi dengan baik, oleh program alokasi dana desa di Kecamatan Tegineneng, hanya indikator tingkat kesehatan yang mengalami peningkatan cukup baik dari program alokasi dana desa ini seperti sudah ada program untuk saluran sanitasi dan pembuatan gorong-gorong sehingga masalah saluran sanitasi menjadi lebih baik dan lebih sehat. Tingkat

pendidikan masyarakat belum terlihat dampak positif dari program alokasi dana desa, karena program yang berhubungan dengan pendidikan belum menyentuh masyarakat, sekalipun tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Tegineneng hampir 50% yang lulus SMA bahkan ada yang sampai keperguruan tinggi. Itu bukan karena program yang ada di Kecamatan Tegineneng namun karena batuan pendidikan yang digalakan oleh Kabupaten Pesawaran.

Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendapatan masih belum dapat dikatakan sejahtera, oleh karena itu peran pengelolaan alokasi dana desa yang tepat sangat di nantikan oleh masyarakat demi perubahan kondisi ekonomi sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat.



BAB IV

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PANDANGAN ETIKA ISLAM

A. Pembangunan Berbasis Etika Islam

Untuk memahami konsep etika Islam dalam pembangunan berkelanjutan tentu harus menggunakan pemahaman yang mendalam, dan juga harus dapat dibuktikan dengan penelitian, karena Islam tidak telalu membahas begitu detail terkait dengan pembangunan.

Konsep etika Islam dalam pembangunan bersifat material dan spiritual, yang mencakup pula pembangunan sumber daya manusia (SDM), sosial, budaya, ekonomi dan lainnya. Dalam hal lain dampak pembangunan dalam etika Islam adalah menyeluruh sebagai konsepsi Islam sebagai agama yang menyeluruh. Bukan hanya ekonomi yang bersifat material tetapi juga pembangunan nonmaterial yang bersifat spiritual, akhlak, sosial dan kebudayaan.

Konsep etika Islam memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukkan pada aturan Allah. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuanNya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus wakil Allah di bumi bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan dengan baik dan sukses sangat bergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan.

Kualitas SDM pelaku pembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan di suatu negara. Karena itu SDM sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Disinilah letak peran negara. Dimana pemerintah sebagai manajer dan pelayan pembangunan harus mampu memetakan semua

potensi SDM dan sumber daya alam (SDA) untuk dikelola dengan maksimal, guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dalam rentang dunia akhirat. Artinya skala waktu pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia tanpa mengorbankan kehidupan akhirat pelaku pembangunan.

B. Peran Etika Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan

Perubahan dan paradigma baru atas desa itu sangat penting mengingat kondisi objektif dan dinamika desa-desa di Indonesia yang secara umum masih memprihatinkan. Desa identik dengan ketertinggalan dalam semua aspek kehidupan. Kewenangan mengatur dan mengurus dirinya sendiri yang dibarengi dengan memberikan hak-hak desa, sehingga desa memiliki kemampuan finansial yang memadai guna melaksanakan kewenangannya, sebagaimana ditegaskan Undang-undang Desa, menjadi faktor penggerak peningkatan pembangunan desa yang sekaligus menjadi ruang krusial implementasi Undang-undang Desa.

Pembangunan desa sebagai sistem yang dikonstruksi Undang-undang Desa, menempatkan masyarakat pada posisi strategis, sebagai subjek pembangunan, dengan demikian, masyarakat memiliki ruang dan peran strategis dalam tata kelola desa, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan desa. Isu penting dalam konteks ini adalah peningkatan keberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya desak yang efektif untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik dan penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangannya yaitu proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.

Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan ataupun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan dibidang sosial, politik, atau pun pembangunan ekonomi masyarakat. ADD adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).⁷⁹

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional riil dan meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi selalu di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan.⁸⁰ Dengan berdasarkan pendekatan bahwa pembangunan didasarkan pada pembangunan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang. Dalam hal ini pembangunan desa mengutamakan prinsip imbang kewajiban yang serasi antara keduanya, yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat yang memberikan partisipasi dalam pembangunan berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan.⁸¹

⁷⁹ Loncolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 31.

⁸⁰ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dan Bina Grafika, 1999) h. 14.

⁸¹ Kansil dan Cristine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: SinarGrafika, 2002), h. 3.

Melihat dari arti hakiki pembangunan, pada dasarnya menekankan pada aspek nilai-nilai kemanusiaan, seperti menunjang kelangsungan hidup atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, harga diri atau adanya perasaan yang layak menghormati diri sendiri dan tidak menjadi alat orang lain, kebebasan atau kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan. Selain itu, arti pembangunan yang paling dalam adalah kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya, yang mencakup kapasitas, keadilan, penumbuhan kuasa dan wewenang.

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakekatnya adalah suatu proses pembalikan paradigma politik, dimana proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas, kemudian dibalik melalui proses yang berangkat dari desa. Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang berperan sebagai aktor. Maka dari itu dapat diawali dengan rasa penuh tanggungjawab, keikhlasan mengemban amanah, jujur dalam bertindak sehingga berbuah konkrit implementasi pembangunan yang sebagaimana dicita-citakan.⁸²

Berkaca dari pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang di programkan Negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dan Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi istilah yang lebih menonjol “Pemberdayaan

⁸² Syahrudin, *Wawancara*, Camat Tegineneng, 19/02/2018.

Masyarakat Desa (PMD)”. Pada masa orde baru secara substensial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat top-down, pada era reformasi secara substensial pembangunan desa lebih kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantara Program Inpres Desa Tertinggal dan bantuan masyarakat tertinggal. Program pembangunan desa lebih bersifat botten-up atau kombinasi top-down dan botten-up. Program pembangunan desa yang bersifat botten-up tertuang dalam undang-undang Otonomi Daerah (OTDA).

Franz Magnis Suseno memberikan pendapatnya bahwa pembangunan hanya dapat mempertahankan mutu manusiawinya apabila dilandasi oleh sikap hormat terhadap manusia, bukan hanya manusia terhadap abstraksi, sebagai suatu paham filosofis, melainkan terhadap segenap manusia konkret yang hidup dalam wilayah yang terkena pembangunan itu. Hormat terhadap manusia berarti mengakui kedudukannya yang sama, tidak melakukannya sebagai obyek perencanaan, berorientasi pada harapan-harapannya, tidak pernah mengorbankan pihak yang satu demi keuntungan pihak yang lain, tidak membela kemajuan dengan menyengsarakan yang lain.⁸³

Masih dalam segi isi UU Desa, dikatakan bahwa setiap desa akan mendapatkan dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling sedikit 10 persen setiap tahunnya. Maka, dapat diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.2 hingga 1.4 miliar setiap tahunnya. Berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU Desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia.

⁸³ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Gramedia, 1986), h.18.

Total dana yang sangat fantastis itu, tidak mustahil akan diselewengkan oleh perangkat desa yang tidak bertanggungjawab. Maka, penting adanya pengawasan, dalam hal ini adalah tugas BPD dan pemerintah daerah setempat, yang dilakukan secara berkala terhadap setiap desa agar pembangunan desa lebih tepat sasaran. Masalah lainnya juga akan timbul, yaitu adanya perbedaan-perbedaan keadaan atau kondisi desa yang ada di Indonesia. Ada desa yang memang sudah mandiri dan sudah mampu menyejahterakan masyarakatnya dengan berbagai cara sebelum lahirnya UU Desa. Akan tetapi, ada pula desa yang tertinggal dan masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jika nantinya akan dikucurkan dana alokasi tersebut, dikhawatirkan akan mubazir bagi desa maju dan akan tetap merasa kekurangan bagi desa tertinggal. Sekali lagi, peran pengawasan sangat diharapkan mampu mengawasi penggunaan dana alokasi tersebut agar dana alokasi tersebut tepat sasaran sesuai kebutuhan dan keperluan masing-masing desa.⁸⁴

Dihadapkan lagi masa jabatan kepala desa juga mungkin saja akan menjadi permasalahan. Pada UU Desa, dijelaskan masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 3 periode, boleh berturut-turut atau tidak. Masa jabatan yang tergolong lama ini, ditakutkan akan lahir “raja-raja kecil” di desa. Terlebih lagi, dengan kewenangan yang diberikan pada setiap kepala desa cukup bebas dan keuntungan-keuntungan menjadi kepala desa yang dapat menggiurkan bagi setiap orang, memungkinkan seseorang dengan segala cara agar dapat menduduki jabatan sebagai kepala desa. Untuk itu, masyarakat desa harus jeli memilih kepala desa yang memang berkompeten dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di desanya. Dengan menggunakan pemilihan secara langsung, masyarakat desa diharapkan mampu menetapkan orang-orang terbaik di desanya pada setiap posisi di perangkat desanya, terlebih pada posisi kepala desa. Tingkatan kepedulian masyarakat desa dalam berdemokrasi, secara tidak langsung, juga akan berpengaruh dalam pembangunan-pembangunan di wilayahnya. Penempatan orang baik dan memang mampu mengatasi permasalahan desa pada tingkat kepala desa, pastilah akan berdampak

⁸⁴ Nyoto Prayitno, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Desa Trimulyo, 19/02/2018.

positif dalam perubahan-perubahan yang terjadi ke depannya. Sebaliknya, jika salah memilih, bukan malah mengatasi permasalahan tetapi akan menimbulkan permasalahan baru yang mungkin lebih besar lagi.

Salah satu elemen penting dalam pembangunan adalah *stakeholders*. *Stakeholders* adalah mereka yang tinggal di desa, pihak yang merencanakan, mengontrol dan mengevaluasi terkait dengan semua proses pembangunan yang berkelanjutan. Target dari pembangunan pun pada akhirnya ditujukan pada *stakeholders* itu sendiri.

Islam merupakan agama yang mengajarkan akhlak yang begitu sempurna mulai dari kejujuran, tidak egois, kedisiplinan, patuh kepada pemimpin, patuh kepada semua peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan agama. Etika Islam mengajarkan untuk menggantungkan keinginan terbesarnya kepada akhirat sehingga setiap *stakeholders* dalam pembangunan selalu mengambil celah agar setiap tindakannya mendapat ridho dari Allah.⁸⁵

Mereka yang berperan sebagai subjek pembangunan akan mengimplementasikan pembangunan yang sebaik-baiknya yang dapat menguntungkan manusia, dan berusaha menghindari sekelumit permasalahan yang diprediksikan akan terjadi. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk menindas sebagian *stakeholders* karena Islam mengajarkan tentang etika, keadilan dan kemaslahatan umat manusia.⁸⁶

Selanjutnya, perlu ditanamkan dalam pribadi bahwa tidak ada sedikitpun keinginan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari program pembangunan yang dilakukan dengan menggantungkan beberapa pihak yang bertentangan dengan undang-undang sebagai sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam pembangunan, karena Islam mengajarkan kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur dan menjaga etikanya sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur.

⁸⁵ Johan, *Wawancara*, Tokoh Agama Desa Gunung Sugih Baru, 19/02/2018.

⁸⁶ Imam Sunarto, *Wawancara*, Kepala Desa Sinar Jati, 19/02/2018.

Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta dan tidak menjaga etikanya maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta.⁸⁷

Mereka yang berperan sebagai pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan (pemerintah) akan melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tidak sedikitpun memanfaatkan jabatan dengan cara-cara yang batil, karena etika Islam mengajarkan untuk amanah dalam setiap aktifitas yang diperbuat, karena pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin.⁸⁸

Mereka yang berperan sebagai masyarakat akan patuh kepada semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ketika pemerintah melarang demikian maka masyarakat pun patuh selama bukan dalam perintah kemaksiatan.

Demikianlah, etika Islam mengajarkan pribadi setiap manusia dalam setiap seluk-beluk kehidupan manusia. Apabila etika Islam dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam pembangunan berkelanjutan implementasi undang-undang desa, maka desa yang terbentuk pun akan menjadi sebaik-baiknya desa. Karena pada hakikatnya desa dinilai dari bagaimana sikap dan tingkah laku masyarakat yang hidup didalamnya.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Abdul Rohim, *Wawancara*, Tokoh Adat Desa Rejo Agung, 19/02/2018.

C. Aktualisasi Etika Islam dalam Pembangunan di Tegineneng

Penguatan kelembagaan dapat diperkuat melalui desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada pemerintah lokal dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang adaptif dengan kebutuhan lokal. Dengan desentralisasi proses pembelajaran sosial dan pertukaran pengalaman diantara para pemangku kepentingan dapat mendukung pengembangan kapasitas institusi lokal, keahlian aktor dan lembaga lokal, serta jejaring sosial. Secara fakta di lapangan, desentralisasi pembangunan di tingkat lokal telah lama didukung oleh hasil pengujian empirik.

Menurut Raizalmli tokoh adat desa Batang Hari Ogan, implementasi pembangunan dengan berdasarkan etika Islam di tingkat lokal dapat memperluas manfaat pembangunan di wilayah pedesaan khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi populasi masyarakat miskin yang sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan. Disamping perluasan manfaat ekonomi, desentralisasi pembangunan desa juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, akuntabilitas dan responsivitas pemerintahan desa, dan penguatan kapasitas lembaga lokal yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kejujuran.⁸⁹

Berdasarkan penelusuran, terungkap bahwa kebijakan implementasi sebenarnya membawa implikasi positif seperti penguatan demokrasi maupun pengurangan kesenjangan wilayah. Namun demikian, ada pula dampak negatifnya yaitu tidak dapat menjangkau penduduk yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan pasar. Hal menarik adalah sebelumnya belum satupun yang menyoroti dampak desentralisasi di level pedesaan terhadap level pemerintahan yang setara dengan desa seperti kelurahan dalam konteks Indonesia. Kasus empirik ini menjadi semakin menarik ketika kebijakan dana desa memberikan manfaat ekonomi dan politik yang besar terhadap desa, namun tidak diikuti dengan penguatan lembaga kelurahan. Dengan demikian, yang diajukan ini memiliki

⁸⁹ Raizalmli, *Wawancara*, Tokoh Adat Desa Batang Hari Ogan, 20/02/2018.

tingkat kebaruan yang tinggi untuk memberikan penjelasan terhadap dampak implementasi pembangunan dan berpengaruh terhadap etika kelembagaan.⁹⁰

Adapun fungsi kelurahan berdasarkan kewenangannya adalah: a) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b) pemberdayaan masyarakat; c) pelayanan masyarakat; d) penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; e) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f) pembinaan lembaga kemasyarakatan. Kinerja layanan pemerintahan lembaga kelurahan diukur dari aktivitas layanan: (1) Legalisasi layanan publik; (2) Layanan barang dan jasa; (3) Penyusunan rencana kerja Kelurahan; (4) Serapan Anggaran; (5) Penyusunan LAKIP. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa secara umum layanan pemerintahan kelurahan telah dilakukan secara baik. Data dokumentasi menunjukkan bahwa layanan legislasi layanan publik seperti pengesahan surat pengantar pengurusan KTP, KK dan sejenisnya telah dilakukan sesuai prosedur dengan ketepatan waktu layanan dan biaya yang dikeluarkan telah sesuai dengan SOP yang ditetapkan.⁹¹ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat secara umum menyebutkan bahwa layanan yang diberikan oleh aparat kelurahan cukup memuaskan.

Kinerja layanan pembangunan yang dilakukan oleh aparat desa diukur dari aktivitas layanan yaitu: (1) Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, (2) Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, (3) Pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengawasan pembangunan.⁹² Hasil wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan belum berjalan dengan baik. Kegiatan Musrenbang memang telah berjalan, namun baru sebatas pada tataranfor mal. Kegiatan dilakukan karena tuntutan pertanggungjawaban administrasi semata. Dari sisi pelaksanaan pembangunan, kinerja aparat kelurahan masih menunjukkan kinerja yang rendah. Penyediaan fasilitas umum dan sosial di lingkungan kelurahan belum dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah seperti jalan lingkungan, saluran

⁹⁰ Ahmad Hamdani Septriansyah, *Wawancara*, Tokoh Pemuda Desa Sinar Jati, 20/02/2018.

⁹¹ Solich Saadi Mardiyah, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Desa Kejadian, 20/02/2018.

⁹² Meli Putri Yuningsih, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Desa Rejo Agung, 20/02/2018.

irigasi sangat tidak memadai. Peran lembaga kelurahan dalam penyediaan utilitas seperti penyediaan jaringan air untuk mengairi sawah, listrik dan komunikasi juga sangat kurang. Dari aktivitas layanan bidang pembangunan yang diberikan menunjukkan bahwa kinerja layanan aparatur kelurahan pada bidang pembangunan fisik masih menunjukkan kinerja yang buruk.⁹³

Beberapa kelurahan di kecamatan Tegineneng masih belum mampu menghasilkan kinerja kelurahan yang optimal. Hal tersebut disebabkan kewenangan yang diberikan oleh bupati belum mampu mendukung peningkatan kapasitas kelurahan sebagai fungsi pelaksana sebagian tugas otonomi daerah. Beberapa hasil kinerja seperti pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, administrasi pemerintahan belum berjalan efektif. Kewenangan yang dimaksud dalam konteks penyelenggaraan kegiatan di kelurahan adalah bahwa kelurahan diberikan hak untuk membuat berbagai kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat, mengelola pendapatan dan sumber daya manusia.⁹⁴

Persoalan anggaran menjadi faktor yang juga sangat menentukan kinerja organisasi. Anggaran diibaratkan seperti aliran darah dalam tubuh manusia. Tanpa anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tidak akan dapat berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil FGD, anggaran menjadi persoalan penting yang menyebabkan masih belum optimalnya kinerja desa.⁹⁵ Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa desa masih merasakan anggaran yang diterima jauh dari memadai baik dari sisi jumlah dan kesesuaian. Meskipun desa telah mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat di setiap tahun, namun dari aspek kesesuaian dengan kebutuhan ternyata beberapa kegiatan yang dilaksanakan di desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila dilihat dari anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan kepada desa cenderung seragam antara satu desa dengan desa lainnya. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa desa memang tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan. Hal tersebut

⁹³ Jaya Sakti, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Desa Kejadian, 20/02/2018.

⁹⁴ Sugiyana, *Wawancara*, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegineneng, 20/02/2018.

⁹⁵ Haryoto, *Wawancara*, Sekretaris Kecamatan Tegineneng, 20/02/2018.

menyebabkan banyak desa yang tidak optimal dalam menyelesaikan persoalan riil yang terjadi di masyarakat. Selama ini proses musrembang hanya berjalan secara formalitas karena usulan kegiatannya seringkali tidak diakomodasi oleh pemerintah kabupaten.

Keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi juga berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas akan menentukan kinerja organisasi, dalam hal ini adalah desa. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam kajian ini adalah aparatur desa.⁹⁶

Permasalahan yang dihadapi oleh desa dalam menghasilkan kinerja yang optimal adalah masih kurangnya kemampuan personel aparatur desa dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Berdasarkan hasil penulis temukan bahwa di beberapa desa telah terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan tupoksi yang dilaksanakan.⁹⁷ Terungkap juga problem perangkat desa mencakup dua hal, yaitu: (1) terdapat ketidak sesuaian antara kemampuan yang dimiliki perangkat dengan kebutuhan pekerjaan dan (2) dari segi kuantitas ketersediaan sumber daya manusia juga masih dirasakan kurang oleh pihak kelurahan. Secara kuantitas, perangkat desa yang dimiliki oleh desa relatif bervariasi. Desa Panca Bakti misalnya hanya memiliki 3 perangkat, Desa Margo Rejo mempunyai 4 perangkat dan Desa Margo Mulyo memiliki 5 perangkat.

Temuan penting lainnya dari hal ini adalah kebijakan implementasi pembangunan tidak mengantisipasi terjadinya ketimpangan kewenangan antara desa dan kecamatan. Padahal kedua lembaga tersebut bersentuhan langsung dengan warga masyarakat di level. Idealnya, desentralisasi juga berimplikasi pada penguatan kapasitas lembaga lokal.⁹⁸ Dalam hal ini, kapasitas desa juga idealnya mengalami penguatan karena dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan. Publik di wilayah desa tentu akan mengalami kerugian apabila kapasitas pemerintah desa tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

⁹⁶ Okta Permata Sari, *Wawancara*, Perangkat Desa Margo Mulyo, 21/02/2008.

⁹⁷ Silvia Anggraini, *Wawancara*, Kader PKK Desa Sinar Jati, 21/02/2018.

⁹⁸ Edi Paryanto, *Wawancara*, Ketua BPD Desa Gerning, 21/02/2018.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁹⁹ Oleh karena itu, Dana Desa tidak boleh digunakan asal-asalan atau untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan Desa. Dana Desa harus sesuai atau selaras dengan RPJMDes dan RKPDes. Dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa harus memenuhi empat prioritas utama. Keempat prioritas utama penggunaan Dana Desa yaitu; pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁰⁰

Penggunaan Dana Desa untuk prioritas penggunaan Sarana dan Prasarana Desa harus mendukung target pembangunan sektor unggulan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan.¹⁰¹ Untuk sarana dan prasarana didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, yang sejalan dengan pencapaian target dalam RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya.

Pengelola keuangan desa dituntut untuk menjunjung tinggi, memegang teguh etika mengelola keuangan. Karena, uang membawa godaan yang besar untuk melanggar hukum dan etika Islam. Siapa saja yang melanggar etika akan berdampak pada sanksi sosial, yang menyebabkan merosotnya martabat seseorang di hadapan masyarakat. Jika melanggar hukum tentu akan berhadapan dengan hukum. Pada sisi lain, tugas dan tanggungjawab mengelola keuangan desa berhubungan erat dengan nasib rakyat desa. Oleh karena itu, APB Desa yang harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyat desa. Selanjutnya, apakah

⁹⁹ Haryoto, *Op. Cit.* 22/06/2018.

¹⁰⁰ Okta Permata Sari, *Op. Cit.*, 22/06/2018.

¹⁰¹ Sugiyana, *Op. Cit.*, 22/06/2018.

desa kita akan menjadi desa yang maju dan rakyatnya sejahtera di masa mendatang, ditentukan oleh sejauh mana etika para pengelola keuangan desa.¹⁰²

Pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara. Masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) setempat serta kepada Pemerintah Supra Desa (Kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan. Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan.¹⁰³

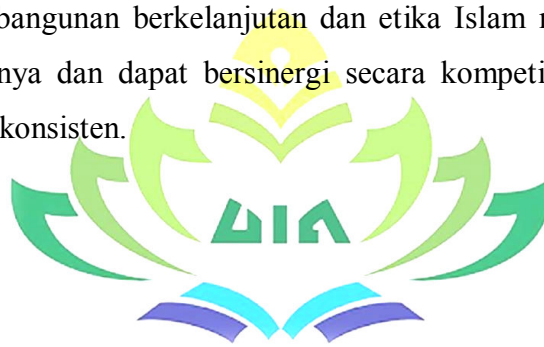
Implementasi kebijakan desentralisasi melalui UU No 06 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan dampak besar terhadap status kelembagaan desa. Sebelumnya, desa tidak memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan. Sejak tahun 2015, pemerintah desa sudah menjadi organisasi perangkat daerah mandiri yang dinaungi oleh kecamatan. Konsekuensinya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa ditentukan oleh kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah kecamatan. Kinerja pelaksanaan pembangunan fisik di tingkat desa berada pada level rendah. Situasi ini tentu tidak menguntungkan masyarakat di

¹⁰² Nyoto Prayitno, *Wawancara*, Tokoh Adat Desa Trimulyo, 08/08/2018.

¹⁰³ Solich Saadi Mardiyani, *Wawancara*, Masyarakat Desa Kejadian, 09/08/2018.

wilayah desa. Harapannya, perubahan kebijakan desentralisasi dapat semakin menguatkan kelembagaan desa. Namun dalam realisasinya, desa justru menjadi lembaga yang harus menerima biaya politik dalam bentuk pengurangan kewenangan dan anggaran pembangunan desa, hal ini terjadi jika pembangunan yang berlangsung tidak dilandasi oleh etika Islam, baik secara geografis maupun sosiologis tidak dapat menyediakan fasilitas umum dan sosial yang diharapkan masyarakat. Situasi ini bertolak belakang dengan Pemerintah Desa yang didukung dengan dana desa yang besar dapat melakukan aktivitas pembangunan fisik lebih baik daripada ketiga kelurahan tersebut. Dengan demikian, secara kelembagaan fungsi dan tugas kelurahan menjadi lebih banyak berkurang daripada pemerintah desa.¹⁰⁴

Berarti pembangunan berkelanjutan dan etika Islam memiliki kaitan yang erat antara keduanya dan dapat bersinergi secara kompetitif dan direncanakan secara benar serta konsisten.



¹⁰⁴ Syahrudin, *Op. Cit*, 21/02/2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data dan hasil analisis penelitian dalam tesis ini, Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pembangunan berkelanjutan secara konseptual dipahami sebagai usaha pemenuhan kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan dan dikaji sebagai sebuah proses penyebaran kesejahteraan dari kehidupan sosial.
2. Pembangunan desa sebagai sistem yang dikonstruksi Undang-undang Desa telah menempatkan masyarakat pada posisi strategis, sebagai subjek pembangunan, dengan demikian, masyarakat memiliki ruang dan peran strategis dalam tata kelola desa, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan desa. Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan ataupun pembangunan ekonomi masyarakat dan tetap mengindahkan peran etika.
3. Etika bukan hukum, tetapi setiap tindakan yang melanggar etika pasti akan melanggar hukum. Untuk menjawab permasalahan pada hakikatnya pembangunan desa berbasis etika seharusnya memosisikan etika Islam sebagai konsep kebijakan dan implementasi Undang-undang Desa dalam pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan makna hakiki yang terkandung dalam pembangunan, maka menghadirkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika dalam proses pembangunan adalah sebuah keniscayaan. Bahwa pembangunan tanpa etika adalah buta dan etika tanpa pembangunan adalah kosong. Karena pembangunan yang berbasis nilai-nilai etika dapat menjamin keadilan, keselarasan, keseimbangan dalam kehidupan sosial skala global. Serta

yang paling penting adalah keberadaan etika dalam proses pembangunan mempunyai komitmen yang kuat pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan sebagaimana mestinya, demi kelangsungan hidup generasi-generasi penerus dimasa depan.

- b. Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Inti dari Undang-Undang Desa adalah soal hak. Soal memenuhi hak semua warga dan masyarakat. Hak untuk diakui, untuk mendapatkan keadilan, memperoleh kesejahteraan, untuk terlibat dalam pembangunan desa, untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, untuk mengembangkan ekonomi, dan juga untuk mengurus desa sendiri. Konsep etika Islam memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukkan pada aturan Allah. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuanNya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus wakil Allah di bumi bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan dengan baik dan sukses sangat bergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan.
- c. Etika Islam dalam pembangunan bersifat material dan spiritual, yang mencakup pula pembangunan sumber daya manusia (SDM), sosial, budaya, ekonomi dan lainnya. Dalam hal lain dampak pembangunan dalam etika Islam adalah menyeluruh sebagai konsepsi Islam sebagai agama yang menyeluruh. Bukan hanya ekonomi yang bersifat material tetapi juga pembangunan nonmaterial yang bersifat spiritual, akhlak, sosial dan kebudayaan.

Berarti pembangunan berkelanjutan dan etika Islam memiliki kaitan antara keduanya dan dapat bersinergi secara kompetitif dan direncanakan secara benar serta konsisten.

B. Saran-Saran

Dengan total dana yang digelontorkan sangat fantastis itu, tidak mustahil akan diselewengkan oleh perangkat desa yang tidak bertanggungjawab serta etika yang tertanam dalam diri pelaku pembangunan yang memudar, menjadi salah satu faktor gagalnya pembangunan, dengan ini penulis memberikan beberapa saran-saran dengan harapan tetap menanamkan bahwa pembangunan dan etika Islam sangat erat kaitannya. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah lokal maupun pusat tetap menanamkan etika dalam Undang-undang Desa, karena tidak hanya mengamankan pengaturan tentang keuangan desa, tetapi juga meliputi pengakuan terhadap kewenangan desa, kerjasama antar desa, penguatan lembaga pemasyarakatan desa, penetapan dan pemberdayaan desa adat, partisipasi masyarakat desa dan sebagainya. Disisi lain demokratisasi desa juga masih terkendala oleh lemahnya tingkat partisipasi yang substantif dan konstruktif dari masyarakat desa. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Selanjutnya, apakah desa akan menjadi desa yang maju dan rakyatnya sejahtera dimasa mendatang, ditentukan oleh sejauh mana etika para pemegang tongkat komando kekuasaan.
2. Hendaknya pembangunan berkelanjutan mentransformasi format sosial atas dasar kerja bersama untuk menatap masa depan yang memenuhi hak semua warga dan masyarakat. Hak untuk diakui, untuk mendapatkan keadilan, memperoleh kesejahteraan, untuk terlibat dalam pembangunan desa, untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, untuk mengembangkan ekonomi, dan juga untuk mengurus desa sendiri maka penting partisipasi masyarakat dari adanya sebuah

pembangunan tersebut, dan juga bagaimana proses pelaksanaan yang seutuhnya.

3. Hendaknya pemerintahan desa dan masyarakat saling bersinergi mengimplementasikan perihal peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat yang memberikan partisipasi dalam pembangunan berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan.

C. PENUTUP

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas izin-Nya jualah, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, serta sholawat dan salam penulis curahkan kepada nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi semua manusia.

Menyadari akan kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu saran dan kritik peneliti harapkan untuk kesempurnaan pembahasan ini. Akhirnya semoga karya tesis sederhana ini bermanfaat baik bagi penulis maupun khalayak pembaca, aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Yatim. 2006. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahmah, Abu Usamah. “Perencanaan Dalam Kaidah Islam”, <https://islamisonone.wordpress.com/2013/01/11/perencanaan-dalam-kaidah-islam/>, (akses internet tanggal 14 Februari 2018, jam 16.28 WIB).
- Arsyad, Loncolin. 2015. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badruddin. 2009. *Teori dan Indikator Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Baharudin, M. 2013. *Dasar-Dasar Filsafat*, Bandar Lampung: Harakindo Publishing.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1984. *Falsafah Ibadah dalam Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan UII.
- Crocker, David A. 2008. *Ethic of Global Development: Agency, Capability and Deliberative Democracy*. Cambridge University Press.
- Darajat, Zakiah. 1976. *Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djajadinigrat. 2001. *Untuk Generasi Masa Depan: “Pemikiran, Tantangan dan Permasalahan Lingkungan*. Bogor: ITB.
- Fakih, Mansour. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Habibie, B.J. 1997. “M. Dawam Rahardjo, ICMI dan Habibienomics” dalam buku, Ihsan Ali Fauzi (ed), *Demi Toleransi Demi Pluralisme*. Pustaka Cidesindo: Universitas Michigan.
- Hamah, Ya’kub. 1996. *Etika Islam :Pembinaan Akhlakul Karimah*. Bandung: Diponegoro.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2015. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Husein, Machnun. 1986. *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Irawan, Soeharto. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Irawan, Soehartono. 2003. *Metode Penelitian Sosial (Studi Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Ismail, Faisal. 2002. *Pijar-Pijar Islam "Pergumulan Kultur Dan Struktur"*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Keagamaan.
- Jafar, Marwan. 2015. *Kebangkitan Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kamaluddin, Undang Ahmad. 2012. *Filsafat Manusia "Sebuah Perbandingan Antara Islam Dan Barat"*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kansil dan Cristine. 2002. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. 1988. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Social*. Bandung : Mandar Maju.
- Keraf, A. Sonny. 2014. *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama Fritjof Capra*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kumar, Philip Quarles Ufford dan Ananta. 2004. *Kritik Moral Pembangunan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kuncoro, Mudrajad. 1995. *"Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan"*. Jakarta: Prisma.
- Mubyarto. 1986. *Etika Pembangunan Ekonomi dalam Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.

- Nata, Abuddin. 2011. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Ndaraha, Taliziduhu . 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Nuridin, A. Fauzie. 2009. *Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat*. Yogyakarta: Gama Media.
- _____. 2014. *Sosiologi Pembangunan*. Yogyakarta: Panta Rhei.
- Palupi, Sri dkk. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poespoprodjo. 1999. *Filsafat Moral “Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek”*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Prabawa, Akbar. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Ilmu Pemerintah.
- Priyono, B. Herry. 2004. “Mencari Badan Publik: Refleksi bagi Rehabilitasi Arti Pembangunan” dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Rahardjo, Dawam. “Aliansi Kebangsaan: Indonesia Telah Gagal Mengelola SDA”, www.jakartakita.com, (akses internet tanggal 02 Maret 2018, jam 16.00 WIB).
- Rahman, Budhi Munawar. 2010. *Reorientasi Pembaharuan Islam*. Jakarta: Democracy Project.
- Said, Muhammad. 1980. *Etika Masyarakat Indonesia*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Salam, Burhanuddin. 2002. *Etika Sosial “Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia”*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Salam, Burhanuddin. 2012. *Etika Individual, (Pola Dasar Filsafat Moral)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Mandar Maju.
- Sudjoko, dkk. 2019. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa: Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press.
- Sukirno, Sadono. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dan Bina Grafika.
- Suseno, Franz Magnis. 1986. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia.
- Sutamihardja. 2004. *Perubahan Lingkungan Global;Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana*, IPB.
- Syamsuddin, M. Din. 2000. *Etika Agama dalam membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2004. *Birokrasi dalam Polemik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Walgito, Bimo. 1987. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Winarno, Budi. 2008. *Gagalnya Organisasi Desa dalam Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Kencana.
- _____. 2013. *Etika Pembangunan*. Yogyakarta: Caps Publishing.
- _____. 2009. *Pertarungan Negara Versus Pasar*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Surakhmat. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: tpm.
- Zubair, Anton Baker dan Achmad Charris. 1983. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.

DAFTAR NAMA-NAMA KEY INFORMAN

No	Nama	Umur	Jabatan	Keterangan
1.	Syahrudin	53 tahun	Camat Tegineneng	
2.	Haryoto	54 tahun	Sekretaris Camat Tegineneng	
3	Sugiyana	53 tahun	KASI PMD Tegineneng	



DAFTAR NAMA INFORMAN

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1.	Jala Reza	Petani	Tokoh Adat Desa Kejadian
2.	Bambang Widiatmo	Wiraswasta	Tokoh Adat Desa Kejadian
3.	Hermanto	Wiraswasta	Tokoh Adat Desa Kejadian
4.	Sukendar	Petani	Tokoh Adat Desa Rejo Agung
5.	Abdul Rohim	Petani	Tokoh Adat Desa Rejo Agung
6.	Ma'ruf Syafi	Wiraswasta	Tokoh Adat Desa Rejo Agung
7.	Andhika Yuliandika	Petani	Tokoh Adat Desa Negara Ratu Wates
8.	Januri	Petani	Tokoh Adat Desa Negara Ratu Wates
9.	Aris Munandar	Petani	Tokoh Adat Desa Negara Ratu Wates
10.	Yurnalis	Petani	Tokoh Adat Desa Negara Batang Hari Ogan
11.	Raizalmli	Petani	Tokoh Adat Desa Negara Batang Hari Ogan
12.	Risman	Petani	Tokoh Adat Desa Negara Batang Hari Ogan
13.	Jusni Hanafi	Petani	Tokoh Adat Desa Gunung Sugih Baru
14.	Husen Burhan	Petani	Tokoh Adat Desa Gunung Sugih Baru
15.	Zulkifli	Wiraswasta	Tokoh Adat Desa Gunung Sugih Baru

16.	Nyoto Prayitno	Wiraswasta	Tokoh Adat Desa Trimulyo
17.	Sahri	Petani	Tokoh Adat Desa Trimulyo
18.	Solikin	Wiraswasta	Tokoh Adat Desa Trimulyo
19.	Jaya Sakti	PNS	Masyarakat Desa Kejadian
20.	Solich Saadi Mardiyani	Wiraswasta	Masyarakat Desa Kejadian
21.	Indra Gunawan	Wiraswasta	Masyarakat Desa Batang Hari Ogan
22.	M. Kaliman	Wiraswasta	Masyarakat Desa Batang Hari Ogan
23.	Sukarno	Tani	Masyarakat Desa Rejo Agung
24.	Surono	Wiraswasta	Masyarakat Desa Rejo Agung
25.	Johan	Tani	Masyarakat Desa Gunung Sugih Baru
26.	M. Angga P	Tani	Masyarakat Desa Gunung Sugih Baru
27.	Dipwantono	Tani	Masyarakat Desa Sinar Jati
28.	Ahmad Hamdani S	Wiraswasta	Masyarakat Desa Sinar Jati
29.	Silvia Anggraini	Wiraswasta	Masyarakat Desa Sinar Jati
30.	Widia Fitriana	IRT	Masyarakat Desa Sinar Jati
31.	Okta Permata	Wiraswasta	Masyarakat Desa Margo Mulyo
32.	F. Yunita Astuti	Wiraswasta	Masyarakat Desa Margo Mulyo
33.	Hardina	IRT	Masyarakat Desa Trimulyo
34.	Vinalis Budiarti	Wiraswasta	Masyarakat Desa Trimulyo

35.	Mela Ariani	Wiraswasta	Masyarakat Desa Margo Rejo
36.	Suyanti	Wiraswasta	Masyarakat Desa Margo Rejo
37.	Neli Susanti	Wiraswasta	Masyarakat Rejo Agung
38.	Meli Putri Yuningsih	Wiraswasta	Masyarakat Rejo Agung





DAFTAR PERTANYAAN

- a. Pertanyaan kepada tokoh adat, guna mendapatkan data yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Desa yang diterapkan di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
 1. Apakah Yang Dimaksud Dengan Undang-Undang Desa?
 2. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Desa Di Kecamatan Tegineneng?
 3. Apa Sajakah Yang Termasuk Dalam Kegiatan Pelaksanaan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa?
 4. Apa Sajakah Yang Termasuk Dalam Kegiatan Inti Dari Diterapkannya Undang-Undang Desa Pada Kecamatan Tegineneng?
 5. Apakah Etika Islam Berpengaruh Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Desa di Kecamatan Tegineneng ?
 6. Dari Manakah Sumber Etika Islam Tersebut?
 7. Apakah Tujuan Dari Pembangunan yang berlandaskan Etika Islam?
 8. Adakah Manfaat dan Kerugian dari Pengaplikasian Undang-Undang Desa di Kecamatan Tegineneng?
 9. Kapanakah Undang-Undang Desa Dilaksanakan?
 10. Adakah Fungsi Etika Islam Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Desa di Kecamatan Tegineneng?
 11. Adakah toleransi ketika penggunaan dana desa tidak sesuai dengan RAB diukur dari etika Islam?
- b. Pertanyaan kepada tokoh masyarakat desa Kecamatan Tegineneng, guna mendapatkan data mengenai perkembangan desa dalam implementasi pembangunan desa yang berlandaskan etika Islam

1. Bagaimana perkembangan Kecamatan Tegineneng dalam pembangunan desa di bidang insfrastruktur?
 2. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat Kecamatan Tegineneng?
 3. Bagaimana kondisi sosial masyarakat Kecamatan Tegineneng?
- c. Pertanyaan kepada masyarakat desa Kecamatan Tegineneng, guna mendapatkan data mengenai peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa menurut Undang-Undang Desa.
1. Sejauh manakah tingkat partisipasi masyarakat desa Kecamatan Tegineneng dalam pelaksanaan pembangunan desa menurut Undang-Undang Desa?
 2. Bagaimana pendapat masyarakat desa Kecamatan Tegineneng dampak dari berlakunya Undang-Undang Desa?
 3. Bagaimana pandangan masyarakat desa Kecamatan Tegineneng, dalam melihat pelaksanaan pembangunan tanpa dilandasi oleh Etika Islam?

